



LAPORAN KINERJA
PENGENDALIAN INFLASI

T.A 2025



Formulir *Self Assessment*
Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Kabupaten/Kota : KOTA JAYAPURA

Kegiatan	Kriteria	Rekap Kegiatan (contoh)	Nilai per-Kegiatan (a)	Jumlah Kegiatan /Laporan (b)	Bobot (c)	Total (a) x (b) x (c)
High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID, termasuk dengan pihak terkait lainnya)	Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga **yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati.**	HLM TPID dipimpin Walikota/ Wakil Walikota; 1. 17 Februari 2025 2. 28 Februari 2025 3. 4 Maret 2025 4. 12 Juni 2025 5. 11 Juli 2025 6. 2 September 2025 7. 8 September 2025 8. 16 September 2025	10	8		
	Rapat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh **Sekretaris Daerah**.	HLM TPID dipimpin Sekda: 1. 19 Agustus 2025 2. 25 Agustus 2025 3. 18 Desember 2025	5	3		

Kegiatan *Capacity Building* (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID)	*Workshop* atau studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi.	1. 25 September 2025 2. 13 November 2025	5	2		
Pelaksanaan kebijakan di daerah	Seluruh produk kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID serta disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID dalam HLM.	Produk hukum dan/atau kebijakan hasil Koordinasi TPID dalam HLM: 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintahan Kabupaten Keerom tentang kerja sama Distribusi dan Pemasaran pangan tertanggal 13 April 2023.Kerjasama berjalan 5 Tahun Periode 2023 – 2027 yang mana tertuang dalam klausul Jangka waktu pasa pasal 7 kesepakatan Bersama ini. Nomor: 521/237/X/2023 Nomor : 520 / 339 / DP/ 10/2023; 2. PKS Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNHAS Nomor:523/445/IX/2025 dan 4202/UN.1.7/PT.01.03.2025; 3. PKS Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNHAS Nomor:520/210/VIII/2025 dan 3543/UN.1.7/PT.01.03.2025; 4. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/307/Tahun 2025 tentang Harga Acuan	6	18	10%	

		Penjualan Kota Jayapura Tahun anggaran 2025; 5. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/63/Tahun 2025 tentang Penerima bantuan subsidi pertanian pasar murah dan penetapan nilai subsidi komoditas pertanian dalam rangka pengendalian Inflasi daerah di Kota Jayapura Tahun 2025; 6. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/267/Tahun 2025 tentang kelompok Masyarakat/Petani penerima bantuan obat-obatan plastic mulsa dan mesin combine mini pertanian di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 7. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/234/Tahun 2025 tentang Kelompok Masyarakat/petani penerima bantuan melalui kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi di wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 8. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/402/Tahun 2025 tentang kelompok Masyarakat petani penerima benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak ayam broiler di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 9. Surat Keputusan Walikota				

		Jayapura No. 188.4/340/Tahun 2025 tentang satuan tugas ketahanan pangan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 10. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/368/Tahun 2025 tentang nelayan di Distrik Abepura – Kampung Nafri penerima bantuan hibah perahu Tahun 2025; 11. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/388/Tahun 2025 tentang nelayan Distrik Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami pada Kampun Tahima Soroma, Kampung Enggros dan Kampung Skouw penerima bantuan hibah motor tempel Tahun Anggaran 2025; 12. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/389/Tahun 2025 tentang Masyarakat Distrik Jayapura Selatan penerima hibah sarana budidaya ikan air payau/laut Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/255/Tahun 2025 tentang Masyarakat Kampung Enggros Distrik Abepura penerima bantuan hibah Fish Apartment Attractive (Rumah Ikan) Tahun Anggaran 2025; 14. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/256/Tahun 2025 tentang Orang Asli Papua penerima hibah bangunan bangsal pengolahan ikan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 15. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/111/Tahun 2025 tentang sepuluh kampung				

		adat penerima bantuan hibah pangan Cadangan pangan pemerintah daerah dan intervensi kerawanan pangan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 16. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/287/Tahun 2025 tentang Koperasi penerima bantuan hibah sembako di wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025; 17. Surat Keputusan Walikota Jayapura No. 188.4/290/Tahun 2025 tentang Koperasi penerima bantuan hibah bangunan TPK, sembako dan meubeler di wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 18. Instruksi Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengaturan jam layanan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi di Wilayah Kota Jayapura.				

	Penerbitan peraturan pelaksanaan **yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah**, baik berupa Peraturan Perundangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stablisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID.					
	Surat Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah / Kepala OPD anggota TPID kepada K/L atau pihak eksternal TPID terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.	Surat kepada eksternal TPID: 1. Surat Sekretaris Daerah No. 511.2/0512/SET tentang dukungan pasar murah Tahun 2025 kepada APRINDO; 2. Surat Sekretaris Daerah No. 500/0596/SET tentang Permintaan data harga kepada BPS Kota Jayapura;	4	2		

Laporan Triwulanan TPID	Sebagaimana diatur Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota menyampaikan laporan triwulanan yang meliputi: 1) Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bapokting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK) 2) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah 3) Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah 4) Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah 5) Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah	1) Triwulan 1 2025 2) Triwulan 2 2025 3) Triwulan 3 2025 4) Triwulan 4 2025	25	4	5%	

Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen

KOMPONEN KOORDINASI

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 13 Februari 2025

Nomor : 005 / 0534/SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 / 731 /SJ dengan agenda Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Pembahasan persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025,Dan Untuk Pembahasan tindak lanjut di Kota Jayapura maka, kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 17 Februari 2025
Jam : 14.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA

Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :

1. **Walikota Jayapura (Sebagai laporan)**
2. **Arsip**

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Hari/Tanggal : Selasa 17 Februari 2025

Pukul : 14.00 Wit – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rapat Inflasi Nomor: 500.2.3/731 / SJ Perihal : Rapat Koordinasi Pengrndalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan pembahasan persiapan Angkutan lebaran Tahun 2025,

II. Peserta Rapat :

1) Asisten II
2) Kapolresta Jayapura
3) Dandim Prov Papua
4) Bappeda Kota Jayapura
5) Dinas Perikanan Kota Jayapura
6) Dinas Perhubungan Kota Jayapura
7) BPS Kota Jayapura
8) Dinas Perindagkop Kota Jayapura
9) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura
10) Kepala BPS Kota Jayapura

Ucapan dan Salam

Pj. WALIKOTA : Maksud dari Pembahasan kita hari ini adalah terkait Koordinasi Pengrndalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan pembahasan persiapan Angkutan lebaran Tahun 2025,sesuai dengan arahan Mendagri pada Zoom tadi,dan saya mohon informasi dari masing _ masing OPD untuk memberikan informasi terkait stok pangan menjelang lebaran dan Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian dan sedangakan Dinas perindagkop dan UKM terkait Distributor dan Harga di pasar moderen dan pasar tradisional perIndagkop sedangkan untuk informasi terkait Perhubungan terkait mudik an lalulintas di Kota Jayapura.

Kepala Bappeda : Ijin Pimpinan melaporkan dari Bappeda sebagai secretariat TPID Kota Jayapura ,bahwa upaya yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Rapat –rapat Kooordinasi yang di harapkan di pimpin oleh Pimpinan Daerah selaku pengambil kebijakan dan penilaian Kinerja TPID Aword ,pelaksanaan Pasar murah yang akan dilaksanakan pada 5 Distrik dan 25 Kalurahan dan kampung yang ada di dalam Kota ,kampung Waena dan Kampung Yoka, di jadwalkan sebanyak 48 kali yang komoditasnya sekitar 13 Komoditas yang di berikan subsidi 30 % - 40 % antara lain Ikan Ekor kuning,ikan cakalang,ikan tongkol,Ikan Kembung,Udang, Daging Sapi, Ayam lokal, Telur ayam lokal, cabai, tomat, Bawang merah, Bawang putih da nada juga berupa paket yang di jual dengan harga Rp 75.000/ Kantong dengan isi Beras Premium 5 kg,Gula 1 kg,dan minyak goreng (1 liter) .untuk menjelang hari Raya keagamaan di pelaksanaan sebanyak 6 kali kegiatan pasar murah untuk Bulan Februari dan Maret 2025 ,upaya yang

kedua yang dilaksankan adalah melaksanakan Sidak pada Pasar moderen dan pasar tradisional ,Gerakan menanam Cabe dan Bawang merah sebagai komoditas penyumbang Inflasi,dan memperbaiki infrastruktur saluran irigasi pertanian.

Pertanian : Harga bahan makanan seperti cabe,telur dan cabe rawit,bawang merah,bawang putih masih tergantung pada daerah diluar Papua,contohnya bawang putih dan merah dari makasar,karna stok dari petani di Kota Jayapura terbatas ,dan untuk bawang putih tdk cocok di tanam di muaratami pada mati.sehingga kalau ketrlambatan Stok mengakibatkan harga Stok komoditas tinggi,dan kendala yang kedua adalah musim hujan yang menyebabkan stok berkurang.

Perindagkop: Ijin melaporkan pimpinan bahwa kami dari Dinas telalh melakukan pengmbilan data harga setiap hari rabu dan melakukan pengawasan bagi pedagang di pasar tradisional,dan sebagai hasil pantauan kami bahwa harga cabe dan cabe rawit serta beras masih mengalami kenaikan ,sedangkan Beras SPHP akan menunggu waktu pengiriman ke Kota Jayapura sebelum hari Raya Idul Fitri

Perhubugan : Program Dinas Perhubungan Kota Jayapura melaksanakan posko pada titik rawan dan pusat keramaian menjelang hari raya lebaran / Idul Fitri Tahun 2025

Kapolresta: Dalam rangka menjelang Idul Fitri Poltresta kota jayapura khususnya Dirlantas Polda Papua ,bersama Dinas Perhubungan Kota Jayapura di awali dengan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan Cartens 2025 ,Polda Papua melaksnakan apel serentak se Indonesia dilaksanakan pada 10 Februari 2025 .

Dandim : Kami dari TNI juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan situasi kamtikmas di Kota Jayapura di tempat – tempat tempat yang rawan dan membangun Pos Keamanan serta ada Patroli keliling yang di lakukan setiap hari sampai memasuki Hari raya dan berakhirnya hari Raya Idul fitri.

Pj Walikota : Dari OPD teknis yang sudah menyampaikan terkait harga dan kendala lapangan an juga dari Kapolresta yang telah berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk menjaga lalulintas trimakasih ,untuk TPID Kota Jayapura agar bisa mencari lokasi yang warga muslimnya banyak agar mereka bisa berbelanja dengan harga yang terjangkau .

KESIMPULAN :

1. Kesiapan Stok menjelang hari Raya Lebaran perlu kita perhatikan terutama dgn kregitaan pasar murah pada tempat – atau lokasi yang banyak warga muslimnya ,sehingga membantu dengan harga yang terjangkau.
2. Keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya perlu dilakukan ,agar masyarakat merasa nyaman dalam melaksankan hari Raya Idul Fitri

Notulis,

KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF,SE
NIP.19761213 2002122004

Pimpinan Rapat

Pj.Walikota Jayapura

DOKUMENTASI RAPAT TPID 17 FEBRUARI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK PJ. WALIKOTA







PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balikota NO. 1 Entrop Telpf. (0967) 534786, 531522, 531021

KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2026

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	Cristian Sohilait.	Pemkot JPR	Pj. Walikota		1.
2	Wedhi Hartanto	Pemkot JPR	Asisten II		2.
3	Viktor Makbon	Polresta	Kapolresta.		3.
4	Taufik Hidayat.	Kodim 1701/JPR	Dandim 1701		4.
5	Djoni. Naa	Bappeda Kota JPR	Kepala Bappeda		5.
6	Kristin W	Dinas Perikanan	Sekretaris		6.
7	Yuliana. Maniagasi	Dinas Perhubungan	Kabid Angkutan Darat		7.
8	Richard Hutagaluny	Dispor	Plt. Kadispar		8.
9	Endah Lestari	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Kabid. Hortikultura		9.
10	Sugiyanto	Kepala BPS	Kepala BPS		10.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 26 Februari 2025

Nomor : 005/0533/SET
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura.**

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2025 akan dilaksanakan rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka persiapan awal bulan puasa dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri, Untuk itu, kami mengundang Bpk/Ibu hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Jumat, 28 Februari 2025
Jam	: 10.00 WIT s/d selesai
Tempat	: Ruang rapat Walikota Jayapura

Demikian disampaikan, atas kehadiran bapak/ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. WALIKOTA JAYAPURA
Pj. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690308 199403 1 010

Tembusan :
1. *Pj. Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);*
2. *Arsip.*

Lampiran
Nomor :005 /0533/SET
Tanggal : 26 Februari 2025

DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PERSIAPAN AWAL BULAN PUASA DAN PERSIAPAN MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA JAYAPURA

1. PJ. WALIKOTA JAYAPURA;
2. KETUA DPRD KOTA JAYAPURA;
3. KAPOLRESTA JAYAPURA KOTA;
4. KOMANDAN KODIM 1701;
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
7. DANSATROL LANTAMAL X;
8. Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA;
9. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA;
10. PIMPINAN BANK PAPUA KCU JAYAPURA;
11. ASISTEN PEMBANGUNAN SETDA KOTA JAYAPURA;
12. STAF AHLI BIDANG EKBANG KESRA WALIKOTA JAYAPURA;
13. INSPEKTUR KOTA JAYAPURA;
14. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
15. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA JAYAPURA;
16. KEPALA BPKAD KOTA JAYAPURA;
17. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
18. KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA;
19. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA;
20. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA;
21. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA;
22. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAYAPURA;
23. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA;

24. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA;
25. KASATPOL PP KOTA JAYAPURA;
26. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA;
27. KEPALA PT. PLN UP3 CABANG KOTA JAYAPURA;
28. KEPALA PT. AIR MINUM JAYAPURA ROBONGHOLO NANWANI KOTA JAYAPURA;
29. KEPALA PT. PELINDO CABANG JAYAPURA KOTA JAYAPURA;
30. KEPALA BULOG KANWIL PAPUA DAN PAPUA BARAT;
31. KEPALA BALAI POM PROVINSI PAPUA;
32. KEPALA BPS KOTA JAYAPURA;
33. KEPALA PERTAMINA KOTA JAYAPURA;
34. KEPALA UPT PPI/TPI HAMADI JAYAPURA;
35. SEKRETARIS BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
36. KABID EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
37. KABID. HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
38. KABID. PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KOTA JAYAPURA;
39. KABID. PENGUATAN DAYA SAING PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA;
40. KASUBBID INDAGSI DITRES KRIMSUS POLDA PAPUA;
41. KASUBBID PERRENCANAAN USAHA EKONOMI PADA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
42. KASUBBID PERENCANAAN EKONOMI KREATIF DAN KEPARIWISATAAN PADA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
43. KASUBBID PERENCANAAN EKONOMI PRODUKSI PADA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
44. KASIE PENGELOLA TELEMATIKA DAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMINFO KOTA JAYAPURA;
45. STAF SEKRETARIAT TPID KOTA JAYAPURA;
46. STAF IT PADA DINAS KOMINFO KOTA JAYAPURA;

a.n Pj. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SETDA

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690308 199403 1 010

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

NOTULEN RAPAT PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Hari / Tanggal : Jumat, 28 Februari 2025
Waktu : 10.00 WIT s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota Jayapura

Peserta Rapat Pengendali Inflasi :

1. Penjabat Walikota Jayapura
2. Kapolresta Kota Jayapura
3. Dandim 1701
4. Dansatrol Lantamal X
5. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
6. Asisten Pembangunan Sekda Kota Jayapura
7. PT. Pelindo Cabang Jayapura
8. Bulog Drive
9. Balai Besar POM Provinsi Papua
10. Kasubid Indagsi Polda Papua
11. PT. Pertamina
12. Asisten Pembangunan & Kesra
13. Kepala Bappeda Kota Jayapura
14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura
15. Kepala Bapenda Kota Jayapura
16. Kepala DPM & PTSP
17. Plh. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Jayapura
18. Kepala Bidang Perdagangan
19. Kepala Bidang Pertanian & Holtikultura
20. Kepala Bidang Perikanan
21. Kasubbid Perencanaan Ekonomi Kreatif & Kepariwisataan
22. Kasubbid Perencanaan Ekonomi Produksi
23. Perwakilan Kominfo
24. Staf Sekretariat TPID

6. Terminal – terminal resmi dan tidak resmi. Karena menjadi pintu masuk ke dalam kota Jayapura

Dinas Kesehatan :

1. Perbanyak tim reaksi cepat 911 selama bulan puasa sampai Lebaran
2. Perbanyak dan perkuat tim harus ada di puskesmas

Dinas Perikanan :

1. Harga ikan di bulan Januari dan februari mengalami inflasi karena faktor cuaca
2. Penyumbang inflasi adalah ikan tuna, tongkol dan cakalang. Karena lokasi penangkapannya 16 – 20 kilometer dari jayapura, sehingga faktor cuaca memang menjadi faktor utama
3. Dari hasil pemantauan di TPI Hamadi, harga ikan tuna mencapai harga Rp 40.000
4. Produk ikan yang lain bisa dikatakan stabil
5. TPI Hamadi dikuasai oleh DKP Provinsi Papua. Sehingga susah untuk mengontrol harga.

Dinas Pariwisata :

1. Dampak besar akan berada pada masa liburan ke lokasi wisata. Dan akan dilakukan koordinasi dengan pemilik wisata agar dapat dikelola
2. Akan dipastikan setiap lokasi wisata dalam kondisi baik dan aman

BPOM :

1. Sudah dilakukan survey dalam pemeriksaan barang seluruh kota Jayapura

BULOG :

1. Stok beras sekitar 4.275 ton atau setara ketahanan stok 4,7 bulan
2. Beras premium 100 ton, dan dalam perjalanan sebesar 75 ton
3. Stok gula 20 ton, dalam perjalanan 50 ton
4. Minyak goreng masih dalam perjalanan. Dan akan masuk 40.000
5. Akan dilakukan operasi pasar melalui PT Pos
6. Untuk gerakan pasar murah akan dilakukan sepanjang bulan Ramadhan. Surat dari Kota Jayapura juga sudah masuk untuk gerakan pasar murah
7. Beras SPHP

PT Air Minum Robongholo :

1. Kesediaan air minum di 5 distrik masih bisa kami layani
2. Strategi jika terjadi kemacetan, ada 4 unit tanki untuk kegiatan yang lain termasuk buka puasa bersama

Satpol PP :

1. Satpol PP tetap menyesuaikan dengan agenda Pemerintah Kota, termasuk pengendalian inflasi
2. Koordinasi dengan OPD terkait untuk memantau semua harga barang
3. Koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kebakaran untuk membentuk Tim siaga bencana
4. Mengantisipasi pasar – pasar kaget saat pelaksanan Idul Fitri
5. Koordinasi dengan Bappeda tentang gerakan Pasar Murah

DPM PTSP :

1. Pelayanan perijinan berjalan optimal
2. Pelayanan perijinan saat libur berjalan dengan baik
3. Pantau kembali mall pelayanan publik agar berfungsi dengan baik

Bapenda :

1. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa saat ibadah puasa, tetapi tetap memberikan aparat yang muslim tetap melaksanakan ibadah

Kapolres Kota Jayapura :

1. Jangan lupa betapa pentingnya bahan pokok penting. Karena ada sering dilakukan pertemuan – pertemuan tingkat nasional sampai ke daerah terkait pengendalian inflasi. Kami dari Polresta Kota Jayapura mengikuti zoom dengan Kapolri membahas pentingnya pengendalian inlflasi dan ikut berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan – kegiatan baik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah.
2. Jangan sampai kebutuhan pokok penting menjadi isu utama dan jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah
3. Kalau bisa saat pengecekan harga bahan makan atau barang – barang di pasar, harap dikerjakan secara bersama.
4. Segera kumpulkan pengecer dan distributor untuk diberikan pemahaman agar ketika ada penyelesaian masalah, tidak langsung ke penegak hukum penegak hukum. Tetapi bisa diberikan teguran – teguran terlebih dahulu

Bappeda Kota Jayapura :

1. Bappeda menjadi koordinator memiliki langkah – langkah yang sama dan akan dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Yakni Gerakan Pasar Murah (GPM), dan sidak pasar.
2. Gerakan Pasar Murah akan dilaksakan 48 kali dari bulan maret sampai bulan desember. Dan ini dilaksanakan oleh TPID yang didalamnya ada Bappeda, Dinas Perindagkop, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, Bulog, BI dan Aprindo
3. Untuk sidak pasar dengan walikota baru, akan kami laporkan selanjutnya ke Walikota baru

Pelindo :

1. Dari Pelindo, siap menyesuaikan dengan keputusan Pemerintah

Asisten II :

1. Melaporkan setiap senin ada Rakor Inflasi se Indonesia yang dipimpin oleh Sekjen Mendagri, diminta semua Kepala Daerah harus hadir untuk dilaporkan langsung ke Mendagri

Pertamina :

1. Kondisi pasokan BBM aman. Setiap produknya ada. Suplaynya tersedia sampai di angka 10. Suplaynya tiba 6 hari sekali

Jayapura, 28 Februari 2025

Notulis,

Ghist Bearzat, ST, M.AP
NIP. 19870416 201104 1 001

Pimpinan Rapat

Pj. WALIKOTA JAYAPURA
Selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi

CHRISTIAN SOHILAIT, ST. M.Si

DOKUMENTASI RAPAT TPID 28 FEBRUARI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK PJ. WALIKOTA







PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kantor Walikota Jl.. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

KOTA JAYAPURA TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA JAYAPURA

HARI/TANGGAL : JUMAT, 28 FEBRUARI 2025

No	Nama Peserta	Instansi/OPD	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	L. Christian Sohilait		PJ. Walikota		1.
2	Faturachman	BI	Kak PW	082117612698	2.
3	Victor Mackbon	POLRESTA.	KARES.		3.
4	Wardoko	SATROL Lant. X.	Kasiops satrol X.	0812-8832-0905	4.
5	Faturachman	Bank Indonesia	Kepala Perwakilan BI Papua	-	5.
6	Sugiyanto	BPS Kota Jpr	Kepala	081344291121	6.
7	Richard Limbong	BPS Kota Jayapura	KF Statistik Distribusi	081245842762	7.
8	Melani Barangano	Bank Indonesia	Asisten Manager	0812 9777 3633	8.
9	Ariel Dahang Wa	Bank Indonesia	Asisten Manager	0897 9024 535	9.
10	Bintang Hidayat	Inspektorat Kota	Ir. Bakalerti MM (Ka)	087211327301	10.
11	SUTRISNO	Kodim 1701	DANYRAMIL JAPSEL	081344111010	11.
12	JAKA PERMANA	SATROL LANTAMAL X	PBS. PASOP SATROL	081233072543	12.
13	NYICANOR ANDIT	DISHUB	Kabid Lant.	082198822883.	13.
14	Endah Lestari	DKPP	Kabid TPH & BUN	081341764870	14.
15	DIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		15.

16	Marsono P. Idris	DPMPTSP	Staf Bid. Perizinan	08128976186	16.
17	Maraden	Dinas Pertanian	Kepala Bidang	085225225584	17.
18	Justinus Satanus	Dinas Perhubungan	Kadis	081344082258	18.
19	Rodny. Le. Kiri	BAPPENDA	SEKRETARIS	0811487555/	19.
20	Elviana	Bpom jayapura	Sekr Bid. pemerintah	085344947786	20.
21	MUHAMMAD RAHAYU	BBPOM JAYAPURA	Staf Bid. Pemeriksaan	082336885690	21.
22	Ir. Agussalim	Dinas perkan	Kabid PDSPP		22.
23	Boniphasius Deda	Sekretaris	Kasubag		23.
24	YOHANES BAYON	dis kominfo	kepala pegelola data	085244170477	24.
25	ICHSANUL YUSUFLO	KEPALA DITRESKRIMSUS POLDA PAPUA	ICHSANUL, WAKASI	081299651550	25.
26	Sujarwo	Bin Lat	Kepala Bidang	081240021647	26.
27	Ismail Rumadas	Mapar	plt		27.
28	YOAN JO NARSIS.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	BIROTDA	085244139778	28.
29	Ade Mubarakan	Pt. Sari Alfiyah Jaya	Kadiv		29.
30	Hendra Adi Wijaya	Bulog	Manager Komersial	081354351929	30.
31	Sudarsono	Bulog	Ka. Mutu		31.
32	Leny. I. T	BPKAD	Kasi Akuntansi		32.
33	Maria A. Yepese	Bappeda	Kasubbid.		33.
34	INTAN	HUMAS	Staf		34.
35	JOSELIN	HUMAS	STAF		35.
36	Deasy. L. Lesnusa	Bappeda	Kasubid		36.
37					37.
38					38.
39					39.
40					40.

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura,Senin,3 Maret 2025

Nomor : 500 / 0596/SET
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : ***Rapat Tindak lanjut Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindak lanjuti rapat inflasi bersama Mendagri dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia secara daring (zoom meeting) tanggal 04 Maret 2025 di ruang rapat Walikota, maka dianggap perlu untuk membahas upaya –upaya pemerintah daerah sebagai tindak lanjut Pengendalian Inflasi di Kota Jayapura yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa,4Maret 2025
Jam : 13.00 WIT s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

an.WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERD NICOLAS MERAUJE,S,Sos.M.Si
19690308 199403 1 010

Tembusan :
1. Walikota Jayapura

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Selasa, 04 Maret 2025

Pukul : 13.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura

III. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 04 Maret 2025 yang dipimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri.

IV. Peserta Rapat :

1) Walikota Jayapura
2) Asisten Bidang Pembangunan Dan Kesra
3) Inspektur Kota Jayapura
4) Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura
5) Kepala Bappeda Kota Jayapura
6) Kepala BPS Kota Jayapura
7) Kepala Dinas PUPR dan KP Kota Jayapura
8) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
9) Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
10) Kepala BBPOM di Jayapura
11) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura
12) Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua
13) Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura
14) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura



***Keterangan**: rapat dipimpin oleh Bapak Walikota Jayapura*

V. Arahan Asisten II Pembangunan

- Ucapan salam
- Diskusi
- Ibu Asisten II
  Salam
  Baik selamat siang buat kita semua ,yang kami Hormati Bpk Walikota dan beserta pimpinan OPD atau yang mewakili ,ijin melaporkan bapa Walikota ,kami tadi telah mengikuti ZoomInflasi yang dilakukan oleh Mendagri bersama – sama beberapa OPD .Ada beberapa hal yang perlu menhadi perhatian untuk Daerah Kab/Kota terkait Program Prioritas yang mana daerah harus melaporkan perkembangan pembangunan bahkan kegiatan di lapangan,dan upaya upaya pengendalian inflasi di daerah serta dukungan Pemerintah terkait 3 Juta rumah .
- Sekolah Garuda
  Informasi untuk sekolah Garuda nanti mama Walikota yang urus ,di harapkan untuk Pendidikan untuk Laporkan ke Kementrian, sekolah ini tanggung jawab Daerah dan biayanya dari mana.

- Dinas Perindagkop :
  Walikota Jayapura : Pemerintah Kota Jayapura kita harus mempersiapkan program – program Pemerintah Pusat yang menjadi pusat program nasional sudah sejauh manana OPD bereja dan menyampaikan progress perkembangannya .untuk MBG ,Dinas Ketahanan pangan dan pertaian harus mempiunyai kebutuhan data pangan dalam memenuhi kebutuhan MBG di Kota Jayapura ,sehingga kekurangan dapat di tambahkan dari kabupaten lain ./artinya bahwa kita membantu petani kita sehingga hasil panen mereka dapat di

pergunakan langsung ,tanpa harus menjual ke pasar misalnya cabe,bawang merah ,sayur mayur dll.

Asisten II : Dalam rakor inflasi yang di sampaikan oleh kemendagri terkait dengan Anggaran BTT yag di gunakan alam upaya–upaya dalam pengendalian inflasi daerah khususnya untuk Koerasi merah putih.

Walikota jayapura : Usahakan tanah tidak bermasalah daslam pembangunan Program prioritas Nasional ,bila ada kendala perlu dilaporkan kepada pimpinan.

Perindagkop : Dan Stok dari Distributor telah menyiapkan,beras dan kebutuhan lainnya menjelang ramadhan dan idul Fitri. selanjutnya terkait koperasi merah putih ,dan sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung mana yang sudah aplot persyaratan ,dari 25 kelurahan .yang akan di biayai dengan dana BTT (Bantuan tak terduga dalam pengurusan Akta Pendirian Koperasi).

Walikota Jayapura : Usakahan administrainya di buat,anggotanya nya berapa masukkan saja, yang penting badan hukum ada duluperlu koordinasi lagi apakah koperasi perlu bayar pajak atau tidak dan pembangunannya perlu ijin. Tolong di perhatikan untuk IMB sebelum ijin di kasih bisa survey lapangan untuk melihat kondisi bangunan apa sesuai dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Jayapura,kalau tidak berate bisa pembayaran denda,artinya bahwa pengawasan sangat penting di lakukan.

Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya aplikasi yang menolak, karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan. Pada saat rapat developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang tidak bisa di bangun.
IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara, Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik, dalam tahapKP1, dalam konsultasi publik semua stakeholder memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk daerah pertanian, jayapura utara, Heram. Dan akandi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang.

Bappeda : Ijin melaporkan bahwa untuk kegiatan atau upaya- upaya pemerintah salah satu yang dilakukan oleh Sekretariat TPID adalah melaksanakan gerakan pasar murah sebanyak 48 kali yang di laksanakan pada 5 Distrik dan 25 Kelurahan dan kampung Komoditas yang di subsidi bawang merah ,cabai ,Tomat,B.putih,Telur lokal,ayam Lokal,ikan cakalang,Ikan Ekor kuning.

Walikota : pasar murah harus di jadwalkan secara baik pada lokasi –lokasi yang kurang sekali ekonominya, sehingga mereka bisa merasakan dampak dari Pasar

murah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura ,bukan pedagang yang datang berbelanja dan jual kembali dengan harga yang mahal, pihak kelurahan harus memperhatikan warganya yang kurang mampu untuk Kota Jayapura,untuk Kota Jayapura apakah sudah bekerja semua atau tidak. Di harapkan untuk OPD- OPD memberikan laporan ke Wakil Walikota untuk Rakor Inflasi berikutnya

Pertanian : Kami dari Dinas Ketahanan pangan dan pertanian mengambil beberapa petani untuk di berikan subsidi pada komoditas pangan yang akan di jual pada pasar murah yang dilaksanakan pada TPID Kota Jayapura

ASisten II :ijin melaporkan juga terkait program Prioritas yang di laksanakan di Pemerintah Kota Jayapura ,untuk dapat melaporkan ke kementrian antara lain makan gratis,sekolah garuda ,Koperasi merah putih,kesehatan gratis,sekolah rakyat, untuk makan gratis dilaksanakan oleh yayasan ,dan perlu perhatian dari OPD teknis untuk turun lapangan untuk melihat perkembangan dari prioritas presiden .

KESIMPULAN :

1. OPD Teknis yang melaksanakan Program Prioritas Nasional agar mngerjakan dengan baik dan sesuai Juknis.
2. Pelaksanaan Pasar murah harus tetap di laksanakan tetapi memperhatikan daerah daerah yang ekonomi nya kurang agra mereka dapat membeli dengan harga yang murah .
3. Program makan gratis dari dinas dapat mendatakebutuhan pangan di kota jayapura untuk dapat memenuhi kebutukan makan gratis di Kota Jayapura ,dan memperhatikan kebersihannya.
4. Pengendalian Inflasi harus dapat di lakukan dengan mendapat data dari BPS untuk di selesaikan melalui program kegoitan di OPD teknis.
5. Perlu perhatian untuk Pebangunan Prioritas muntuk melapor di lapangan perkembangan pekerjaan .

Notulis,

KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF, SE
NIP. 19761213 20022 004

PIMPINAN RAPAT
WALIKOTA JAYAPURA
SELAKU KETUA TPID

ABISAI ROLLO,SH,MH

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl.. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

HARI/TANGGAL : Selasa, 04 Maret 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	ABISAI. ROLO	~~Pemkot Jayapura~~	~~Walikota~~		1.
2					
3					3.
4	Widhi Hartanto	Pem. kota jayapura	Asisten II		4.
5	Dodang Hidayat	Inspektorat	Pjban Pengawas	081211327301	5.
6	Yuliana. Maniagasi	DISHUB KOTA JPR.	KABID DARAT	085344984405	6.
7	M. Agus Salim	Diskan	Kabid PDSRP		7.
8	ENDAH LESTARI	DKPP	KABID TPH & BUN		8.
9	DIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		9.
10	GARY RANTETADUNG	BBPOM DI JAYAPURA	PFM AHLI MUDA	085229533230	10.
11	MUH. NORMAN MAGNUR	BBPOM di Jayapura	PFM Ahli Pertama	081141752488	11.
12	FARHAN LUHUNG P.	BANK INDONESIA PROV. PAPUA	ASISTEN MANAJER	085246768294	12.
13	Sugiyanto	BPS Kab Jpr	Kepala	081344291121	13.
14	MARIA YEPESE				14.
15	Dilma. Enggeman				15.
16	Dinas Kesehatan		Sekretaris		16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0967) 535216, 536150, 534771

JAYAPURA

Jayapura, 10 Juni 2025

Nomor : 005/1100/Set

Lampiran :

Perihal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Undangan Terlampir

di – Jayapura

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 dan Arahan Sekjend Kemendagri terkait Perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI Minggu ke II Juni 2025 secara daring. Maka kami mengundang Bapak/Ibu Pimpinan OPD terkait untuk mengikuti Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Jam : 09.00 WIT – Sampai Selesai

Tempat : Ruang Rapat Wakil Walikota Jayapura

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE, S.Sos., M. Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
1. Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Jayapura;
3. Arsip.

Catatan :
*Di mohon hadir tepat waktu dan membawa botol minum (Tumbler)

Lampiran Undangan Rapat

Nomor :

Daftar Undangan :

1. Wakil Walikota Jayapura
2. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra
3. Inspektur
4. Kepala BPKAD Kota Jayapura
5. Kepala BAPPEDA Kota Jayapura
6. Kepala BAPENDA Kota Jayapura
7. Kepala Dinas PUPR&KP Kota Jayapura
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
10. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kota Jayapura
11. Kepala DPMPTSP Kota Jayapura
12. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura
15. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
16. Kepala Bagian Hukum
17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE, S.Sos., M. Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Wakil Walikota

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 10 Juni 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor:T.000 1.5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

1) Wakil Walikota Jayapura
2) Asisten Bidang Pembangunan Dan Kesra
3) Inspektur
4) Kepala BPKAD Kota Jayapura
5) Kepala Bappeda Kota Jayapura
6) Kepala Bapenda Kota Jayapura
7) Kepala Dinas PUPR dan KP Kota Jayapura
8) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
9) Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
10) Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura
11) Kepala DPMPTSP Kota Jayapura
12) Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura
13) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura
14) Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura
15) Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura

16) Kepala Bagian Hukum

17) Kepala Bagian Pemerintahan



Keterangan: *rapat dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura*

III. Arahan Wakil Walikota Jayapura

- Ucapan salam
- Diskusi
- Sekolah Rakyat

  Lokasi Sudah di siapkan di Koya 10 H, yang mendaftar itu siapa,apakah sesuai dengan petunjuk teknis lapngan,harus ada dasta yang masuk untuk data SD, SMP, SMA masing – masing berapa banyak siswa di perlukan data dari Dinas Sosial, sehingga dapat terjawab untuk Bappenda terkait lokasi apa perlu pembayaran pajak atau tidak. Apakah sekolah rakyat ini di hibahkan ke Pusat atau Daerah yang kelolah sekolah nya, perlu ada informasi selanjutnya, bagaimana modelnya, apakah ada asrama yang harus ditinggal oleh Siswa, untuk berapa tahun, jangan sampai saat Operasional akan di bebankan ke Pemerintah Daerah.

  Badan Keuangan perlu siapkan syarat nya untuk tahun pertama saja, pada tahun ke2 sudah lepas tanggung jawab.Perlu di perhatikan Juknis/SOP nya, bila dari pusat minta untuk jangka panjang berarti Pemerintah Kota Jayapura akan lepas tangan, kalau jangka pendek berarti berapa tahun. Guru-guru yang kita pakai apakah guru-guru yang lama atau guru-guru baru, kalau mereka rekrut paling tidak OAPnya berapa.

- Sekolah Garuda

  Informasi untuk sekolah Garuda nanti mama Walikota yang urus ,di harapkan untuk Pendidikan untuk Laporkan ke Kementrian, sekolah ini tanggung jawab Daerah dan biayanya dari mana.

- Dinas Perindagkop

Mengenai Koperasi merah putih, dengan Pemberdayaan Kampung untuk 25 Kelurahan dan 14 Kampung, baru 1 yang masuk di kementrian Hukum 13 Kampug yang belum.

Wakil Walikota : Di harapkan minggu ini semua persyaratan untuk Notaris Koperasi sudah masuk, sebab tanggal 12 Juli 2025 Secara Nasional di Louncing, upayakan pakai gedung yang ada dulu sementara misalnya pos yandu, dipakai untuk cet merah putih, upayakan bangunan Koperasi harus klir.

Nanti Dinas Perindagkop melaporkan berapa yang sudah ada bangunan, berapa Koperasi yang sudah ada pengurus, berapa yang sudah mengurus akta pendirian koperasi,di harapkan dalam minggu ini sudah ada laporan di Kementrian karena akan di abdet secara Nasional.

Kota Jayapura baru 1 Laporan, sedangkan Kabupaten Jayapura sudah 100 %. Koperasi ini bisnis perlu pengelolaan atau transaksi ,kalau tidak di kelola dengan baik oleh orang yang profesional, harus pendapatanya besar dari pada pengeluaran.

Contoh : Ketika kita beli beras 14 Juta dan kita jual, paling tidak laku 16 juta untung 2 Juta jadi rugi laba jelas ada pendapatan .

Kalau kita kasih Koperasi untuk orang kampung yang kelola tidak akan berjalan karna kita masih punya budaya utang karna keluarga, makanya kita tidak bisa maju dalam berdagang, koperasi tetap ada pengurus tetapi ada orang yang kelola khusus koperasi, Perindagkop yang mengatur manajemennya, kalau mau buat unggulan kampung jangan orang di kampung yang kelola, program Walikota dan Wakil Walikota untuk tahun ini akan mengelola Potensi Pertanian dan Perikanan di Kota Jayapura, artinya bahwa masyarakat sebagai pemilik, modal dari Pemerintah, yang gaji petugas dari Pemerintah, nanti panennya masyarakat, dan pemerintah tinggal potong bersihnya ke masyarakat, diupayakan 1 bulan 2 kali, sehingga masyarakat pelaku usaha ada uang terus, begitu juga kalau koperasi sudah berjalan ambil beras, minyak goreng dilakukan di koperasi saja oleh anggota koperasi.

Pemberdayaan Kampung,Bagian Hukum,Dinas Perindagkop untuk bertanggung jawab pada pendirian Koperasi merah putih, cek drafnya koperasi secara baik apa sudah sesuai atau belum, semua warga di kampung harus jadi anggota Koperasi ,supaya semua berbelanja di Koperasi, tetapi tidak menggugurkan koperasi yang ada. Dan harganya harus turun dari harga toko. Koperasi miliknya rakyat dan Pemerintah perlu subsidi .

Untuk simpanan pokok koperasi supaya bisa koordinasi dengan kampung/BPMk apakah bisa secara aturan untuk membantu anggota Koperasi dalam bentuk simpanan pokok koperasi, misalnya 70 kk X 200.000.

Asisten II : Dalam rakor inflasi yang di sampaikan oleh Mentri Keuangan terkait dengan

Wakil Walikota : Kita harus membaca aturan apakah modal yang di kasi itu di Pinjamkan modal dari koperasi merah putih, di minta bahwa pencairan dana kampung di tahap ke II ini bisa di ajukan untuk modal awal Koperasi. Ke koperasi atau tidak, yang di maksudkan apakah kita bisa dapat dana gratis. Bisa dicarikan nomen klatur pemberdayaan koperasi, pemberdayaannya berapa untuk bantuan modal awal koperasi misalnya 24 juta tetapi yang punya adalah masyarakat, bentuk usahanya apa, administrasi di buat baik bantuan modal tidak lagi membebanni masyarakat, simpanan wajib, setelah barang laku bisa di ambil untuk pembiayaan simpanan wajib anggota.

sehingga dari usaha koperasi warga bisa ada perhitungan rugi laba dan setiap tahun warga mendapat SHU nya. Kalau Koperasi berjalan dengan baik, koperasi dapat meminjam uang pada bank.

Kabid Koperasi : Terkait dengan koperasi untuk kampung nafri sudah di buat akta koperasinya,dan sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung mana yang sudah aplot persyaratan ,dari 25 kelurahan tinggal 2 kelurahan yang belum kelurahan awiyo dan kelurahan trikora,yang lainnya sudah meneruskan berkasnya ke perindagkop.

Wakil Walikota : Usakahan administrainya di buat,anggotanya nya berapa masukkan saja,yang penting badan hukum ada duluperlu koordinasi lagi apakah koperasi perlu bayar pajak atau tidak dan pembangunannya perlu ijin IMB

BPMPTSP : untuk pembangunan Pemerintah tetap IMB nya di buat.

Wakil Walikota : Tolong di perhatikan untuk IMB sebelum ijin di kasih bisa survey lapangan untuk melihat kondisi bangunan apa sesuai dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Jayapura,kalau tidak berate bisa pembayaran denda,artinya bahwa pengawasan sangat penting di lakukan.

- BPG apakah untuk lokasi pembangunan di hibahkan ke pusat atau seperti apa aturannya.
- 3000 juta rumah adalah prioritas Presiden ,dan apakah kita Pemerintah Kota jayapura sudah ada perwal atau belum dan 3000 rumah sudah ada yang mengurus atau blm.
- Dana Koperasi bisa di ambil di BTT dan dana kampung ,Bappeda perlu hitiung transaksi jual belinya bagaimana.
- Sekolah rakyat sudah ada lokasinya 10 H, tetapi perlu di pelajari juknisnya, sistemnya bagaimana,apakah pinjam pakai, atau di hibahkan kepada pemerintha pusat, kalau hibah bagaimana modelnya,

di cek lokasinya masuk RTRW Kota Jayapura atau tidak, dan sekarang terkendala sama BWS (Direktorat Irigasi dan Rawa, blm memberikan rekomendasi untuk ahli fungsi dinas yang mengurus (Bappeda,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,PUPR)

- Lokasi Sekolah rakyat sudah ada
- lokasi Sekolah SMA Unggulan garuda sudah ada di Koya yang akan di kelola oleh (Ketua PKK).

Pendidkan : Kalau Sekolah unggulan SMA Garuda sama dengan sekolah rakyat yang berlokasi di Koya.

Wakil Walikota : Bagaimana dengan PU apakah perlu di buat perijinan untuk sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda, dan koordinasi dengan Bappeda untuk 3000 rumah.

PUPR : BPG kami menyiapkan semua permohonan yang masuk,selama mereka belum peruntukan ruang harus di lihat pemilikan. Hampir semua lahan di Muaratami adalah lahan pertanian dan perikanan.

Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya aplikasi yang menolak, karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan. Pada saat rapat developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang tidak bisa di bangun.

IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara, Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik, dalam tahapKP1, dalam konsultasi public semua stelkoder memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk daerah pertanian, jayapura utara, Heram. Dan akandi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang.

Bagian HUkum : Penyesuaian dari RTRW fungsi lahan yang sudah berubah harus tercantum RDTR dan belum ada RTRW yang menjelaskan tentang pengalihan fungsi lahan maka ijin tidak akan bisa keluar.

Bappeda : Sesuai dengan RDTR wilayah distrik Abepura dan Jayapura selatan, sedangkan untuk RTRW yang masih revisi,dan masalah sekarang ada I BWS. Bappeda sudah menyurat ke BWS yang kedua kalinya dan belum mendapat Rekomendasi bahkan komunikasi juga terputus.mungkin ada kebijakan pa Wakil untuk mengundang BWS lagi.

Wakil Walikota : Ada program Presiden tentang kesehatan gratis,kita di minta laporan untuk Kota Jayapura,untuk Kota Jayapura apakah sudah bekerja semua atau tidak.Di harapkan untuk OPD- OPD memberikan laporan ke Wakil Walikota untuk Rakor Inflasi berikutnya

Kesehatan : 14 Puskesmas sudah jalan kesehatan gratis dan 1 klinik ,artinya kalau kesehatan gratis tidak jalan dana BMK tidak di turunkan karna merupakan satu syarat dan kesehatan gratis sudah rutin dilaksanakan.

Dan untuk gizi akan berkoordinasi kebagian gizi di 14 Puskesmas dan akan berkolaborasi dengan MBG

Wakil Walikota : Dinas Kesehatan,Pendidikan tinjau lokasi siapa yang punya.

Pendidikan :Lokasinya sudah siap tiga titik,Jayapura Utara,Jayapura selatan,Muaratami.

ASisten II : Program makan gratis dilaksanakan oleh yayasan ,milik Papua Kasih yang berlokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp dan badan gizi Nasional sudah memverikasinya,Namun untuk Distrik Heram dan Distrik Abepura mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan dapur sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan.

KESIMPULAN :

1. Program Prioritas Presiden untuk 3 juta rumah sudah dilaksanakan ,dan perwal sudah di buat untuk memenuhi ketentuan membangun berdasarkan RTRW
2. Program Pemeriksaan Gratis sudah dilaksanakan di 14 Puskesmas dan 1 Pustu di Kota Jayapura
3. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR) lokasi sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura
4. Program Sekolah Raykat Lokasi sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura
5. Program Koperasi merah putih dari 14 kampung, ada 4 kampung yang sudah membuat akta pendirian koperasi antara lain kampung Nafri dan Holtekam dan 25 Kelurahan masih ada 2 kelurahan yang belum masukkan dalam Aplikasi (Kelurahan Awiyo dan Kelurahan Trikora).
6. Makan bergizi gratis yang berjalan milik dari yayasan Papua Kasih, yang sudah memferifikasi lokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp, sedangkan yang ada di Distrik Heram dan Distrik abe mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan dapur sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan.

Notulis,
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF, SE
NIP. 19761213 20022 004

Pimpinan Rapat,

WAKIL WALIKOTA JAYAPURA

Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota JL. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

HARI/TANGGAL :KAMIS,12 JUNI 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.
2	Widhi Hartanto	Pem. Kota Jayapura	Asisten II		2.
3	Djoni Nova	Bappeda	Kepala	082288480413	3.
4	Elias Y. Toabin	DPMPTSP	Kabid Perizinan Jasa Usaha	081215555543	4.
5	Kristin W	Dinas Perikanan	Sekretaris		5.
6	Arham Paskah	Dinas Perindagkop	Plt. Kabid. Koperasi		6.
7	Salomina Jungleraauw	Disnakertrans	Sekretaris		7.
8	Ali Lukulima	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA		8.
9	Arius Y Mobri	Dinas Pendidikan	Kasie. Kurikulum SMP		9.
10	Stanie Korwa	Dinas Sosial	Kasie Lingsos		10.
11	THOMAS	DINAS SOSIAL	Kasie Rencana		11.
12	GHIST BEARZAT	BAPPEDA	STAF		12.
13	MONIKA IWANGGIN	BAG. HKUM	KASUBBAG PPH		13.
14	A. Sarwom	BPKAD	Sekretaris		14.
15	Devi Fitri	Bag Pem	Staf		15.
16	drg. Juliana. Napitupulu	Dinkes	Plt. Kadis		16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.
23					23.
24					24.
25					25.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKREATRIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 07 Juli 2025

Nomor : 500.2.3/1266/SET
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Undangan Rapat**

K e p a d a

Yth.
Di –
J a y a p u r a

Berdasarkan Radio Gram dari Menteri dalam Negeri Sekretaris Jenderal Nomor: 500.2.3/3669/JJ terkait upaya Pengendalian Inflasi di Daerah dirangkaikan dengan Program Prioritas Presiden:

1. Program MBG;
2. Program Pembangunan 3 Juta Rumah;
3. Program Pembentukan Koperasi Merah Putih;
4. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
5. Program Sekolah Rakyat;
6. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR);

maka kami mohon kesediaan Bapak- Ibu Pimpinan Selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk hadir mengikuti Rapat yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 11 Juli 2025
Jam	: 09:00 WIT - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Walikota

Demikian penyampaian kami atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. :

a.n WALIKOTA JAYAPURA
Plh. SEKRETARIS DAERAH

FREDERIK AWARAWI,SH, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670629 199610 1 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 11 Julii 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. 5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

a. Wakil Walikota Jayapura
b. Asisten II Pembangunan dan Kesra
c. Satrol Lantamal X
d. Inspektorat
e. Kepala Bappeda Kota Jayapura
f. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
g. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura
h. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura
i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura
j. Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura
k. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura

l. Kepala Bagian Hukum

m. Kepala Bagian Pemerintahan

III. Arahan Bapak Wakil Walikota

- Ucapan salam
- Diskusi
- Bapak Walikota
  Selamat siang, syallom
  Asalawalaikum semua
  Baik sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang kami hormati yang mewakili dari BPS Kota Jayapura yang selalu setia dengan kami di kota Jayapura, kami hormati Tim TPID, dari Dinas Pertahanan dan UKM hadir
  Badan Keuangan perlu siapkan syarat nya untuk tahun pertama saja, pada tahun ke2 sudah lepas tanggung jawab.Perlu di perhatikan Juknis/SOP nya, bila dari pusat minta untuk jangka panjang berarti Pemerintah Kota Jayapura akan lepas tangan, kalau jangka pendek berarti berapa tahun. Guru-guru yang kita pakai apakah guru-guru yang lama atau guru-guru baru, kalau mereka rekrut paling tidak OAPnya berapa.

a. Sekolah Garuda
   Informasi untuk sekolah Garuda nanti mama Walikota yang urus ,di harapkan untuk Pendidikan untuk Laporkan ke Kementrian, sekolah ini tanggung jawab Daerah dan biayanya dari mana.
b. Dinas Perindagkop
   Mengenai Koperasi merah putih, dengan Pemberdayaan Kampung untuk 25 Kelurahan dan 14 Kampung, baru 1 yang masuk di kementrian Hukum 13 Kampug yang belum.

Wakil Walikota : Di harapkan minggu ini semua persyaratan untuk Notaris Koperasi sudah masuk, sebab tanggal 12 Juli 2025 Secara Nasional di Louncing, upayakan pakai gedung yang ada dulu sementara misalnya pos yandu, dipakai untuk cet merah putih, upayakan bangunan Koperasi harus klir. Nanti Dinas Perindagkop melaporkan berapa yang sudah ada bangunan, berapa Koperasi yang sudah ada pengurus, berapa yang sudah mengurus akta pendirian koperasi,di harapkan dalam minggu ini sudah ada laporan di Kementrian karena akan di abdet secara Nasional. Kota Jayapura baru 1 Laporan, sedangkan Kabupaten Jayapura sudah 100 %. Koperasi ini bisnis perlu pengelolaan atau transaksi ,kalau tidak di kelola dengan baik oleh orang yang profesional, harus pendapatanya besar dari pada pengeluaran. Contoh : Ketika kita

beli beras 14 Juta dan kita jual, paling tidak laku 16 juta untung 2 Juta jadi rugi laba jelas ada pendapatan . Kalau kita kasih Koperasi untuk orang kampung yang kelola tidak akan berjalan karna kita masih punya budaya utang karna keluarga, makanya kita tidak bisa maju dalam berdagang, koperasi tetap ada pengurus tetapi ada orang yang kelola khusus koperasi, Perindagkop yang mengatur manajemennya, kalau mau buat unggulan kampung jangan orang di kampung yang kelola, program Walikota dan Wakil Walikota untuk tahun ini akan mengelola Potensi Pertanian dan Perikanan di Kota Jayapura, artinya bahwa masyarakat sebagai pemilik, modal dari Pemerintah, yang gaji petugas dari Pemerintah, nanti panennya masyarakat, dan pemerintah tinggal potong bersihnya ke masyarakat, diupayakan 1 bulan 2 kali, sehingga masyarakat pelaku usaha ada uang terus, begitu juga kalau koperasi sudah berjalan ambil beras, minyak goreng dilakukan di koperasi saja oleh anggota koperasi. Pemberdayaan Kampung,Bagian Hukum,Dinas Perindagkop untuk bertanggung jawab pada pendirian Koperasi merah putih, cek drafnya koperasi secara baik apa sudah sesuai atau belum, semua warga di kampung harus jadi anggota Koperasi ,supaya semua berbelanja di Koperasi, tetapi tidak menggugurkan koperasi yang ada. Dan harganya harus turun dari harga toko. Koperasi miliknya rakyat dan Pemerintah perlu subsidi. Untuk simpanan pokok koperasi supaya bisa koordinasi dengan kampung/BPMk apakah bisa secara aturan untuk membantu anggota Koperasi dalam bentuk simpanan pokok koperasi, misalnya 70 kk X 200.000

Asisten II : Dalam rakor inflasi yang di sampaikan oleh Mentri Keuangan terkait dengan

Wakil Walikota : Kita harus membaca aturan apakah modal yang di kasi itu di Pinjamkan modal dari koperasi merah putih, di minta bahwa pencairan dana kampung di tahap ke II ini bisa di ajukan untuk modal awal Koperasi. Ke koperasi atau tidak, yang di maksudkan apakah kita bisa dapat dana gratis. Bisa dicarikan nomen klatur pemberdayaan koperasi, pemberdayaannya berapa untuk bantuan modal awal koperasi misalnya 24 juta tetapi yang punya adalah masyarakat, bentuk usahanya apa, administrasi di buat baik bantuan modal tidak lagi membebanni masyarakat, simpanan wajib, setelah barang laku bisa di ambil untuk pembiayaan simpanan wajib anggota. sehingga dari usaha koperasi warga bisa ada perhitungan rugi laba dan setiap tahun warga mendapat SHU nya. Kalau Koperasi berjalan dengan baik, koperasi dapat meminjam uang pada bank.

Kabid Koperasi : Terkait dengan koperasi untuk kampung nafri sudah di buat akta koperasinya,dan sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung mana yang sudah aplot persyaratan ,dari 25 kelurahan tinggal 2 kelurahan yang belum kelurahan awiyo dan kelurahan trikora,yang lainnya sudah meneruskan berkasnya ke perindagkop.

Wakil Walikota : Usakahan administrainya di buat,anggotanya nya berapa masukkan saja,yang penting badan hukum ada duluperlu koordinasi lagi apakah koperasi perlu bayar pajak atau tidak dan pembangunannya perlu ijin IMB

BPMPTSP : untuk pembangunan Pemerintah tetap IMB nya di buat.

- Wakil Walikota : Tolong di perhatikan untuk IMB sebelum ijin di kasih bisa survey lapangan untuk melihat kondisi bangunan apa sesuai dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Jayapura,kalau tidak berate bisa pembayaran denda,artinya bahwa pengawasan sangat penting di lakukan.
- BPG apakah untuk lokasi pembangunan di hibahkan ke pusat atau seperti apa aturannya.
- 3000 juta rumah adalah prioritas Presiden ,dan apakah kita Pemerintah Kota jayapura sudah ada perwal atau belum dan 3000 rumah sudah ada yang mengurus atau blm.
- Dana Koperasi bisa di ambil di BTT dan dana kampung ,Bappeda perlu hitiung transaksi jual belinya bagaimana.
- Sekolah rakyat sudah ada lokasinya 10 H, tetapi perlu di pelajari juknisnya, sistemnya bagaimana,apakah pinjam pakai, atau di hibahkan kepada pemerintha pusat, kalau hibah bagaimana modelnya,
- di cek lokasinya masuk RTRW Kota Jayapura atau tidak, dan sekarang terkendala sama BWS (Direktorat Irigasi dan Rawa, blm memberikan rekomendasi untuk ahli fungsi dinas yang mengurus (Bappeda,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,PUPR)
- Lokasi Sekolah rakyat sudah ada
- lokasi Sekolah SMA Unggulan garuda sudah ada di Koya yang akan di kelola oleh (Ketua PKK).

Pendidkan : Kalau Sekolah unggulan SMA Garuda sama dengan sekolah rakyat yang berlokasi di Koya.

Wakil Walikota : Bagaimana dengan PU apakah perlu di buat perijinan untuk sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda, dan koordinasi dengan Bappeda untuk 3000 rumah.

PUPR : BPG kami menyiapkan semua permohonan yang masuk,selama mereka belum peruntukan ruang harus di lihat pemilikan. Hampir semua lahan di Muaratami adalah lahan pertanian dan perikanan.Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya aplikasi yang menolak, karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan. Pada saat rapat developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang tidak bisa di bangun. IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara, Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik, dalam tahapKP1, dalam konsultasi public semua stelkoder memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk daerah pertanian, jayapura utara, Heram. Dan akandi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang.

Bagian Hukum : Penyesuaian dari RTRW fungsi lahan yang sudah berubah harus tercantum RDTR dan belum ada RTRW yang menjelaskan tentang pengalihan fungsi lahan maka ijin tidak akan bisa keluar.

Bappeda : Sesuai dengan RDTR wilayah distrik Abepura dan Jayapura selatan, sedangkan untuk RTRW yang masih revisi,dan masalah sekarang ada I BWS. Bappeda sudah menyurat ke BWS yang kedua kalinya dan belum mendapat Rekomendasi bahkan komunikasi juga terputus.mungkin ada kebijakan pa Wakil untuk mengundang BWS lagi.

Wakil Walikota : Ada program Presiden tentang kesehatan gratis,kita di minta laporan untuk Kota Jayapura,untuk Kota Jayapura apakah sudah bekerja semua atau tidak.Di harapkan untuk OPD- OPD memberikan laporan ke Wakil Walikota untuk Rakor Inflasi berikutnya.

Kesehatan : 14 Puskesmas sudah jalan kesehatan gratis dan 1 klinik ,artinya kalau kesehatan gratis tidak jalan dana BMK tidak di turunkan karna merupakan satu syarat dan kesehatan gratis sudah rutin dilaksanakan.Dan untuk gizi akan berkoordinasi kebagian gizi di 14 Puskesmas dan akan berkolaborasi dengan MBG.

Wakil Walikota : Dinas Kesehatan,Pendidikan tinjau lokasi siapa yang punya.

Pendidikan :Lokasinya sudah siap tiga titik,Jayapura Utara,Jayapura selatan, Muaratami.

Asisten II : Program makan gratis dilaksanakan oleh yayasan ,milik Papua Kasih yang berlokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp dan badan gizi Nasional sudah memverikasinya,Namun untuk Distrik Heram dan Distrik Abepura mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan dapur sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan.

KESIMPULAN :

1. Program Prioritas Presiden untuk 3 juta rumah sudah dilaksanakan ,dan perwal sudah di buat untuk memenuhi ketentuan membangun berdasarkan RTRW.
2. Program Pemeriksaan Gratis sudah dilaksanakan di 14 Puskesmas dan 1 Pustu di Kota Jayapura.
3. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR) lokasi sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
4. Program Sekolah Raykat Lokasi sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota Jayapura
5. Program Koperasi merah putih dari 14 kampung, ada 4 kampung yang sudah membuat akta pendirian koperasi antara lain kampung Nafri dan Holtekam dan 25 Kelurahan masih ada 2 kelurahan yang belum masukkan dalam Aplikasi (Kelurahan Awiyo dan Kelurahan Trikora).
6. Makan bergizi gratis yang berjalan milik dari yayasan Papua Kasih, yang sudah memferifikasi lokasi di Muaratami samping jembatan Holtekamp, sedangkan yang ada di Distrik Heram dan Distrik abe mereka terhenti karena ada evaluasi untuk kelayakan dapur sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan.

Notulis,
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF, SE
NIP. 19761213 20022 004

Pimpinan Rapat,

WAKIL WALIKOTA JAYAPURA

Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM

DOKUMENTASI RAPAT TPID 11 JULI 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK WAKIL WALIKOTA



***Keterangan:** rapat dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura*

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Telpol. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Jumat, 11 Juli 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. H. Ruskan, M.Si.	Pemerintah Kota Jayapura	Wakil Walikota		1.
2					2.
3	ERWIN SIDARTA	SATPOL LANTAMAL X	PASOPS LANTAMA		3.
4	Mathius. Hai	Dinas Perikanan	Kadis		4.
5	OKTOVINA S. KAMEU	BAPPEDA	KABID EKONOMI		5.
6	NUR KHOIS.	INDAGSI	Staf 2		6.
7	PELIKS	INDAGSI	STAF		7.
8	DIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UMKM	KABID PERDAGANGAN		8.
9	Endah Lestari	DKPP	Kabid TPH & Ban		9.
10	INDAG. 3	INDAGSI PAPUA			10.
11	Fadly	INDAGSI PAPUA	Pokja		11.
12	Yusri	BULOG	Corporate Sec		12.
13	Dan. As Ari Wijaya.	Bulog.	Manager Ops		13.
14	Dessy B. Mangelo	Inspektorat	Irban Apparatur Pemerintahan		14.
15	AHMAD TAUFIQ	BPS	STATISTISI		15.
16	M. Ponsen	DINAS SOSIAL.	I CAPING		16.
17	Justin Sitanggang	DKPP	Kadis		17.
18	APPIANI	Perindag	Plt. Kabi Koperasi		18.
19	Dakson Tinyakeu	Dinas P2K	Kasie Sarpras SMA		19.
20	BASTIAN PUTRA PALLA TUKAN, S.STP				20.
21	Salomina fingkreuw, S.Sos	DKPP	Plt. Kadis		21.
22	Magi L. Atoney	DPMK	Kadis		22.
23	Salomina fingkreuw, S.Sos	DKPP	Plt Kadis		23.
24	Yeppi. Hamadori	Dinas pendidikan	Sekdis		24.
25	Richard Lakawung	BPS	STATISTISI		25.
26	Muhammad Lutfi, ST, MIP.	Kadin 1901/DPR	Kadin 1901/DPR		26.
27	Herman. M	Dinkes	Staf		27.
28	Juliana. Napitupulu	Dinkes	Plt. Kadis.		28.
29	Harry AL Fatra	BBPOM Jayapura	staf		29.
30	Yohanis S. Bantang	Bappeda Jayapura	Staf		30.
31	Deasy Lesnussa Kaap	Bappeda	Kasubid		31.
32	VISRA. V. Huwae	Bappeda	staf		32.
33	RICHO Y. SAMBOKO	BAPPEDA	STAF		33.
34	Irene Sinaga	Bappeda	Staf		34.

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, Agustus 2025

Nomor : 500.2.3/1268/SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
JAYAPURA

Menindaklanjuti Hasil zoom Inflasi bersama Mendagrii Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /4701 /SJ terkait Pengendalian inflasi Tahun 2025 dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah ,maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura melaksanakan Rapat yang di pimpin oleh Walikota Jayapura .

maka kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2025
Jam : 13.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan rapat : Sekretaris Daerah Kota Jayapura

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
1. **Walikota Jayapura (Sebagai laporan)**

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Hari/Tanggal : Selasa 19 Agustus 2025

Pukul : 14.00 Wit – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Undangan rapat inflasi daerah no. 500.2.3/1268 SET

II. Peserta Rapat :

a. BPS Kota Jayapura
b. Bappeda Kota Jayapura
c. BPS Kota Jayapura
d. Dinas PUPR Kota Jayapura
e. Dinas Perindagkop Kota Jayapura
f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura

Ucapan dan Salam

SEKRETARIS DAERAH : Kita Perlu mendapat informasi dari kita semua yang hadir terkait data pengendalian dan upaya yang dilakukan dan yng belum di lakukan serta OPD pelaksana Program Prioritas Nasional yang pertama kita dengar dari BPS Kota Jayapura terkait data Komoditas Inflasi

BPS Kota JPR : Inflasi Nasional bulan Agustus 2025 ,Inflasi Tahunan 2,31%, Inflasi Bulanan -0.08% , Inflasi Tahun Kalender 1,60%, sedangkan Inflasi untuk Kota Jayapura IPM Kota Jayapura 81,98 ,Gini Ratio Kota Jayapura0,293,Inflasi Tahunan 0,54 %,Inflasi Bulanan,-9.93 % ,Inflasi Tahun Kalender -0.72%. Penyumbang Inflasi tertinggi bulan Agustus 2025, Beras, Angkutan Laut,Bawang Merah,Sirih,Cabai Rawit.

Kepala Bappeda : Ijin Pimpinan melaporkan dari Bappeda sebagai sekretariat TPID Kota Jayapura ,bahwa upaya yang telah dilakukan adalah Pelaksanaan Rapat –rapat Kooordinasi yang di harapkan di pimpin oleh Pimpinan Daerah selaku pengambil kebijakan dan juga ketua TPID ,MOU dengan Pemda penghasil komoditi Holtikultura (Kab.Keerom).dan penilaian Kinerja TPID Aword ,pelaksanaan Pasar murah yang akan dilaksanakan pada 5 Distrik dan 25 Kalurahan dan kampung yang ada di dalam Kota ,kampung Waena dan Kampung Yoka, di jadwalkan sebanyak 48 kali yang komoditasnya sekitar 13 Komoditas yang di berikan subsidi 30 % - 40 % antara lain Ikan Ekor kuning,ikan cakalang,ikan tongkol,Ikan Kembung,Udang, Daging Sapi, Ayam lokal, Telur ayam lokal, cabai, tomat, Bawang merah, Bawang putih da nada juga berupa paket yang di jual dengan harga Rp 75.000/ Kantong dengan isi Beras Premium 5 kg, Gula 1 kg,dan minyak goreng (1 liter) .untuk menjelang hari Raya keagamaan di pelaksanaan sebanyak 6 kali kegiatan pasar murah untuk Bulan Februari dan Maret 2025 ,upaya yang kedua yang dilaksankan adalah melaksanakan Sidak pada Pasar moderen dan pasar tradisional ,Gerakan menanam Cabe dan Bawang merah sebagai komoditas penyumbang Inflasi,dan memperbaiki infrastruktur saluran irigasi pertanian.

Pertanian : Harga bahan makanan seperti cabe,telur dan cabe rawit,bawang merah,bawang putih masih tergantung pada daerah diluar Papua,contohnya bawang putih dan merah dari makasar,karna stok dari petani di Kota Jayapura terbatas ,dan untuk bawang putih tdk cocok di tanam di muaratami pada mati.sehingga kalau ketrlambatan Stok mengakibatkan harga Stok komoditas tinggi,dan kendala yang kedua adalah musim hujan yang menyebabkan stok berkurang.

Perindagkop: Ijin melaporkan pimpinan bahwa kami dari Dinas telah melakukan pengmbilan data harga setiap hari rabu dan melakukan pengawasan bagi pedagang di pasar tradisional,dan sebagai hasil pantauan kami bahwa operasi merah putih ,dan dan sementara masih koordinasi ke BPMK kampung – kampung mana yang sudah aplot persyaratan ,dari 25 kelurahan .yang akan di biayai dengan dana BTT (Bantuan tak terduga dalam pengurusan Akta Pendirian Koperasi).

Dinas PUPR : IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara,Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik,dalam tahapKP1 ,dalam konsultasi public semua stelkoder memberikan masukan sebanyak –banyaknya untuk daerah pertanian ,jayapura utara,Heram.dan aka ndi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang.

KESIMPULAN :

1) Perlu kita perhatikan untuk upaya –upaya yang belum kita lakukan BTT untuk Koperasi segera di realisasikan untuk pengurusan Koperasi merah putih dan Perindagkop terus berkoordinasi dengan kementrian Koperasi,Juknisnya seperti apa yang akan di lakukan di daerah ,sehingga Koperasi ini dapat berjalan dan membantu masyarakat .dari Zoom tapi kita lihat Upaya yang dilakukan kota Jayapura upaya 1 samapai 3 sedangakan kota jayapura sudah melaukan 6 upaya agar berkoordinasi ke pusat ,kemendagri atau Kemenko.
2) Di pastikan untuk OPD pertanian dalam melaksanakan gerakan menanam boleh bersamaan dengan program Walikota turun Kampung.

NOTULIS

KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF,SE
NIP.19761213 2002122004

Pimpinan Rapat

Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

DOKUMENTASI RAPAT TPID 19 AGUSTUS 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK SEKDA KOTA JAYAPURA





PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 19 Agustus 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	Elvis. N Simanjuntak	Pemkot JPR	Sekda		1.
2					2.
3	Felson Mambrasar	Dinas Sosial	Sekretaris	085197131907	3.
4	MICKA W. MAIVO	DPUPR PKP	Kabid PKP	082238775307	4.
5	Nikanor Andri	Dishub	Kasubbid Lant	082198822083	5.
6	JAMES. WATOPA	DISHUB	KEPALA. SEKSI	082132740727	6.
7	DIAN ARONGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		7.
8	ENDAH LESTARI	DKPP	KABID TPH & BUN		8.
	Sugiyanto	BPS	Kepala	081544291121	9.
10	ADHI PRANOTO	PUPR&PKP	KABIE. TR.		10.
11	BASTIAN PUTRA PALLA TUKAN, S.STP	KOMINFO	STAF BID. INFORMATIKA		11.
12	ANGGRAINI. C	Dinas Pariwisata	Kasi Destinasi	081-344777747	12.
13	YOSEPHINA KAFIAR	Dinas Pariwisata	Staf		13.
14	CHARLES Y.H. APAAR	KEL. NUMBAY	LURAH	0821 9781 4036	14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 21 Agustus 2025

Nomor : 500.2.3/1266/SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /4701 /SJ terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah .

maka kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 14.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
1. **Walikota Jayapura (Sebagai laporan)**

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Pukul : 10.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Asisten II Pembangunan dan Kesra

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 25 Agustus 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. 5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

1. **Asisten II Pembangunan dan Kesra**
2. **BPS Kota Jayapura**
3. **Kabid Perdangangan Perindangkop Kota Jayapura**
4. **Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura**
5. **Kabid PUPR**
6. **Kabid Perhubungan**

I. HASIL RAPAT

- **ARAHAN**
- **ASISTEN II**

Kita telah mengikuti Rakor Inflasi dari pagi dan ini setiap minggu yang sudah menjadi agenda dari mendagri dan dari hasil Rilis BPS untuk Inflasi kita masih bagus dan masih di bawah Nasional dan dalam rakor Inflasi yang kita bahas bukan hanya Inflasi tetapi program-program prioritas Nasional dan teman-teman dari sekretariat TPID mungkin kita nanti ada rapat untuk Pengendalian Inflasi dan program prioritas Presiden, supaya kita tau perkembangan Kota Jayapura sampai dimana yang sudah dilakukan, antara lain Koperasi merah putih, sekolah rakyat, Program 3 juta rumah, sekolah unggulan garuda, semua sudah berjalan tetapi kita perlu tau progresnya, terutama teman-teman TPID atau OPD terkait dengan prioritas Presiden sehingga kita bisa tau,

apabila ada rapat Via Zoom bersama Mendagri kita bisa tau kondisi Kota Jayapura.

Contoh program MBG: Makan Bergizi Gratis dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Perindagkop.

BPS : Terima kasih untuk waktu yang diberikan, yang terhomat Ibu asisten II, BPS Kota Jayapura Inflasi Kota Jayapura masih tergolong baik dan angkanya di bawah angka golong baik dan angkanya di bawah angka Nasional. Untuk Kota Jayapura bulan Juli angka Inflasi untuk Yooy=1,4 dan angkah inflasi bulananya (MOM)= 0,34%. Angka dibulan Agustus dalam minggu terakhir ini , dalam tahap data harga, dan data harga yang telah dikumpulkan pada bulan Agustus akan di lalukan secara Nasional dan untuk sementara ada beberapa harga yang mengalami kenaikkan harga cabe merah dan bawang merah.

AS II : Inflasi Kota Jayapura masih di ratakan secara Nasional di tanggal 1 September baru akan dilakukan Rilis Inflasi Kota Jayapura, mudah-mudahan hanya tidak berpengaruh signifikasi dengan kondisi di Kota Jayapura.

PUPR : untuk perumahan, untuk rehabilitasi ada penambahan 25 unit rumah untuk rehab, dari awal 153 untuk rehap, 36 rumah layak huni baru. Dan mohon bantuan ibu AS untuk surat permintaan data bangunan yang dibangun atau rehab yang akan di tanda tangani Sekda.

- Contohnya Rumah-rumah di koaya banyak yang di bangun baru tidak ada info ke PUPR Kota Jayapura.
- Surat juga permintaan data ke Bank-bank yang biasa bekerja sama dengan developer untuk membangun rumah dengan jaminan kredit. (BTN, BRI) untuk pembanguan Tahun 2025.
- Surat permintaan data di tunjukan kepada OPD-OPD yang membangun rumah, contoh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kampung, Gereja dan semua akan masuk dalam perhitungan pembangunan di Kota.
- Rumah pribadi yang di bangun masyarakat juga akan masuk hitungan.
- Gereja-gereja membangun Pastori juga terhitung dalam pembangunan Kota Jayapura.

2. Harus ada pertemuan dengan Dinas Sosial supaya jelas, karna yang mengurus data adalah Kementerian Sosial, siapa yang sebenarnya menyusun ini, supaya sebagai acuan kita menyusun MBR,sekarang tidak jelas bantuan-bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, karna kalau data rehab yang sementara dikerjakan, kalau di masukkan dalam aplikasi Nasional, hampir semua tidak masuk dalam data MBR, jadi untuk mengurangi kemiskinan tidak akan tuntas-tuntas karna tidak tepat sasaran.

- Perlu kejelasan data dari Dinas SOsial supaya Kota Jayapura juga bisa mendapat PAD dari MBR (biar bisa lihat mana yang masuk kategori yang dapat di bantu.
- Kategori MBR di OPD lain dan MBR tidak terdata dalam data Nasional.
- Supaya juga bisa dilihat bantuan untuk orang tidak mampu pada saat ada pemakaman (30x3,5) 700 juta untuk 3 bulan tidak cukup. Semua gratis, kalau ada kategori data MBR kita bisa lihat mana yang layak dapat bantuan dan mana yang tidak.

AS II : 1. Bahwa PUPR akan siapkan surat permintaan data

2. Mengenai data MBR untuk membedakan yang layak mendapat bantuan atau tidak.

Perikanan : Terkait pasar murah, ada sisa uang yang subsidi yang dilaporkan ke sekretariat, karna pasar murah berlanjut sampai bulan 12, kami dari AS II minta arahanya sebagai TPID, apakah kita sudah stopkan atau kita sudah tidak ikut. Sampai bulan Agustus kegiatan Pasar murah sudah di SPJkan sebenarnya ada uang yang disubsidi.

AS II : Mungkin dari sekretariat TPID untuk menjawab seperti apa?

Ibu. Dessy : - Pencanangan gerakan menanam

Terkait dengan pasar murah yang disampaikan oleh dinas perikanan, saya akan koordinasi dengan ibu Kabid. Kegiatan pasar murah sudah 28 kali, kalau dilihat dari materi kementerian Kota Jayapura masuk dalam upaya 3&4 ternyata ada (9) langkah yang harus dilakukan BTT digunakan untuk koperasi merah putih.

Perindagkop : Terkait dengan pasar murah yang sudah di sampaikan oleh teman-teman di perikanan yang per-Agustus tanyakan adalah hasil penjualan, pengalaman dari peridangkop , hasil pasar murah disetorkan, jadi semua hasil pendapatan disetorkan (dan dikategorikan untuk pendapatan lain-lain) di setorkan ke bendahara penerima dan dilanjutkan ke Bappeda.

AS II : Sekretariat TPID dan OPD lainnya untuk bertemu Bapak Walikota sebelum rapat. Baik terima kasih untuk kerjasama kita dari pagi sampai siang hari ini.

Kesimpulan:

1. Dari PUPR untuk menyiapkan surat permintaan data pembangunan di Kota Jayapura baik bangunan baru, rehap pada Bank-nbank, OPD Pendidikan, OPD Kesehatan yang bekerja sama dengan developer.
2. Menyiapkan rapat antara PUPR dan Dinas Sosial terkait Data.
3. Terkait keterlibatan Dinas Perikanan dalam pasar murah, untuk kejelasannya dalam pelaksanaan pasar maurah sampai Desember.
4. Untuk pangan yang belum dilakukan dan BTT dan Juga transportasi, APBD sementara yang kita lanjutan di tahun 2023 yaitu HOrtikultura Cabai Rawit, Cabe Merah dan Bawang merah.
5. Tanaman pangan jangung.
6. Peternakan telur ayam dan daging ayam ras dan kami akan rapat lagi untuk ketengkapan data jumlah produksi dan hanya dari masing-masing Kota Jayapura dan Kab Keerom.

DOKUMENTASI RAPAT TPID 25 AGUSTUS 2025, DIPIMPIN OLEH BAPAK SEKDA KOTA JAYAPURA





PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Senin, 25 Agustus 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	Evert N. Merauje	Pemkot Jpra	Plt. Sekda		1.
2	Widih Hartanto	Bkm. Kota Jayapura	Asisten II		2.
3					3.
4	MIKA W MANO	DISPER PKP	KABID PKP	082238773307	4.
5	Lia Pusiolarasari	BPS Kota Jayapura	Statistisi Ahli Madya	081240894498	5.
6	M. Agussalim	Dinas Perikanan	Kabid PSJ		6.
7	Endah Lestari	DKPP	KABID TPH & BUN		7.
8	DIAN ARONGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		8.
9	MICANOR ANDIT	DISHUB Kota Jpr	Kabid Lalut	082198128285	9.
10	Drary. Karap	Bappeda	Kasubid		10.
11	Delma. Senggunar	Bappeda	Staf		11.
12					12.
13					13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.
23					23.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 30 Agustus 2025

Nomor : 005 / 0534/SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /4810 /SJ dengan agenda Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi dukungan pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah Tahun 2025,Untuk Pembahasan tindak lanjut di Kota Jayapura maka, kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 2 September 2025
Jam : 14.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat : Wakil Walikota

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
PLT. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
1. **Walikota Jayapura (Sebagai laporan)**

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Selasa, 02 Sep 2025
Pukul : 10.00 WIT – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

I. **Dasar Hukum :**

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 02 September 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. 5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. **Peserta Rapat :**

1) **Asisten II Pembangunan dan Kesra**
2) **Satrol Lantamal X**
3) **Kepala BPS Kota Jayapura**
4) **Kapolres Kota Jayapura**
5) **Kasubbid Indagsi Polda Papua**
6) **Kepala Bulog Provinsi Papua**
7) **Inspektorat**
8) **Kepala Bappeda Kota Jayapura**
9) **Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura**
10) **Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura**
11) **Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura**
12) **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura**
13) **Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura**
14) **Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura**
15) **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura**

2. **WAKIL WALIKOTA**

Melakukan sidak, sidak yang pertama sudah di buat , jadi harus melakukan sidak ke-2 apa Sebelum atau sesudah 17 Agustus, lihat perkembang di bawah Perindagkop dan teman-teman di bawah , Perhubungan untuk melihat Harga Tiket bagaimana, Transportasi angkutan umum bagaimana ada yang berubah tidak tarik, kalau ada perubahan bikin regulasi perbaiki tarifnya, jangan lagi ada tambah-tambah sendiri, begitu juga dengan biaya pendidikan yang ada naik-naik di sekolah-sekolah itu lebih tinggi lebih murah, kalau sekolah negeri dari biaya , daftar ulang di kasih biaya tinggi di kasih dari sekolah.

Nanti kita lihat di pasar harga yang berubah misalkan berubah Cabe berarti kita harus kerjasama dengan keerom cepat, atau Bulog segera interpensi, kita juga langsung adakan pasar murah biar tetap normal jangan sampe Inflasi kita naik, sekitar 1,07 itu baik skali.berati bisa juara 1 .kalau bisa setiap 4x pertriwulan untuk mengecek harga, beras.

3. **KEPALA BAPPEDA**

Pasar murah, sudah di jalankan, Bappeda yang koordinir berkejasama dengan Perigdagkop, Pertanian, perikanan, Bulog, Apirindo biar termasuk dalam Tim TPID, Jadwal Pasar Murah 48 kali, yang sudah dilaksanakan sampe bulan Juni 18 kali, tinggal 30 kali pelaksanaan pasar murah. Semua Toko yang ada di kota nanti semua bikin stand untuk bisa bergabung dalam pasar murah, dan jual dengan harga diskon. Setiap Bulan Melakukan Kegiatan Pasar Murah Minimal 4 kali dan menggunakan Dana Otsus sehingga menunggu pencairan, tetapi di bulan Oktober, November dan Desember dilebihkan karena pada saat itu masuk bulan hari raya. Bisa buat beli satu gratis satu itu contoh untuk menaikan Inflasi. Koordinasi yang belum, lengkap.

4. **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Gerakan menanam cabe, nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli menanam Cabe dan bawang merah di Kampung Holtekam, bersamaan dengan lauching Koperasi Merah Putih, jadi diatur waktu lagi, harus bikin spanduk TPID Kota Jayapura dan Undang satrol. Polres, Kodim dan Tugas kita selain menanam dan di Input datanya. Biar kita tanam seribu kali tapi di Jakarta tidak tau itu sama saja omong kosong, harus di Input data Sebagai laporan ke pusat (Jakarta) ini juga menjadi salah satu kriteria menyelenggara pemerintah daerah walikota dan wakil walikota, kalau tidak melaksanakan prioritas nasional termasuk menjaga stunting, mejaga Inflasi dan pertumbuhan Ekonomi ini juga bisa katakan cacat.

5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pemerintah kampung ada program atau tidak, ada Gerakan menanam juga, sudah dimulai dari Kampung Skow Sae, skow yambe, skow mabo dan juga sudah bekerjasama dengan perikanan juga, ada kegiatan yang sudah jalan mulai dari kampung Waena diberikan 1000 ekor ikan dan akandi panen, ada sepanduk yang dibuat dari Kampung. Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian atur jadwal dengan DMPK lagi.

6. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MBG (makan bergisi Gratis) sudah dilauching Bulan April, nanti dimulai bulan September karena menunggu data siswa, semua sekolah dari Paud, SD, SMP, dan SMK/ SMA, ada bantuan dari badan gisi buat 3 dapur di Kota Jayapura, yang pertama di eks Pasar Lama Ampera, kedua Abepura dan ketiga di Muara tami. Data lama jumlah siswa 26.540 di kota Jayapura.

Ibu Asisten II :

1. Tentang Makanan bergisi gratis, akan ditangani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) jadi satuan pelayanan pemenuhan gizitadi sudah didata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 16 SPPG atau Dapur sehat yang sudah siap melayani, namun masih banyak juga sppg yang belum bergerak karena masih menunggu verifikasi dari BGN sehingga masih jadi catatan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengakomodir SPPG ini sehingga dalam pelayana Makanan Bergizi Gratis tidak menjadi tumpan tindih.
2. Terkait bahan baku yang disiapkan Makana Bergizi gratis ini tentunya diharapkan kalau boleh produksi Lokal yang berasl dari kota Jayapura. Dan perlu mendapatkan pengawasan dari OPD teknis sehingga SPPG ini dalam mendatangkan bahan bakunya berasal dari jayapura yang memenuhi standar Gizi, SPPG ini juga merekrut tenaga-tenaga dari ahli Gizi .

III. HASIL RAPAT

- **ARAHAN**
- **WAKIL WALIKOTA**

Ibu Asisten II yang saya hormati, Pak Kasdim dan dari Santrol yang mewakili, dari Poleresta, kemudia dari Bulog, dari Bps dan Pimimpinana OPD yang saya Hormati, Balai POM, Pertamina, Kepala Bidang, Inspektur dan seluruh yang hadir .

Pertama Mohon maaf Bapak Walikota Tidak bisa memipin Rapat karena sednag menerima Tamu dari DPR Kab Yalimo.

Mengenai pertemuan hari ini bagaimana kita bisa mengendalikan Inflasi daerah kita.

Inflasi ini sangat penting makanya di koroyok dari semua yang berkaitan, dari BPS, Dari Pertamina baik dari perbankkan, dari pemerintah Daerahjuga dari kepolisan, dari TNI, dan Bulog dan OPD terkait, Karena ini tugas pemerintah Daerah

Kalau Inflasi tak terkendali maka dampaknya akan ke perekonomian kita, Inflasi ini tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah. Jangan di bawah 0 atau juga di atas 6.

Inflasi kita di bulan Juni 1,07 ini normal, walaupun ada satu poin atau dua poin yang naik tinggi, kenapa bulanan kita rendah skali 0,29 dari bulan Juni, dari hari ke hari 0,55 ini mungkin harian data dari BPS. Kalau bulanan 0.99 di bula Juni selamat 1 semester 2025

Tugas kita untuk mengendalikan adalah :

1. Agar tetap Normal Pemerintah Kota tetap MOU dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Jangan satu saja, produksi dari kabupaten juga harus di buat juga dari Kabupaten Sarmi, kabupaten Keerom Suplai kita dengan Cabe atau Bawang , dari Kabupaten Sarmi suplai kita Udang atau Ikan dari sana, jangan sampe kurang. Yang jelas kita punya kebutuhan dasar Perikanan dan Pertanian termasuk Transportasi yang terkait dengan kebutuhan Mansuia kita ini, sadang, pangan dan papan ini harus terpenuhi dengan harga-harga yang normal. Kalau kita sudah MOU berarti standarisasi harga di dalam Kota terjaga.

Bapak Wakil Walikota:

Siapa yang menegani ini, SPPD untuk SPPG ini, bahan bakunya apa yang mereka diminta, telur, Ikan, tempe, bawang, sayur-sayur, coba disiapkan barangnya dari petani kita yang ada di Kota Jayapura, coba didata di kampung, ada produksinya biar bisa di suplai ke SPPG biar ada dampak positif ke Masyarakat, perikanan ada nanti di koordinasi denga SPPG untuk bisa mensuplai Ikan, Opd terkait bisa siapkan data dan sumber pangannya Beras koya bisa pake berapa, Ikan Asar kita bisa juga di pakai buat MBG, Masyarakat biasa menjual ikan asar di Pasar dok 9, Pasar Hamadi, Pasar Youtefa dan Pasar Koya bisa dimasukkan dalam MBG untuk tempat pembelian Bahan Baku. Ada dampak baru dengan adanya MBG ini ada penambahan tenaga kerja baru yang bisa diakomodir oleh petugas yang mengelolah MBG ini , kalau tidak ada berarti kita anggap saja Nol.

Kesimpulan:

1. Kita Harus sama2 jaga jangan Sampai Inflasi di kota Jayapura Turun maupun Naik, harus tetap stabil.
2. Melanjutkan Kegiatan Pasar Murah dengan berbeberapa masukkan yang diusulakan.
3. Biaya pada sekolah-sekolah harus di lihat juga
4. Biaya Transpotasi Angkutan Umum jangan sampe di naikan tidak sesuai.
5. MBG yang akan dilaksanakan Bulan September harus semua Sekolah di kota Jayapura.
6. Menggunakan Bahan baku untuk Makanan Bergizi Gratis harus memakai bahan yang berasl dari Kota Jayapura.
7. SPPG yang sudah berjalan adalah SPPG dari sekolah yayasan.
8. Dengan adanya MBG (makan bergizi gratis) ada dampak yang positif dengan adanya penambahn tenaga kerja baru.

Notulis,
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF, SE
NIP. 19761213 20022 004

Pimpinan Rapat,

WAKIL WALIKOTA JAYAPURA

Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM

DOKUMENTASI RAPAT TPID 2 SEPTEMBER 2025 DIPIMPIN BAPAK WAKIL WALIKOTA



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 2 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	RUSTAN SARU	Pemkot Jpr	Wakil Walikota		1.
2	Sugiyanto	Bps Kota Jayapura	Kepala	0813 4412 9821	2.
3	Widhi Hartanto.	Pem. Kota Jayapura	Asisten Pemb. Ekbang.		3.
4	Richard Nakamnya	Disbar	Plt. Kadisbar	085244799308	4.
5	MIKA W. MANO	DPUPR PKP	Kabid PKP	082238775302	5.
6	Salomina Y. Fingkreuw	DKPP	Plt. Kadis DKPP		6.
7	M. Agussalim	Dinas Perkanan	Kabid PPSPP		7.
8	DAUD - HOWAY	DKPP	Fasi - Produksi		8.
9	Maria Yepese	Bappeda	Kasubbid. Ekraf		9.
10	DIAN ARONGEAR	DISPERINDAGKOP K UKM	KABID PERDAGANGAN		10.
11	Samuel. Tail, S.M.	Dinas P & K	Staf Sekretariat	081344659901	11.
12	GERSON. J. ARONGEAR, ST. Ppl	Bidang pendidikan	Pengendali dampak	08134537723	12.
13	Felson Manggasson	DINSOS Kota Jpr	Sekretaris		13.
14	BASTIAN PUTRA PALLA TUKAN, S.STP	KOMINFO	STAF		14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 03 September 2025

Nomor : 000.1.5/1685/SET
Lampiran : 2 (Dua)
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /4701 /SJ terkait pembahasan Upaya Pengendalian Inflasi di daerah ,terkait ,ketersediaan stok pangan dan penyaluran beras SPHP ,yang di rangkaikan degan evaluasi Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan di Pemerintahan Kota Jayapura antara lain :

1. Program MBG ;
2. Program Pembangunan 3 Juta rumah
3. Program Pembentukan Koperasi Merah Putih
4. Program Pemeriksaan Kesehatan Gartis
5. Program Sekolah rakyat
6. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR).

Maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu Pimpinan untuk hadir mengikuti Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	:	Senin, 08 September 2025
Jam	:	13.00 Wit – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat	:	Wakil Walikota Jayapura

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
PLT. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
1. *Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);*
2. *Arsip.*

Lampiran : 2 (Dua)
Nomor : 000.1.5/1685/SET
Tanggal : 03 September 2025

DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. WALIKOTA JAYAPURA;
2. WAKIL WALIKOTA JAYAPURA
3. KETUA DPRD KOTA JAYPURA;
4. KAPOLRESTA JAYAPURA KOTA;
5. KOMANDAN KODIM 1701;
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
7. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
8. DANSATROL LANTAMAL X;
9. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA;
10. ASISTEN II PEMBANGUNAN DAN KESRA
11. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
12. KEPALA DINAS PERINDUSTRIA DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA JAYAPURA;
13. KEPALA BPKAD KOTA JAYAPURA;
14. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
15. KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA;
16. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA;
17. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA;
18. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA;
19. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAYAPURA;
20. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA;
22. KASATPOL PP KOTA JAYAPURA;
23. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA;
24. KEPALA PT. PLN CABANG KOTA JAYAPURA;
25. KEPALA PDAM KOTA JAYAPURA;
26. KEPALA PT. PELINDO CABANG JAYAPURA;
27. KEPALA BULOG DRIVE KOTA JAYAPURA;
28. KEPALA BALAI BESAR POM PROVINSI PAPUA;
29. KEPALA BPS KOTA JAYAPURA;
30. KEPALA PT. PERTAMINA KOTA JAYAPURA;

31. KEPALA UPT PPI/TPI HAMADI JAYAPURA;
32. KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
33. KASUBBID INDAGSI DITRES KRIMSUS POLDA PAPUA;
34. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
35. KEPALA BIDANG PERTERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
36. KEPALA BIDANG PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
37. KASUBBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPUR
38. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA
39. KEPALA DINAS TENAGA KERJA;
40. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KAMPUNG.
41. KETUA APRINDO KOTA JAYAPURA
42.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
PEJ. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Selasa, 08 September 2025

Pukul : 13.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 08 September 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. 5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

1. **Asisten II Pembangunan dan Kesra**
2. **Ketua Pengadilan Negeri Jayapura**
3. **Satrol Kodaeral X**
4. **Kepala BPS Kota Jayapura**
5. **Polersta Kota Jayapura**
6. **Kasubbid Indagsi Polda Papua**
7. **Kepala Bulog Provinsi Papua**
8. **PTAM Jayapura**
9. **PT. Pelindo TPK Jayapura**
10. **Balai Besar POM Jayapura**
11. **Inspektorat**
12. **Bank Indonesia**
13. **PT. Pertamina**
14. **Kepala BPKAD Kota Jayapura**
15. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura**
16. **Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura**

17. **Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura**
18. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura;**
19. **Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura;**
20. **Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;**
21. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.**



***Keterangan:** rapat dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota Jayapura*

I. **HASIL RAPAT**

- **ARAHAN**
- **ASISTEN II**

Yang Terhomat Bapak wakil walikota Kota Jayapura, yang terhomat ketua Pengadilan Negeri Klas I Jayapura dan yang kami Hormati Bapak dan Ibu pimpinan yang hadir dalam rapat kita siang ini, ada di sini dari BUMN,mewakili Prokompinda dari TNI Polri, PT Air Minum, PT.Bulog dan

Bapak ibu Pimipinan OPD atau yang mewakili yang hadir. Pertama-tama mari kita menaikkan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa oleh karna kasih dan karunianya kita semua boleh ada saat ini bersama-sama mengikuti rapat sehubungan dengan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura tahun 2025 dan di lanjutkan dengan rapat evaluasi Program Prioritas Presiden Prabowo. Bapak ibu yang kita hormati sebelum rapat dimulai dan rapat akan dipimimpin oleh Bapak wakil Walikota Kota Jayapura, kita akan mulai dengan doa. Doa oleh **Bapak Kepala BAPENDA**. Izin Bapak Wakil Walikota, perlu kami melaporkan, kalau kita secara rutin mengikuti rakor pengendalian Inflasi secara nasional yang dipimipin langsung oleh Bapak Mendagri dan Pemerintah Kota Jayapura kami rutin secara zoom dan tadi kita baru selesai tepat pukul 13:15 wit selesai dipimpin oleh Bapak Mendagri dan arahan-arahan dari Bapak Mendagri terkait Pengendalian Inflasi dan juga Program Prioritas Presiden terlebih terkait dengan kondisi kekinian secara Nasional pusat sampai daerah dan juga Gerakan Pangan Murah yang harus dilakukan oleh pemda dari pusat sampai daerah untuk mengendalikan harga-harga beras dan bahan pokok yang ada di daerah.

1. WAKIL WALIKOTA

Baik terima kasih Ibu Asisten II.

Selamat siang Syallom, Salam sejahtera kepada kita sekalian, Om Swastyastu namo buddhaya, salam kebajikan dan assalamuaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Prokopimdah Kota Jayapura, ada ketua pengendalian Kelas I Jayapura, ada yang menwakili Dandim, ada yang mewakili Kapoleresta, dan satrol koderal 10, yang saya hormati Kepala Bapenda Kota Jayapura, Ibu Assiten II yang saya hormati, pimimpinan Wilayah Bulog Papua dan Bank Indonesia, dari PDAM pak menejer dan staf yang hadir, dari PT. Pertamina yang saya hormati dan dari penyedia bahan Pokok dari Saga (Aperindo) Pak Aris yang saya hormati dan beberapa yang tidak saya sebutkan, dari Pelindo dan dari BPS kota Jayapura dan semua tanpa terkecuali yang hadir siang ini, pertama-tama segala puji bagi Tuhan atas segala rahmat dan hikmatnya kita bisa bertemu di ruangan rapat walikota Kota Jayapura

terkait dengan beberapa program yang kita bahas untuk hari ini sesuai dengan undangan yang di sampaikan. Atas nama Pemerintah Kota saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat hari ini, melanjutkan rapat kita hari ini tadi asisten II sudah menyampaikan beberapa hal, sebenarnya ada 2 Agenda yang akan di bahas dalam rapat hari ini:

1. Program tentang Inflasi Daerah Kota Jayapura
2. Program Prioritas Presiden ada enam poin

Kenapa ini kita lakukan karna salah satu Visi Misi Walikota dan wakil walikota dalah menonjolkan prioritas Presiden , Enam Ini kasta cipta dan memajukan daerah dengan prioritas Presiden yang akan kita laksanakan dan menyikapi situasi kondisi daerah pasca peristiwa demonstrasi berdampak Nasional diseluruh wilayah di tanah air itu yang ketiga yang perlu kami sampaikan.

Kaitan dengan Inflasi Daerah saya dapat data dari BPS Kota Jayapura, Data yang saya terima Inflasi tahunan kita, dari tahun ke tahun adalah hari ini 0,54% kemudian inflasi bulan berjalan 0,72%, kolasi-kolasi bulan berjalan 0,93%. Yang kita syukuri saat ini karna kondisi normal tidak ada harga pangan yang menonjol naik, tapi nanti yang lebih jelas dari BPS yang akan sampaikan, tugas kita adalah jadi Bapa dan Ibu yang hadir kita mau dengar ada saran dan masukkan, apapun modelnya kita harus interfensi pasar termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ada di Pemerintah Kota yang perlu kita kerjasama eksekusi di lapangan, kenapa itu penting karena ada barang tapi belum terbagi semua atau terjual semua jadi ada perlunya gerakan pangan murah (GPM) ini terus dilaksanakan karena kondisi saat ini masyarakat kita tergangu dengan ekonomi, pendidikannya, ekonominya dan juga kerjanya. Pemerintahan perlu memberikan sentuhan kasih yang bisa memberikan masyrakat kita ini sesuatu yang berdampak positif agar mereka tidak merasa di anak tirikan atau tidak di perhatikan oleh pemerintah daerah.karena itu Bapak dan ibu yang pakai program kerjasama dengan yang kedua kaitan dengan program presiden ini sudah mulai bergerak, ini kaitan dengan makan bergizi gratis yang berkaitan dengan pokok batang prioritas presiden. Berkaitan dengan program prioritas

presiden nanti BPS yang akan menjelaskan.

1. Ada program makanan bergizi gratis (MBG) ini di kota Jayapura jumlah siswa 62 ribu jiwa lebih, nanti kita tunggu laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah berapa siswa yang terupdate hari ini yang sudah mendapat MBG, apakah semua sudah dapat apa belum, laporan saya terima masih banyak yang belum mendapat MBG, kita mau tau berapa yang sudah dapat dan berapa yang belum dapat dan mau lihat sekolah mana saja yang sudah dapat MBG dan sekolah mana yang belum dapat MBG, ini juga terkait dengan jumlah dapur yang ada di Kota Jayapura. SPPGnya kita karna kota 3 lokasi oleh MBG-nya. Kita siapkan satu lokasi di SMKN 4 , satu dibelakang Bank Mandiri di Ampera dan satu di SMKN 7 Muara Tami, SK-nya lagi dalam proses, Mendagri monitor kita, pekerjaan ditanah air dimonitoring oleh pusat untuk menuntaskan program presiden, kita bicara dapur tapi Sk-nya belum di selesaikan, jumlah dapur dikota belum diketahui ada berapa banyak , saya terima laporan UNICEF bukan dari kesehatan, bukan juga dari Dinas P&K 21 dapur di Kota. Hari ini rapat kita penting, kalau MBG jalan sudah berapa sekolah yang jalan hari ini, sekolah mana saja. APOKSI (Asosiasi Kepala Daerah Bupati Walikota Se-Indonesia) yang kaita peduli sanitasi nanti November 2025 kita tuan rumah di Kota Jayapura dan nanti di hadiri dari seluruh Indonesia , kita dari data Nasional Pemerintah Kota diberikan alakosi anggaran dari UNICEF untuk menangi MBG ini Kita diberikan lokus 75 sekolah dan untuk sampel pelaksanaanya nanti akan di lihat oleh Bupati setanah air ada 15 sekolah, SD 12 dan 3 SMP, yang mau diperbaiki karna kita dapat laporan itu, sekolah-sekolah yang mau menerima MBG di drop dr beberapa SPPG seperti misalnya dari dapur restoran 58 yang dikotaraja, SD Negeri VIM Kotaraja, begitu MBG sampe langsung dibagi dan langsung di makan, ini keliru nanti harus diberikan pencerahan APOKSI , ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu aturannya yang MBG ini mulai diproses dari dapur atau SPPG tempat masak itu sudah tim ahli di situ yang mau sortir bahan-bahan yang akan di

proses di dapur termasuk yang mendrop bahan –bahan itu dari mana dicek secara Higienis kesehatan layak atau tidak dan sampai di situ di proses berapa lama kemudian dikemas dengan menu yang disediakan , kemudian dibawah ke sekolah , hitung berapa lama waktu dalam perjalanan untuk tiba di sekolah, berapa lama apa bisa di makan kita belum tau sampai sekarang ini , main sikat saja begitu di bungkus langsung dimakan, tapi ada tekniknya ada tim limidnya itu, makanya kadang-kadang

2. ada basi atau rusak, nie yang tidak di paham, dipikir MBG jadi makan saja , itu bukan tujuannya harus sehat kalau tidak sehat nanti sakit, harus ke dokter atau rumah sakit. Sakit uang keluar lagi, maka secara regulasi aturannya yang saya dapat di rapat pertemuan itu Kota jadi contoh di Indonesia hanya 5 kota yang dapat bantuan, termasuk Kota Jayapura, di Papua Kota Jayapura yang dapat ini, nanti mereka akan membantu kita. Sebelum dimakan sampai ada ruang khusus diamankan baru di distribusi ke anak-anak, kita harus siapkan tempat untuk mencuci tangan dan satu tempat cuci tangan itu 50 orang, sekolah kita skarang wastafel ini tidak jelas , ada sabun di situ tapi tidak digunkan kita makanan datang langsung di bagi dan makan anaka-anak tidak mencuci tangan dulu. Sekolah kita tinggal dibagi satu wastafel 50 orang tinggal dihitung saja berapa di situ dan

   Dinas Kesehatan periksa makanannya bahan bakunya bagus tidak dan ingatkan kepada anak-anak sebelum makan baca Doa. Inikan mendidik, ada kebersamaan, ada berkat ada kasih Tuhan di situ. Saya harap nani dilaporkan ke kita MBG, karena target nasional Oktober harus selesai di Kota Jayapura. Tak kalah penting di sini adalah sumber bahan baku yang dibutuhkan itu, diharapkan dikota ini bisa menyerap sumber bahan baku lokal dari Papua. pertanyaan sekarang? Ada atau tidak, siapa petugas yang cek untuk sumber bahan baku yang diperlukan, pertanyaan bahan baku dari mana itu, MBG ini untuk kesejahteraan masyarakat meningkatkan kualitas, dampak apa pada pemerintah Kota Jayapura, dampak apa kepada

masyarakat di Kota Jayapura, Seperti mama Papua yang jualan di pinggir jalan bisa dibeli jualannya. Bukan itu saja ketika resiko kerja Petugas mengolah makan pastikan juga sampah tertumpuk, sampahnya bagaimana siapa yang ambil, ada bayar tidakretribusi perda sampah ini, kalau ada berapa retribusinya, DLHK ada tidak , harus diundang DLHK sampahnya bagaimana, ini perlu di sampaikan kaitan dalam rana kita, apakah ada bayar retribusi sampah dibayarkan atau tidak.

3. Tentang 3 juta rumah dengan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di kuota PUPR sudah berapa Rumah yang sudah dibangun di Kota dan yang tersisa berapa , sudah berapa tercapai tahun ini berapa rumah yang sudah di bangun, harus disi dua kemudahan yaitu kemudahan biaya DPHTB pembahasan DPHTB ini yang menyebakan PD di Kota Menurun hamper 7 Milyar. Sebab program walikota 1000 rumah layak huni, masukkan dalam program 3 juta rumah. Yang sudah dilaksanakan berapa dan yang belum dilaksanakan.
4. Pembentukan koperasi Merah Putih yang masih dilema, secara nasional ini program Presiden dan Koperasi Merah putih ini dipustakan di Maura tami. Dan di Kota Jayapura sudah dilaporkan semua Kopereasi merah putih seluruh kelurahan dan kampung sudah di bentuk, pertanyaan sekarang apa koperasinya sudah berjalan atau tidak, padahal dibetuk untuk mempermuda masyarakat kita akses dalam berbelanja dalam pelayanan-pelayanan gerai atau outline di situ, kalau tidak jalan kita cari solusi bagaimana bisa jalan,kenapa karena ini adalah bisnis jelas operasinya jelas anggotanya dan jelas pengurusnya, Sk akte sudah selesai, SK kemenkuham bagian hukum sudah selesai, tapi sudah cek dilapangan ada pernah lihat apa Koperasi sudah berjalan atau belum,.
5. **Perindangkop**: kalau Koperasi Merah Putih di Holtekam sudah beroperasi sejak minggu lalu, isinya cuma sedikit saja, untuk stock kesehatan sudah habis. Kalau masih kosong nanti dicek kembali , ini

koperasi kita bicara besar saja tapi faktanya belum beroperasi, kalau koperasinya belum beroperasi itu tugas Pemerintah harus dibantu. Bulog juga bisa bantu kasih beras nanti dibayar belakang yang penting kita buat PKS dengan Bulog. Supaya Koperasinya bisa beroperasi dengan baik, Saga juga bisa membantu Program Kesehatan Gratis ini sudah berjalan di puskesmas, masalahnya hanya kurang sosialisasi pada masyarakat, karna masyarakat banyak tidak tau tentang program kesehatan gratis di puskesmas tapi itu adalah program presiden, jadi di puskesmas haru tulis di loket ini Program presiden pemeriksaan gratis, dan harus ada ruang khusu, da nada Dokternya, perawatnya, apoteknya dan petugas yang jaga di situ untuk pemeriksaan gratis.

6. Sekolah Rakyat sudah ada 3 kelas

Dinas Sosial: Sekolah rakyatnya ada 2 kelas, 1 kelas muridnya 50 orang jadi jumlah muridnya 100 orang. Sekarang menumpang di Diklat Sosial Provinsi Tanah Hitam. Disana bagus, makannya, tidurnya bagus skali, bersih sekali, ada yang menyapu dan ada yang strika. Data yang baru untuk sekolah rakyat adalah SMA dan belum ada itu SMP dan SD. Dan lokasi sudah disiapkan di Distrik Muara Tami, Kemarin baru diukur tanah, Sk harus diinpu dan dilaporkan karena kita ini di monitor oleh Mendagri terus, kalau sudah masuk programnya belum dilaksanakan input dulu datanya supaya bisa ketahuan, persoalannya di Kota ini kita belum ada datanya, berapa jumlah yang tidak mampu, bisa masuk sekolah rakyat dari SD,SMP, SMA dan SMK ini data yang belum ada kita pegang, kita input saja karena mereka masih pakaian data laporan dari Dinas sosial tapi sekarang mereka sudah berhasil dan mereka yang mampu-mampu, contohnya waktu pembagian beras SPHP dari Bulog.

Waktu pembagian bantuan pangan ini mengakibatkan keributan lurah-lurah dikoroyok. Karena pembagiannya tidak sama rata, karena yang tidak mampu tidak dapat bantuan beras pangan tapi yang mampu yang dapat bantuan beras pangan. Ini data dari BPS yang dikirim ke pusat.

7. Sekolah Garuda Taruna (sma Unggulan) ini sudah berjalan di Muara tami.

Sekdis Dinas P&P: Itu adalah Yayasan Gema Valentine bukan SMA Unggulan. Untuk SMA Unggulan belum ada, Yayasan Gema Valentine ini adalah sekolah swasta.

Harus dilaksanakan dan diprioritaskan ini karena program ini dari pusat dan angggarannya juga dari pusat.

Sekdis Dinas P&P: SMA Unggulan ini direncanakan di akan di buat di SMA 8 nanti kita siapkan.

Pertama harus dibikin SK untuk Lokasi, semua sekarang ini bikin SK Walikota dengan isinya akan dibangun SMA Unggulan, data surat itu yang diinput di sistem aplikasi yang diminta Mendagri di minta, terkait dengan Makanan Bergizi Gratis, Pembangunan 3 Juta Rumah,Pembentukan Koperasi Merah Putih yang di minta oleh Jakarta kalau kita tidak input kedalam aplikasi, kita punya giat ini tidak berjalan dengan baik.

Maka itu kita akan mulai dengan yang pertama

1. Inflasi daerah Kota Jayapura, kita akan dengar dari BPS dulu kita catat untuk menekan Inflasi Daerahjaga agar Kota Jayapura tetap stabil, masalah harga pangan, bahan pokok di Kota Jayapura dan permasalahan yang kita sikapi terkaitan dengan masalah harga pangan nasional dan terakhir menyikapi kondisi Negara kita. Mendagri minta kita harus ada doa bersama dengan tokoh lintas agama nanti kita akan lihat moment dan sekalian kita forum rapat ini bisa menentukan lokasi untuk doa bersama, dimohon kepada semua Institusi Pemerintahan dan BUMD termasuk yang sosial yang berkaitan ke masyarakat kita tidak boleh tervokasi dengan isu yang ada di Tanah Air. Jangan kita memposting hal-hal memancing situasi dan kondisi.

Diskusi :

1. **Kepala BPS Kota Jayapura,** : Hormati Bapak Wakil Walikota sebagai pemimpin Rapat, ibu Asisten II dan kepala Prokopimda dan Kepala OPD dan BUMD yang sudah hadir, terkait penurunan

harga, setiap minggu BPS melakukan penurunan harga terhadap 351 jenis komuditas yang diutamakan saja. Dilakukan setiap minggu dan kita rilis setiap awal bulan di tanggal 1, untuk Provinsi Papua itu Inflasi dihitung hanya Kota Jayapura sedang kabupaten lainnya tidak memiliki Inflasi, terkait Inflasi Kota Jayapura bulan Agustus lalu BPS sudah rilis ditanggal 2 Agustus 2025, harga-harga komuditas di kota Jayapura relatife aman dan terkendali, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan untuk Inflasi man to man Kota Jayapura untuk negative 0,93% jadi man to mana ini harga sekarang dibandingkan harga bulan yang lalu , ada penurunan 0,93%. Untuk tiap artinya Inflasi Bulan Agustus di bandingkan dengan bulan Desember 2024, ini juga mengalami penurunan -0,72% dan Inflasi yalonger artinya Agustus tahun 2025 dibadingkan dengan Agustus 2024 ini 0,54%, Inflasi untuk Kota Jayapura termasuk daerah atau Kota yang memiliki peringkat dengan 7 terendah se-Indonesia dari status 150 Kabupaten/Kota, artinya perkembang harga di kota Jayapura terkendali sampai bulan Agustus 2025, sedangkan minggu 1 september kami pantau bahwa ada 8 komuditas yang mengalami kenaikan harga, 11 komuditas yang mengalami penurunan harga dan lainnya harganya masih stabil.terkait dengan Sekolah Rakyat yang adalah program prioritas presdiden yang datanya diambil dari BTSM, untuk wilayah Kota Jayapura buat di isi di dalam koperasi untuk dijual nanti pemerintah akan bayar. sementara di handline oleh balai diklat sebelum mereka menentukan siapa yang berhak mengikuti sekolah rakyat,dan mereka sudah koordinasi dengan BPS juga karena data BTSM melakukan klasifikasi terlebih dahulu sehingga terpilih adalah benar-benar warga yang kurang mampu yang berada di regu 1 maupun regu 2. Untuk tahun ini yang direkrut dalam sekolah rakyat semuanya adalah OAP (orang asli papua) ini kebijakkan Pemerintah daerah. terkait dengan perkembangan kemisikinan jadi tahun 2025 perbulan maret jumlah penduduk miskin di kota Jayapura mengalami peningkatan

12,03% dan sebelumnya 11,72% tahun 2024 penduduk miskin di Kota Jayapura, artinya Kondisi Ekonomi di Kota Jayapura tidak baik-baik saja ini menjadi PR kita bagaimana pembangunan bisa tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi 3,30% belum dirilis.

2.**Bulog**: Hormati Bapak Wakil walikota Selaku pemimpin rapat, Ibu Asisten II, Pak Ketua Pengadilan, Bapak Ibu peserta rapat. 1. Untuk stock beras di Jayapura sekitar 8000 Ton, itu sudah termasuk yang ada di pelabuhan Jayapura lagi dibongkar, untuk wilayah Serui dan Biak yang masih termasuk wilayah Papua jadi stock beras pada keseluruhan ada 10000 Ton, 2. Terkait dengan program bantuan pangan semua sudah tersalurkan semuanya terlebih di Jayapura yang sudah tersalurkan kurang lebih 890 ton beras dalam dan semua sudah diterima oleh masyrakat. Dan selanjutnya kami laporkan penyaluran SPHP yaitu GPM sampai dengan hari ini yang belum kami hitung berarti sekitar 600 ton sudah tersebar di pasar maupun outline-outline yang sudah ditentukan dan berterima kasih kepada bapak distrik turut membantu dengan adanya program GPM yang saat ini kami gencar-gencarkan untuk kita salurkan dan juga dibantu oleh Aparat TNI_Polri untuk menyalurkannya beras dalam program GPM. Kemarin kenaikan harga khususnya diberas medium, ini adalah beras medium yang didatangkan dari luar bulog. 1. Beras medium yang disalurkan oleh bulog adalah beras medium SPHP yang dipasar-pasar maupun di rpk-rpk yang sudah ditentukan. 2. Ada beras yang beredar itu hasil dari pada beras Bapak dan Ibu ASN yang dijual dipasar itu juga mempengaruhi harga pasar. Untuk saat ini kami menyalurkan beras ke ASN itu adalah jenis beras medium dan karungannya bervariasi, terkait dengan Program dengan koperasi Merah Putih kami terus dipantau dari kantor Bulog pusat untuk membantu kerjasama kami dari bulog belum menerima dari peserta-peserta koperasi untuk beras yang sama dengan penyaluran beras medium atau beras SPHP, saat ini lagi di sebut beras Gerakan Pangan Murah (GPM).

3. **Bank Indonesia:** Terkait harga yang tadi sudah di sampaikan oleh kepala BPS Kota Jayapura sampai bulan Agustus ini harga-harga cukup terkendali. Yaitu 0,54% Kami mendorong terkait pengendalian Inflasi, mencermati perkembangan sampai dengan akhir tahun. Kalau kita melihat data historis kita Kota Jayapura adanya kencenderungan peningkatan atau harga naik diakhir tahun karena sehubungan dengan peningkatan konsumsi masyrakat pada natal dan tahun baru, kemudian libur anak sekolah itu menjadi perhatian kita. Bersyukur karena sampai saat ini masih 0,54% berharap menjadi tabungan kita ketika terjadi kenaikan sampai akhir tahun itu, masih bisa menjadi dalam rens yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 2,5% untuk Inflasi di tahun 2025. Terkait upaya mitigasi resiko dan upaya-upaya yang bisa kita dorong terkait dengan pengendalian Inflasi sampai dengan akhir tahun. Kalau sejalan dengan arahan menteri dalam negeri dalam konteks pengendalian Inflasi ada 9 langkah Kongkrit pengendalian Inflasi: 1. Terkait dengan Gerakan pangan murah (GPM) bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mengendalikan harga dalam jangka pendek kita dorong akhir tahun. 2. Terkait dengan ketersedian pasokan tadi yang di sampaikan dari Pak Kepala Bulog, 3. Kelancaran distribusi itu yang menjadi knsen kami, kami sudah bertemu dengan bapak ibu dari Bappeda terkait dengan ketersedian dengan pasokan ini, klaster-klaster champion pertanian sudah bekerjasama dengan Bappeda dengan OPD teknis, mendorong ada 3 klaster pertanian,1. Mekanisasi pertanianya, 2.kelembagaan, 3. Berbagai dukung yang bisa kita dorong agar bisa jadi salah satu suplayer yang ada di Kota jayapura. Kemudiaan terkait dengan ketersedian pasokan berdiskusi dan informasi dari Bappeda ada rencana perpanjangan kerjasama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

   Termasuk inisiasi baru kerjasama Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ini menjadi langkah strategis untuk terkait pengandilaian Inflasi sampai akhir tahun bisa jaga sehingga

harapan kita tahun 2025 sasaran dari Inflasi dari Kota Jayapura bisa masuk sasaran Inflasi Nasional 2/5±. Terkait kelompok tani Dinas Teknis, Kemarin sudah dapat empat dari dinas teknis, sudah survey 1 cukup baik yang ada di Koya nanti akan menjadi salah satu calon yang akan untuk kita bisa dorong ke menjadi klester Champion pertanian yang ada di Kota Jayapura.

4. **Bapak Wakil Walikota :** Data yang diterima dari Pemerintah Kota arsip kegiatan gerakan pangan murah (GPM) di Kota Jayapura tanggal 30 Agustus 2025 ini tersedia beras 7000 kg, terjual baru 400 kg di Abepura. Kalau seluruhnya 35.000 kg, berarti yang baru tersalurkan baru 7000 kg. masih kurang sekali. **Tanggapan dari Kepala Bulog**: tanggal 30 Agus kemarin GPM di lakukan serempak, seluruh Indonesia. Jadi masing-masing Distrik kita sedikan stok quantum yang kita siapkan untuk dijual itu adalah 7000 ton namun daya beli dari masyarakat tergantung dengan cuaca yang kurang mendukung, di satu distrik itu ada yang kita bagi 400 kg, ada yang di bagi 1 Ton dan tidak habis terjual, sehingga di bawah kembali sekita 7000 ton sisa Gerakan pangan Murah. **Bapak Wakil Walikota**: ini pasti kurang sosialisasi pada masyarakat. **Tangapan Kepala Bulog:** ada ring bawah dan ring atas jadi seperti bulog itu
   Rp. 11.600 kita bisa jual di pasaran asal harganya jangan lebih dari Rp. 13.500 artinya kita bisa menjual 12.500 tapi kemarin sekitar Rp. 13.000 kalau harga di pasar Rp. 13.500, jadi kesepakatan kedepan kita bisa jual Rp. 12.500 supaya bisa menyetuh masyarakat. Yang penting harganya lebih dari Rp.11.500.
5. **Ketua Aprindo:** kalau besar di pasar modal saja di atas Rp.16.500, kalau beras dibeli dari agen Rp.16.400, jual sudah di atas Rp. 17.000 per 1 Kg beras. Menjadi kendala di suruh jual harga Rp.14.000 beli dari Surabaya itu harganya saja Rp. 14.900 tambah Ongkos kirim 1.200 harga jualnya Rp. 15.000 lebih. Itu jadi masalah, lalu semua pabrik yang ada di Surabaya maupun

yang ada di Jawa timur itu Cuma memberikan jatah kita hanya 1 Konteiner. Untuk 1 konteiner perdistributor, contohnya seperti Saga 1 merek itu semua 1 konteiner. Kami kejar bukan provitnya tapi lebih pentingkan buat konsumen. **Bapak Wakil Walikota**: Koordinasi dengan Koperasi merah putih sekalian bikin PKS skalian nanti saya bertanggung jawab, Aprindo harus bekerja sama dengan koperasi kita, dan sumber daya kita di latih di situ, Koperasi ini baru jadi harus cari relasi dulu. Ketua Aperindo: Ada suatu transportasi yang cukup besar, eksepedisi cukup besar biayanya, kami sudah membuat eksepedisi sampe hari ini sudah 2 tahun kami sudah mendapatkan ijin untuk beroperasional tai kami belum diijinkan dari KSOP itu yang menjadi masalah, padahal tujuan kami buat eksepedisi untuk menekan biaya opereasional eksepedisi, supaya biaya harga barang bisa di tekan dan menjadi masukkan buat PD Papua. pertanyaan kenapa diijinkan ekspedisi besar dari Surabaya masuk ke Papua, seperti Niaga seharusnya tidak boleh ada di Papua karena dari daerah Papua, harusnya kami yang lokal supaya bisa memangkas biaya. **Bapak Wakil Walikota**: kalau pertamina sudah memimpin rapat tentang jam pelayanan di spbu dan membuat satgas untik kemanana BBM, termasuk mobil BOX, persoalanya ada mobil yang antri berkali-kali untuk menjual bbm yang di beli.

6. **Pelindo:** Untuk ijin itu semua dari KSOP, jadi KSOP memberikan ijin dan pelindo tinggal terima dimasukkan dalam sistem sudah bisa digunakan. Ekspedisi Lokal yang beroperasi ada 35 ekspedisi, belum masuk Aprindo, maksudnya yang lokal itu harus orang papua asli punya, ekspedisi yang ada bukan milik orang lokal, Bapak Wakil Walikota: Nanti di komunikasi dengan KSOP apa hambatannya, ini sangat penting biar bisa menekan biaya pengiriman.
7. **PAMJ:** terkait dengan Program yang Bapak Wakil Sampaikan, berkaitan dengan MBG dan Pembangunan 3 Juta Rumah terkait dengan tukposi kami , dapur umum dan juga rumah-rumah mana

saja yang membutuhkan dukungan dari kami sebagai yang menagani Air besih dan pihak yang menangani bisa berkordinasi dengan pihak PAMJ.

8. **PUPR:** untuk data air bersih untuk membangun 3 Juta ini program nasional, untuk di kota Jayapura sudah terpasang sudah selesai pengambangannya ke Muara Tami, Bapak Wakil Walikota: program Presiden 3 Juta rumah di Kota sudah membangun berapa jatah kitadari 3 juta Rumah itu apa 100 ribu k. 3 juta itu untuk Kota Jayapura karena termasuk dalam daerah perkotaan kota jayapura di jatah 2 juta rumah, 1 juta milik pedesaan, 2 juta jatahnya. Ditargetkan setiap tahun dibangun bersama-sama dengan kota yang termasuk dalam perkotaan jadi jatahnya 3 juta rumah. Bapak Wakil Walikota: 3 Juta Rumah Layak Huni program nasional bukan untuk kota Jayapura, ini untuk Indonesia, di Kota Jayapura jayahnya berapa dan lokasinya sudah dapat. 3 juta rumah itu setiap tahunnya berapa jumlah rumah yang pemerintah membangun, Tahun 2025 ini kota Jayapura di dalam Inflasi setiap kita bahas , itu yang kita laporkan yang dibangun pemerintah.37 rumah yang ada di kelurahan, kemudian 189 bsbs itu data Nasional untuk Inflasi setiap tahun, jika bisa masuk rumah kormesil tambah lagi data yang dibangun. Setiap minggu yang kita laporkan itu yang dibangun oleh daerah dan tidak ada target. Bapak Wakil Walikota: kita harus mengambil langkah-langkah konkrit APBD ada, program walikota juga ada, Membangun 1000 Rumah layak huni, ada program dari bali perumahan da nada program yang dibuat oleh developer itu yang kita beri insentif BPG dan BPBHTB. Bukan program tapi realisai, program dulu, baru rencanakan dan kerjakan baru kita lihat hasilnya berapa. Jadi berapa target kita untuk membangun berapa unit rumah tahun ini di Kota Jayapura. Karena belum ada target untuk Kota Jayapura, maka nanti PUPR koordinasi dengan DPMPTSP karena Dinas ini yang memberikan perijinan dan Bapenda , karena Bapenda yang akan melaporkan berapa yang bebas UP yang ada di Kota

Jayapura.

9. **Bapenda:** apa yang tadi di sampaikan oleh Ibu Kabid PUPR itu memang yang di sampaikan saat sosialisasi di Provinsi oleh tim kementerian secara langsung. 1. Jadi yang dimaksud 3 juta rumah layak huni MBR, itu bukan dari pusat yang memberikan anggaran baru pemerintah daerah membangun, tetapi pemerintah daerah yang membangun beberapa rumah untuk memenuhi 3 juta rumah itu. Pemerintah daerah membangun berapa Rumah dengan Dana yang tadi Bapak Wakil Walikota sudah sampaikan, kemudian di desa membangun berapa unit rumah menggunakan dana desa yang ada, kemudian developer juga membantu pemerintah daerah membangun beberapa unit rumah dan swasta yang lain, yang peduli terhadap masyarakat membangun beberapa unit rumah, setelah itu semua di hitung dan di laporkan setiap minggu. 2. Data ini juga kita harus bertanya data masyarakat yang memenuhi kriteria ini ada di dinas mana? Yang menyiapkan data sehingga Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota program anggaran untuk membangun rumah, waktu disosialisasi ada dinas sosial dan PUPR, karena itu Bapenda Kota Jayapura melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan SK B3 Menteri untuk pemberian pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB) terhitung program ini sudah dilakukan sampai hari ini sudah 331 Wajib Pajak, dengan Type 36 rumah dan bebas biaya 8 juta. Yang tadi di sampaikan oleh Bapak Wakil akan terjadi Los Potensi. Pajak BPHTB harus mencapai target 27 M. tapi sampai hari ini kita sudah Los Potensi 2.648 M dan estimasi rata-rata kita 4 bulan ke depan kita akan kehilangan 6 M. oleh karena itu Bapak dan Ibu pimpinan OPD teknis atau Dinas Sosial, karena dari BPS sudah sampaikandesil 1, desil 2 itu masing-masing memiliki kriteria secara nasional untuk persyaratan mendapatkan rumah, itu yang memverifikasi adalah Bank bersama OJK, jika masih bujang harus berpenghasilan Rp.10.000.000 juta sedangkan yang sudah berumah tangga harus berpenghasilan Rp. 12.000.000 juta,

persyaratan yang panjang sehingga Pemerintah daerah hanya memenuhi yang sudah di verifikasi oleh Bank.

10. **Bapak Wakil Walikota:** jadi sudah ada laporan dari Bapenda sudah ada keringanan pembebasan BPHTB termasuk PBBnya jadi catatan ya ibu Kabid coba dicek data tentang ini, Dinas sosial ada tidak data tentang ini. warga miskin yang MBR yang perlu mendapatkan bantuan rumah .
11. **Dinas Sosial:** Terkait dengan Data masih mengacu kepada Data dari BPS
12. **Satgas Pangan:** dengan kesempatan ini dengan adanya Pengendalian Inflasi Daerah secara rutin melakukan koordinasi dengan stekholder terkait dalam Disperingdankop dan Bulog dan juga melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Hasil pemantauan didapati untuk ketersedian Stok dan harga pangan masih terkendali, walaupun ada beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ART namun terseut perintah dari satgasda (satgas pangan daerah) dalam hal ini Kasdim suspol Papua. Nanti akan dilaporkan kepada Satgas Pangan pusat dalam hal ini satgas Polri, seperti yang disampaikan oleh pak Aris tadi memang ada beberapa kendala yaitu kaitannya dengan distribusi dari produsen kepada distributor membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar untuk ke Kota Jayapura sehingga temuan tersebut akan di laporkan tentunya akan menjadi bahan masukkan pimpinan kami di satgas pangan pusat, kemudian berikutnya terkait dengan penyaluran dengan beras SPHP, kami dari Polresta Kota Jayapura kami satgas pangan juga melakukan hal yang serupa untuk mendukung program pemerintah yang mana berasnya kami sudah distribusikan sebanyak 4000 kg (4 ton) dengan harga jual sesuai dengan intruksi yang ada, program penyaluran SPHP kami sedang proses surat kepada Bulog untuk mendapatkan stok beras SPHP untuk kami menyalurkan kepada masyarakat Kota Jayapura, sebagai laporan minggu lalu kami sudah lakukan di Distrik Jayapura Utara di depan Mall Jayapura, masyarakat sangat

merasakan dampak adanya penyaluran dari beras SPHP tersebut, memang untuk dinamika terkait dengan beras hasil pemantauan satgas pangan terkait dengan beras premium memang dari distributor, rekan-rekan belum mendapatkan respon dari produsen. Sehingga untuk penyaluran beras SPHSP ini sangat membantu masyarakat Kota Jayapura.

13. **Kodim:** Terkait dengan program pangan ini atau program unggulan presiden kita memiliki program ketahanan pangan dalam waktu dekat ini. Pembangunan beberapa fasilitas umum signifikan, kemarin kita sudah lakukan penyaluran beras SPHP sebanyak 6 Ton ke masing-masing koramil dengan harga kisaran Rp. 12.500/kg di lapangan dalam hitungan jam 1 bisa habis. Termasuk program MBG ini kodim sudah mengikuti dari awal, setiap jam 5 sore harus melaporkan menu apa yang di sajikan, kemudian berapa orang dan SOP apa yang mereka kerjakan jam 5 sore kami laporkan untuk wilayah ini khusus Kota Jayapura 22 Dapur dan 12 mitra yang sekarang bergerak, dengan melayani 29.797 yang berhak dapat pelayanan mulai dari Bumil, Bayi, iu meyusui, Paud, Tk, SD, SMP dan SMA/SMK. Mungkin di bulan September jumlahnya akan bertambah.
14. **Sartrol:** pembagian sembako di kayu pulo;
15. **Dinas kesehatan:** pemeriksa kesehatan gratis sudah dilakukan di 14 Puskesmas, pemeriksaan kesehatan gratis ada 3: 1. Pemerikasaan ibu hamil & bayi baru lahir, 2. Pemeriksaan gratis untuk dewasa dari usia 18 tahun keatas & lansia; 3.untuk anak sekolah. Untuk pemeriksaaan gratis untuk Dewasa dan lansia melakukan di Puskesmas untuk pemeriksaan gratis anak sekolah ini dilakukan pada masing-masing Sekolah. Pemeriksaan kesehatan sekolah agak berat karena kita membutuhkan quisioner yang banyak sesuaikan dengan jumlah siswa kita yang ada di kota Jayapura.untuk anak SD ada 19 Indikantor, untuk anak SMP 18 Indikantor dan SMA 17 Indikantor. Pelayanan ini bukan baru tapi saat ini ada penambahan indikantor. Sampai dengan hari ini

jumlah sudah dilayani untuk dewasa sudah 4000an dan anak sekolah 2000an itu sudah terinput di aplikasi totalnya 6.895 warga Kota Jayapura yang sudah terinput. Pelayaanan Ibu Hamil sudah 3000an, demikian dengan bayi baru lahir itupun kalau sudah terinput di aplikasi. Pencanangan pemeriksaan gratis mulai tanggal 1 Agustus itu sesuai dari kementerian.

16. **Dinas Sosial :** terkait dengan sekolah rakyat untuk di Kota Jayapura sudah dimulai untuk tahun ini, ada ruang mengajar, 1 ruangan isinya 50 dan satu kelas lagi 50 dan menggunakan fasilitas diklat Sosial Provinsi, itu masih setingkat SMA sedangkan SMP dan SD sedang melakukan pendaftaran atau pendataan sesuai rencana fasilitas balai diklat (BLK) di Base-g, terkait fasilitas bangunan sekolah rakyat, sudah melakukan survey dengan Dinsos, BPKAD, PUPR, dan Distrik Muara Tami untuk lokasi di tempat berdirinya SMK 7 di Skow Muara Tami,sudah melakukan survey surat ke kementerian berkaitan dengan proses ke kementerian sosial sudah di layangkan dan sertifikat lagi dalam proses.

17. **Dinas P&K:** terkait dengan MBG data yang kami peroleh dari SPPG Kota Jayapura data minggu kedua bulan Agustus jumlah sekolah sudah dilayani adalah 100 sekolah, terdiri dari Paud 35, SD, 35, SMP 17 dan SMA/SMK 13. Dengan Jumlah siswa yang sudah dilayani itu sebanyak 22.062 siswa, dari jumlah siswa keseluruhan di kota Jayapura ada 62.540 siswa. Dapur yang sudah layani di Kota Jayapura ada 7 dapur di antaranya distrik abepura ada 3 dapur, distrik heram ada 1 dapur, distrik Jayapura Selatan belum ada, distrik jayapura utara ada 2 dapur dan distrik muara tami 1 dapur. Sehingga sudah ada 7 dapur yang melayani yang masuk dalam data kami SPTG dan MBG minggu ke dua bulan Agustus.
    Terkait dengan dapur yang dibangun oleh pemerintah, kami sudah dikunjungi dari badan gizi nasional terkait dengan verifikasi lapangan, untuk dapur di pasar Eks Ampera itu sudah cek hanya surat-suratnya belum ada sertifikat hanya ada hiba untuk

membuat sedikit keterlambatan pembuatan surat, SMK N 7 Jayapura itu tidak ada sertifikatnya hanya ada surat lepas tanah adat. Hanya SMP N 4 saja yang punya sertifikat. kemudian di smp N 8 ada lapangannya yang direncanakan membuat dapur misalnya kedua dapur ini tidak memenuhi syarat maka akan di buat di SMP.

18. **Bappeda**: Ibu Kabid Ekonomi, dapat sampaikan terkait dengan program strategis nasional ini, dari website untuk mengisi laju pertumbuhan ekonomi, memang diminta update dan apa saja yang dilakukan perbulan, dari 6 program strategi nasional ini, untuk itu kami meminta bantuan Bapa dan ibu sekalian yang menghendel 6 program ini, dapat memberikan data-data yang terupdate karena ini akan dilaporkan perbulan hanya dari tanggal 1- 20 September, hanya setiap perbulan dari tanggal 1-20.
19. **BPOM:** Terkait tentang Toko Alfamidi, sudah di sarankan bahwa harus mempunyai distributor supaya jangan membongkar barang depan outlinenya merusak produk dalam waktu yang lama membongkar. Merusak kemasan. Kami mau sarankan agar pemerintah kota membuat surat edaran agar Indomaret ini mempunyai distributor, supaya ada tempat yang aman dan produknya tetap baik. karena indomaret ini juga menganggu. Terkait MB, apakah Dikota Jayapura punya Satu SK terkait kelompok kerja, karena ini program 5 tahun ke depan, kami sudah bersama-sama polisi. Kota sudah ada biar bisa ada koordinasi, Bapak Wakil Walikota: SKnya sudah ada dimeja Bapak Wali tinggal di tanda tangan saja.
20. **Pertamina** : Pertamina mensupport semua program yang dikerjakan, ketersedian BBM yang mencukupi. Mengenai harga itu memang ada penyusaian terkait harga subsidi, subsidi sifat harga nasional kita mengikiuti harga nasional.
21. **Dinas Pariwisata:** keterlibatan kami pengendalian inflasi disetiap Ivent-ivent pariwisata melibatkan UMKM-UMKM binaan dinas pariwisata untuk peredaran ekonomi bisa berjalan juga dalam

ivent-ivent yang dilaksanakan Dinas Pariwisata.

Kesimpulan:

1. Inflasi kita di Kota Jayapura hari ini yang dilaporkan BPS 0,54% kemudian Inflasi tahun Kalender 0,72%, Inflasi bulanan kita 0,93%, kalau baca ini sebenarnya Inflasi Kota Jayapura aman, tapi dari Rapat kita harga naik;
2. Laporkan bahwa kita termasuk dalam Inflasi 7 terendah di Indonesia, kita aman;
3. Penerima bantuan ini untuk data yang masuk di dalam sekolah rakyat ini yang dipanggil adalah orang yang terdata di datasn , Dinas Sosial survey ke lokasi;
4. Penduduk yang mengalami kesmikinan naik menjadi 12,03% dari 11%, penduduk di Kota Jayapura;
5. Stok beras Aman 6000 ton, kemudia SPHP kita juga sama, persoalanya yang distribusi banyak tapi pembeli sedikit. Perlu disosialisasi dan di antisipasi;
6. Kemudia dari Bank Indonesia perlu gerakan Pangan Murah tetap jalan untuk mengendalikan Inflasi kita dan pasokkan ketersediaan tetap di jaga kelancaran distribusinya; kemudian membuat PKS dengan Kabupaten lain, nanti dengan kabupaten Jayapura akan tindak lanjuti;
7. Harga beras sekarang sudah mulai naik, perlu antisipasi kalau beras Bulog kita aman;
8. Walikota tinggal mendatangi jadwal pembelian BBM terutama solar di Pertamina dan SPBU;
9. Dampak dengan kenaikan harga di akhir tahun atau awal tahun menyangkut dengan harga barang;
10. Persoalan kita akan bicara dengan KSOP terkait ijin ekspedisi dari Aprindo nanti Ibu asisten di lanjutkan;
11. Nanti OPD terkait mendata warga yang mendapat bantuan pembangunan rumah 3 Juta rumah, yang butuh sambungan air dari PAMJ;

12. Yang terdata rumah yang mengurus perijinan di Kantor DPMPTSP dan membayar pajak di Bapenda 331 rumah bagi MBR yang diberikan Pajak;
13. Harga masih stabil, kendala kita adalah distribusi Jakarta ke Jayapura;
14. Data dapur kita hari ini 12 melayani jumlahnya 29. 797 siswa;
15. Kendala pemeriksaan gratis di puskesmas hampir sebagian besar tidak mempunyai NIK;
16. Sekolah Rakyat sudah jalan 2 kelas, sementara berjalan di balai diklat Sosial siswa berjumlah 50, SD dan SMP lagi perekurtan rencana di bangun di SMK 7 Skow;
17. MBG yang tadi ini 100 Sekolah, paud 35, Tk 35, SMP 17 dan SMK/SMA 13;
18. Persoalan terkait MBG tidak ada pembelian kepada petani lokal;
19. Koperasi merah putih semua sudah dibentuk tapi belum ada rekening, buat rapat undang Perbankan, polisi.

Notulis,
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF, SE
NIP. 19761213 20022 004

Pimpinan Rapat,

WAKIL WALIKOTA JAYAPURA

Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Senin, 8 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, MM	PEMERINTAH KOTA JYP	WAKIL WALIKOTA JYP.		1.
2					2.
3	AGUS DAHDO M	PN Jayapura	KPN	082137274955	3.
4	Sasongko Agung N	Bank Indonesia	Asisten Direktur	0813823545 74	4.
5	Sugiyanto	BPS Kota Jpr	K BPS	08134429 [illegible]	5.
6	Frandina A. Tuanga.	BPKAD	Kabid perbend		6.
7	Refdamar. D. W.	Bank Indonesia	Manajer		7.
8	Fitrajaya Pratama	Bulog	Am. Wanlog		8.
9	Enar Mutira	Dinkes	Kasie Kesga/Gizi	08114381603	9.
10	Kapten Sahar	Satrol Federal x	Dankal Piton	081331529824	10.
11	Raid Mahdy	Pertamina	CO SA Papua	0895637935520	11.
12	Kompol I Dewa	Polresta JPR Kota	Kasat Reskrim	081238175923	12.
13	JEMS J. FONATABA	PT. PELINDO TPK JAYAPURA	MANAGER OPERASI	082195043131	13.
14	Syukri	PT. AMJRN	Staf SDM	0812 9710 7100	14.
15	Paulus D. Wirahsono	PTAM Jayapura	Humas	085254596676	15.
16	MICKA W. MANO	DPUPR PKP	KABID PKP	082238775307	16.
17	MARSELINA ARON	DKPP – Kota Jayapura Barat KABID. PETER. & KESWAN	KABID PENYL PKESWAN	08124847366	17.
18	Salomina Y. Pinglareuw	DKPP	PLT. Kadis	085244302739	18.
19	Bambang.	PTAM Jayapura	SDM & UMUM	082238382029	19.
20	ENTIS SUTISNA	PTAM Jayapura	Direk		20.
21	Afrianti	Kodim 1701 Jpr	Paster	082199734900	21.

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, September 2025

Nomor : 500.2.3 / 1267 / SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Hasil zoom Inflasi bersama Mendagrii Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /4701 /SJ terkait Pengendalian inflasi dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah ,maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura melaksanakan Rapat yang di pimpin oleh Walikota Jayapura .

maka kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Jam : 13.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
2. Walikota Jayapura (Sebagai laporan)

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura

Hari/Tanggal : Selasa 16 September 2025

Pukul : 09.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Walikota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi yang di impin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor:T.000 1.5 /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

1. Asisten Bidang Pembangunan Dan Kesra
2. Inspektur
3. BPS Kota Jayapura
4. Kepala BPKAD Kota Jayapura
5. Kepala Bappeda Kota Jayapura
6. Kepala Dinas PUPR dan KP Kota Jayapura
7. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura
8. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura
9. Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura



***Keterangan**: rapat dipimpin oleh Bapak Walikota Jayapura*

III. Arahan Walikota Jayapura

- Ucapan salam

Walikota Jayapura :

Pemerintah Kota harus menperhatikan apa yang di sampaikan oleh pusat untuk kita se;aku TPID Kota jayapura melakukan sesuai tu poksi masing –masing ,pertanian dengan anggaran yang di bagi ,perikanan dan Perindagkop,dilaksanakan baik menyangkut upaya –upaya yang dilakukan dan harus dilaporkan sehingga dapat tercatat yang telah melakukan upaya – upaya pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura tahun 2025 .di harapkan bagi opd teknis pertanian untuk melakukan upaya penanaman cabe dan bawang merah karna kita di Kota Jayapura merupakan Komoditas penyumbang inflasi,sehingga masuk pada Nataru nanti bisa menambah stok di Kota Jayapura ,bila kekurangan kita menambah dari luar dengan melakukan kerja sama antar daerah .

Asisten II :Berharap teman teman OPD perindagkop untuk aktif dalam pengiriman data haega pangan ke Inspektorat agar dilaporkan perkembangan harga di Kota Jayapura.

Kabid Koperasi : Untuk Koperasi Merah Putih kami sudah laksanakan pengurusan akata bpendirian koperasi sebanyak 25 Kelurahan .Sedangkan kampung akan di urus oleh BPMPK .

Walikota : Perlu kita perhatikan untuk upaya –upaya yang belum kita lakukan BTT untuk Koperasi segera di realisasikan untuk pengurusan Koperasi merah putih dan Perindagkop terus berkoordinasi dengan kementrian Koperasi,Juknisnya seperti apa yang akan di lakukan di daerah ,sehingga Koperasi ini dapat berjalan dan membantu masyarakat .dari Zoom tapi kita lihat Upaya yang dilakukan kota Jayapura upaya 1 samapai 3 sedangakan kota jayapura sudah melaukan 6 upaya agar berkoordinasi ke pusat ,kemendagri atau Kemenko.

Walikota : Bagaimana dengan PU apakah perlu di buat perijinan untuk sekolah rakyat dan sekolah unggulan garuda,dan koordinasi dengan Bappeda untuk 3000 rumah.

PUPR : BPG kami menyiapkan semua permohonan yang masuk,selama mereka belum peruntukan ruang harus di lihat pemilikan.Hampir semua lahan di Muaratami adalah lahan pertanian dan perikanan .

Permohonan yang masuk kalau tidak sesuai RTRW maka dengan sendirinya aplikasi yang menolak,karna daerah pertanian atau perikanan,mungkin bisa di bantu dari revisi RTRW supaya bisa berubah fungsi lahan.Pada saat rapat developer sudah tau karna ada berita acaranya, daerah mana saja yang tidak bisa di bangun.

IMB yang sudah di selesaikan yaitu Jayapura utara,Jayapura selatan dan Abepura ada tiga Distrik,dalam tahapKP1 ,dalam konsultasi public semua stelkoder memberikan masukan sebanyak –banyaknya untuk daerah pertanian ,jayapura utara,Heram.dan aka ndi masukkan dalam KP2 agar tidak ada lagi kekurangan, untuk rencana tata ruang.

Bappeda : Sesuai dengan RDTR wilayah distrik Abepura dan Jayapura selatan,sedangkanuntuk RTRW yang masih revisi,dan masalah sekarang ada I BWS . Bappeda sudah menyurat ke BWS yang kedua kalinya dan belum mendapat Rekomendasi bahkan komunikasi juga terputus.mungkin ada kebijakan pa Wakil untuk mengundang BWS lagi.

Walikota : TPID Kota jayapura harus berkolaborasi dengan BI,Bulog,BPS, BUMD dan BUMN di Kota ,dan permasalahan kita diJayapura Irigasi Pertanian yang menghambat hasil pertanian bahkan ikan keramba perlu kita bertemu rapatkan dengan BWS,untuk irigasi di daerah peranian Muaratami.

ARAHAN BAPAK WALIKOTA :

1. Perlu memperhatikan Program Pusat dan memberikan laporan ke Walikota untuk melihat Progres Perkembangan dari Program Prioritas presiden.
2. Tim Pengendalian Inflasi Harus berkolaborasi dengan BPS untuk melihat permasalahan komoditas pemicu inflasi di Kota Jayapura dan Dinas Pertanian untuk memberi Informasi terkait data perkebunan cabe ,dan bawang merah ,selanjutnya mengatur pola tanam agar tidak terputus untuk produksinya.
3. Irigasi –irigasi yang menjadi kendala di daerah pertanian dapat di laporkan untuk rapat bersama ,mencari jalan keluarnya agar perkebunan bahkan padi dapat tumbuh subur dan berproduksi dengan baik.

Notulis

KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF,SE
NIP.19761213 2002122004

PIMPINAN RAPAT,

WALIKOTA JAYAPURA

ABISAI ROLLO, SH, MH

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 16 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	ABISAI ROLLO, SH, MH		WALI KOTA		1.
2	Widhi Utartomo		Asisten Pemb.		2.
3					3.
4	Salomina Y. Fingkreuw,S.Sos	DKPP	Plt Kadis	085244302739	4.
5	RYAN ZULYENDRI	BPS Kota Jpr	Statistisi A. Pertama	0812 66466138	5.
6	Usmul Nur S. R.	BPS Kota Jpr.	Statistisi A. Pertama	082238427545	6.
7	Deasy. Kaap	Bappeda	Kasubid		7.
8	MILKA W. MANO	DPUPR-PKP	kabid PKP	082238775307	8.
9	RIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		9.
10	Endah Lestari	DKPP	FKBID TPH & BUN		10.
11	Stanley. Y. Siwenq	Perikanan	KA. UPTD P2HP		11.
12	Endah Anggraheni	Dinas Pariwisata	Kasubbag PF & P		12.
13	M. RIPAI	INSPEKTORAT	AUDITOR		13.
14	Felson Mangontar	Dinas Sosial	Sekretaris		14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, Desember 2025

Nomor : 000.1.5/2656/SET
Lampiran : -
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah.***

Kepada
Yth. .....
.....
Di_
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3 /9707 /SJ terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah .

maka kami mohon kehadiran bapak / Ibu Pimpinan untuk hadir pada rapat yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis ,8 Desember 2025
Jam : 14.00 Wit s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan rapat : Sekretaris Daerah Kota Jayapura

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

MUCHLIS KARIM , SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

Tembusan :
1. **Walikota Jayapura (Sebagai laporan)**

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2025

Pukul : 13.00 – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah Kota Jayapura

I. Dasar Hukum :

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 8 Desember 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. Peserta Rapat :

1) Forkopimda Kota Jayapura
2) Sekretaris Daerah Kota Jayapura
3) Dinas Pendidikan Kota Jayapura
4) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
5) Kepala Bappeda Kota Jayapura
6) Kepala PUPR.PKP Kota Jayapura
7) Kepala Inspektorat
8) BPS Kota Jayapura



Mohon Ijin Pimpinan
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri via Zoom Meeting
Senin, 8 November 2025

Keterangan: *rapat dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Jayapura*

III. Arahan Sekretaris Daerah

- Ucapan salam
- Diskusi

Selamat siang, syallom
Asalawalaikum semua
kami telah mengikuti Zoom Inflasi terkait Laporan kinerja yang harus di lihat untuk program unggulan Daerah Kota Jayapura dngan Inovasi yang dapat mempermudah hasil Produksi meningkat baik sektor pertanian, perikanan, dan harus menggambarkan seluruh kualitas kinerja TPID dalam satu tahun .
Dan yang perlu kita buat menjadi program unggulan adalah Program yang berdampak dan benar benar dilaksanakan.

Bappeda : Laporan Kinerja TPID sudah di buat dari triwulan I,II,III,IV yang harus menunggu angka inflasi yang di terbitkan pada awal Januari 2026 ,untuk Laporan Kinerja TPID 2025 sementara menyusun dan berkoordinasi ke Bank Indonesia , dan Juknis Penyusunan Laporan kinerja TPID 2025 masih menunggu dari Kemendagri.

Pertanian : Data kami terkait bantuan kepada masyarakat yang dilakukan Walikota dan Wakil walikota dalam rangka pengendalian inflasi di kampung –kampung yaitu

melakukan gerakan menanam bawang dan cabe dokumentasi kami akan serahkan ke Sekretariat TPID .

BPS : Kami akana tetap membantu Pemerintah Kota jayapura yang selama ini berjalan dengan data inflasi yang akan menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah.

KESIMPULAN :

1. program unggulan Daerah Kota Jayapura dngan Inovasi yang dapat mempermudah hasil Produksi meningkat baik sektor pertanian, perikanan, dan harus menggambarkan seluruh kualitas kinerja TPID dalam satu tahun .
   Dan yang perlu kita buat menjadi program unggulan adalah Program yang berdampak dan benar benar dilaksanakan.
2. Data ataupun Dokumentasi Gerakan menanam cabe dan bantuan bibit ikan dari Dinas perikanan pada pada kampung kampung adat di kota Jayapura ,dan bantuan sembako ,dari dinas perindagkop perlu di kirim sebagai data pelengkap laporan kinerja TPID tahun 2025.

Notulis
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF,SE
NIP.19761213 2002122004

PIMPINAN RAPAT,
SEKDA KOTA JAYAPURA

MUCHLIS KARIM, SE,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
19710414 199712 1 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Hari/Tanggal : Senin, 8 Desember 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	Muchlis Leasiun		Pl. Sekda		1.
2					2.
3					3.
4	Purnama Sinaga	Dinas PPK	Kabid SMP	082397933629	4.
5	DAVID HOWAY	DKPP	Kabid. Pavo Celcius		5.
6	Yustina Satyawati.	DPUPR-PKP	Plt. Kasubbid		6.
7	DIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KABID PERDAGANGAN		7.
8	M. RIFAI	INSPEKTORAT	AUDITOR		8.
9	Main Yepese	Bappeda	Kasubbid.		9.
10	Lia Pujalarasari	BPS Kota Jayapura	Statistisi Ahli Madya		10.
11					11.
12					12.
13					13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 19 September 2025

Nomor : 896/1838/SET
Lampiran : 1 rangkap
Perihal : **Undangan Rapat Capacity Building Pengendalian Inflasi Tahun 2025.**

Yth .....

Di
Jayapura

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan pemahaman Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah terkait data inflasi dan statistik daerah. Bersama ini kami bermaksud mengundang Badan Pusat Statistik Kota Jayapura sebagai narasumber dalam kegiatan Sharing Session. maka Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : **Kamis, 25 September 2025.**
Pukul : **10. 00 Wit s/d Selesai.**
Tempat : **Ruang Rapat Bappeda Kota Jayapura.**

Demikian, yang dapat kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

a.n WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE, S.Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690319 199610 1 010

Tembusan, Yth:
1. **Walikota Jayapura;**
2. **Wakil Walikota Jayapura;**
3. **Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;**
4. **Kepala Bappeda Kota Jayapura.**

Nomor : 896/1838/SET

Tanggal : 19 September 2025.

Daftar Undangan terlampir :

1. Kepala BPS Kota Jayapura;
2. Kepala DPMPTSP Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura;
5. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Jayapura;
6. Kasubbid Perencanaan Ekonomi Produksi;
7. Kasubbid Perencanaan Usaha Ekonomi;
8. Kasubbid Perencanaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
9. Staf Bappeda Bidang Ekonomi.

a.n WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ROBERT NICOLAS MERAUJE, S.Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690319 199610 1 010

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulensi Capacity Building Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Jayapura

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025.
Pukul : 10.00 WIT – 13:00 WIT.
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah
Pimpinan Rapat : Kabid Ekonomi Bappeda Kota Jayapura.

I. Dasar Hukum :

Undangan Sekretaris Daerah Kota Jayapura Tanggal 25 September 2025, Nomor: 896/1838/SET, Perihal: Capacity Building Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Jayapura.

II. Peserta Rapat :

1. Pemimpin Rapat dan OPD yang hadir :

- Kepala Bidang Ekonomi Bappeda;
- Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Jayapura;
- Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Jayapura;
- Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Jayapura;
- Kepala sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pariwisata;
- Kepala sub Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bappeda;
- Staf Bappeda Bidang Ekonomi Bapped Kota Jayapura;



***Keterangan**: rapat capacity building pertumbuhan ekonomi daerah kota jayapura tahun 2025*

III. Penyampaian Materi

1. BPS Kota Jayapura

Tim statistik harga BPS kota Jayapura memiliki tugas untuk melakukan penghitungan bagi seluruh aspek yang ada dipemerintahan secara kuantitatif. BPS adalah lembaga negara yang diberikan tugas untuk melakukan perhitungan terhadap data yang dimiliki oleh pemerintah untuk dihitung secara berkala. Urutan pertama terendah 0,53%, bobot kualitas untuk mengukur indeks harga dilakukan dengan cara melakukan penginputan ke dalam website resmi BPS kemudian akan diolah data tersebut untuk dihitung oleh BPS pusat karena daerah hanya memasukan angka hasil data yang dihimpun untuk mendapatkan hasil presentasinya sebagai hasil survei pusat dan daerah. Secara umum BPS merupakan lembaga statistik yang diakui negara untuk menghimpun, menghitung, dan memprsentasikan data secara kuantitatif yang dapat disajikan secara statistik bagi pemerintah pusat dan daerah.

2. Kepala Bidang Ekonomi Bapeda Kota Jayapura

Beras SPHP merupakan subsidi pemerintah daerah tetap melakukan prediksi harian terhadap harga yang diambil ke pasar secara mingguan, sebagai data harga yang telah dihimpun dari pedagang yang berada di pasar dan ritel modern. Nelayan harus menerapkan timbangan dalam bentuk kilogram dalam penjualan ikan di TPI/PPI Hamadi maupun dipasar tradisional. Harga pengambilan data yang selama ini dilakukan oleh Disperindagkop harus dirubah agar kita dapat memperoleh data yang valid dan akurat.

3. BPS Kota Jayapura

Intervensi perkembangan harga agar harga dapat stabil dapat dilakukan dengan cara melakukan intervensi terhadap asosiasi/perkumpulan harga antar pedagang dipasar. Pemerintah dapat membuat series harga sebagai dasar mengapa komoditas mahal pada bulan tertentu sehingga kita dapat mengetahui alasan atau sebab harga mengalami kenaikan yang signifikan.perdagangan pasar akan mulai dikendalikan pada oleh pemerintah mulai tahun 2026. Analisa harga hulu ke hilir dapat di bantu oleh Bappeda untuk memberikan data, salah satu contoh seperti melakukan pendataan pedagang dari Keerom ke Jayapura agar harga jual pasar dapat diatur dan kendalikan. BPS memiliki data statistik sektoral bagi pemerintah daerah untuk diberikan kepada opd teknis bidang perekonomian.

IV. DISKUSI

A. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata sangat berterima kasih atas kegiatan capacity building ini karena dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang Statistik sektoral bidang Pariwisata agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dalm hal menghitung jumlah pengunjung wisatawan di Kota Jayapura.'

B. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP

Statistik sektoral sangat penting dalam menunjang tugas pokok bidang penanaman modal karena sangat membantu Analisa perhitungan capaian target penanaman modal dalam negri dan asing di Kota Jayapura.

C. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan

Statistik sektoral ini merupakan data yang dapat kita himpun untuk melakukan penghitungan jumlah hasil tangkapan dan produksi perikanan tangkap setiap tahun yang dapat dijadikan laporan tahunan statistik perikanan.

V. REKOMENDASI

1. Statistik sektoral bagi Pemerintah daerah wajib untuk dilakukan oleh BPS kepada organisasi perangkat daerah teknis bidang perekonomian.
2. Perdagangan pasar akan mulai dikendalikan oleh pemerintah daerah tahun 2026.
3. Pendataan pedagang dari Keerom ke kota Jayapura harus dikendalikan harga jual pasaran.

Notulis,

Maria Agnes Yepese,S.Sos.
NIP. 19840605 200909 2 001

Mengetahui,

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

OKTOVINA JOSINA KAMBU,ST,MT
NIP. 19820311 200605 2 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

DAFTAR HADIR RAPAT

Rapat Sharing Session Sekretariat Pertumbuhan Ekonomi Daerah bersama BPS Kota Jayapura

TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : Kamis, 25 September 2025

No	Nama	OPD	No Hp	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1				1.
2	Oktovian Tosi Wadu	Bappeda		2.
3	Maiyo Yepese	Bappeda		3.
4	Suratmi	BPS Kot Jayapura	082227265094	
5	Baptiar	Bps kota Jayapura	085244037765	5.
6	AHMAD TAUFIQ	BPS KOTA JAYAPURA	0822 5554 8008	6.
7	Endah Anggraheni	Dinas Pariwisata	082116764379	7.
8	WASRONAH	DINAS Pariwisata	085254086225	8.
9	TISKA BUKEO	DINAS PERIKANAN	082197876651	9.
10	Deasy Lucap	Bappeda		10.
11	Jean Rumaropen	Dpmptsp	6282240873593	11.
12	Irene Sriebar	Bappeda		12.
13	GILO	Bappeda		13.
14	RIDHO S.			14.
15	DELINA S.			15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETRIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, November 2025

Nomor : 500.1.1/2243/SET
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat Sharing Knowledge

Kepada

Yth. **Kepala BPS Kota Jayapura**

Di –

Jayapura

Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkait perhitungan Indeks Harga Konsumen. Yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal	: Kamis, 13 November 2025
Jam	: 13.00 Wit - Selesai
Lokasi	: Ruang Rapat Bappeda
Narasumber	: BPS Kota Jayapura

Demikian penyampaian kami, atas kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

a.n WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

MUCHLIS KARIM, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 21 Agustus 2025

Notulen Rapat Capacity Building

Hari/Tanggal : **13 November 2025**

Pukul : **13.00 WIT – Selesai**

Tempat : **Ruang Rapat Bappeda Kota Jayapura**

Peserta Rapat :

1) Kabid Ekonomi Bappeda Kota Jayapura
2) BPS Kota Jayapura(BPK RICHARD IMBENAY)
3) BPS Kota Jayapura(RIYAN ZULYENDRI)
4) BPS Kota Jayapura (Usnul Nur S.R)
5) BPS Kota Jayapura (Lia Pujialarasati)
6) Dinas Perikanan Kota Jayapura
7) Dinas Perindagkop Kota Jayapura
8) Kasubid Perencanaan Usaha Ekonomi Pada Bappeda Kota Jayapura
9) Kasubid Ekonomi Produksi Pada Bappeda Kota Jayapura
10) Kasubid Ekonomi Kreatif Pada Bappeda Kota Jayapura

- Ucapan salam

Kabid Bappeda : Maksud dari Pembahasan kita hari ini adalah terkait Laporan Kinerja TPID Kota Jayapura dan Indeks angka Konsumen karna setiap bulan ada Rilis Inflasi baik bulan ,tahun Tahun kalender ,terkait Pengambilan data Harga dilapangan tentang waktu pengambilan data ada 8 Komoditas yang diambil,kecuali harga emas dan Tiket Pesawat ,di harapkan OPD teknis bisa melakukan perhitungan sendiri dan menganalisa Data harga komoditas apa naiknya berapa persen ,dan kami mengharapakan BPS untuk bisa mempresentase cara pengambilan data harga berapa sampel dan cara perhitungannya sehingga ,OPD teknis yang mengambil data Dinas Perikanan , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Dinas Perindagkop, sehingga dapat menganalisi data harga di pasar , yang di ambil dari pedagang baik ikan ,telur dan kebutuhan pokok lainnya ,sekitar 30 komoditas yang di ambil kecuali tarif angkutan udara,dan transportasi ,kita hanya fokus pendataan saja ,dimana data yang di ambil dilakukan analisa ,sebagai Program unggulan untuk Inflasi ,di sini kami mengharapkan untuk OPD teknis bisa melakukan perhitungan sendiri ,memang selama ini kami dari Sekretariat TPID yang melakukan sendiri ,terkait komoditas apa naiknya berapa % untuk bulan ini ,sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan upaya –upaya Pengendalian Inflasi salah satunya adalah pasar murah ,selain itu terkait dengan Laporan Kinerja TPID ,di harapkan bantuan bapak /ibu Pimpinan OPD untuk menyampaikan data terkait pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi,baik berupa SK,Notulen dan Dokumentasi yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan Kinerja TPID Tahun 2025.Dan penjelasan lebih lanjut kami

akan dengarkan dari BPS dan kita bisa sering perhitungannya seperti apa.

BPS Kota Jayapura : IBU LIA PUJIALARASATI

: Trimakasih atas kesempatan yang di berikan kepada kami ,sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan pendataan harga yang sudah kami lakukan di Kota Jayapura.Data Inflasi dilakukan setiap bulannya oleh BPS dan sekitar 150 Kab/Kota yang telah melakukan perhitungan salah satu Indikator sehingga Pemerintah bisa menggunakannnya lebih akurat.

BPS Kota Jayapura (BPK RICHARD IMBENAY)

Mungkin kita langsung membahas saja ,apa itu inflasi dan atau Indeks harga Konsumen (IHK) bagaimana cara menghitungnya Bagaimana cara pengelompokkan Inflasi dan bagaimana cara menghitungnya contoh : dulu 50.000 kita bisa dapat beras ,ayam dan sayur kalau sekarang hanya dapat ayam 1 ekor saja.Daging ayam ras naik karna harga pasar juga naik .Inflasi Harga tiket Pesawat naik di sebabkan pada saat hari Raya Keagamaan .Dan Inflasi yang tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.dan juga perekonmian secara keseluruan, sedangkan inflasi yang rendah berdampak Positif bagi perekonomian.Pengelompokkan Inflasi 11 Kelompok pengluaran ,antara lain makan,minum dan tembakau.

Kasubid Bappeda :Terkait dengan laporan kinerja Inflasi di upayakan Potensi Unggulan harus salah satu yang di pilih sebagai langka pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura yang pelaksanaannya dari Hulu ke Hilir atau dampak Hasilnya bagi masyarakat Kota Jayapura .Terutama pelaksanaan (4K) harus di terapkan dalam Program unggulan dan Juga Roap map Inflasi Kota Jayapura sebagai langka dalam melaksanakan Upaya –upaya Inflasi .

Berharap teman teman OPD perindagkop untuk aktif dalam pengiriman data harga pangan ke Inspektorat dan juga kegiatan (Gerakan Pangan murah (GPM) agar dilaporkan perkembangan harga di Kementrian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Inspektorat Pusat.

Perikanan : Kami melaporkan bahwa Dinas Perindagkop data harga yang diambil tiap hari rabu baik untuk perikanan juga misalnya ikan ekor kuning 35.000 entrinya masuk ,tapi perhitugannya BPS langsung dari pusat,mungkin cara pengambilannya bisa di sampaikan dan bagaimana mengentrinya.

Kabid Bappeda : Kami dari Bappeda juga melakukan data tiap bulan dari Perindagkop untuk di analisa dari OPD teknis yang pengambilannya setiap hari rabu,ada sekitar 84 Komoditas pada 7 lokasi sampel dari pasar moderen dan pasar tradisional (2) dan 5 pasar moderen, ikan ,beras daging ,sayur ,buah buahan dari sini menjadi bahan laporan pada pada rapat inflasi.misalnya cabe naik terus tidak hanya pengecekan harga tetapi bisa di analisa naiknya berapa persen,dan kita pastikan datangnya komoditas ini dari mana .

Ketahanan pangan pertanian : Data dari kami pertanian tdk bisa masuk dalam perhitungan analisa karna data yang diambil dari perindagkop,kalau kami di pertanian itu ada proses ,output dan outcame nya ,dan kita fokus pada ketersediaan pasokan di lapangan tetapi juga banyak kendala yang di hadapi oleh petani.Kita Kota yang kita blm lakukan ketika harga naik dan kita belum intervensi.

Kesimpulan .

1. Dalam Perhitungan IHK Bersama BPS di harapkan OPD teknis bisa melakukan perhitungan sendiri dan menganalisa Data harga komoditas apa naiknya berapa persen yang turun ,baik untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura,Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian,Dinas Perikanan Kota Jayapura.
2. Dari data harga komoditas yang mengalami inflasib dianalisa dapat membantu kepala Daerah dalam mengambil kebijakan terkait pressentase harga komoditas yang mengalami inflasi dan melakukan rencana aksi Pengendalian Inflasi salah satunya pasar murah ,gerakan menanam,penambahan sarana prasarana pertaian sehingga hasil produksi meningkat.
3. Di perlukan Intervensi Pemerintah ketika harga komoditas naik

Notulis
KASUBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI
BAPPEDA KOTA JAYAPURA

DEASY KRESNA KAAF,SE
NIP.19761213 2002122004

Mengetahui,

Pimpinan Rapat
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

OKTOVINA JOSINA KAMBU,ST,MT
NIP. 19820311 200605 2 001

DOKUMENTASI CAPACITY BUILDING TPID 13 NOVEMBER 2025



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor Walikota JL. Balaikota NO. 1 Entrop Tepel. (0967) 534786, 531522, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PELAKSANAAN SHARING KNOWLEDGE

Hari/Tanggal : Kamis, 13 November 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	OCTAVIUS S. KAMEY	BAPPEDA	KABID EKONOMI		1.
2	Richard. Imbong	BPS KOTA JAYAPURA	STATISTISI	081245842762	2.
3	RYAN ZULYENDRI	〃	〃	0812 6646630	3.
4	Usmul Nur S.R.	BPS Kota Jayapura.	Statistisi	082238427545	4.
5	Lia Pujiarasari	BPS Kota Jayapura	statistisi	082140894498	5.
6	M. Agussalim	Dinas perikanan	Kabid PDSPP		6.
7	ERWIN USTARY	BKPP	Kabid TPH & BUN		7.
8	Engelina. F.	Perindag kop.	Kabid.	0813 55 805757	8.
9	Marin Yepese	Bappeda	Kasubbid.		9.
10	Diany Laap	Bappeda	Kasubbid		10.
11	Selvie. A. Nusmesse	Bappeda	Kasubbid.		11.
12	Imelda Pandun	Bappeda			12.
13					13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.

WALIKOTA JAYAPURA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

TENTANG

KERJASAMA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PANGAN SERTAPENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Nomor : 521/2021
Nomor : 521/667/BUP

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-04-2023) kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Frans Pekey** : Penjabat Walikota Jayapura, berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 1 Entrop Kota Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Piter Gusbager** : Bupati Keerom, berkedudukan di Jalan Pemerintahan Nomor 1 Yuwanaim Kabupaten Keerom, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama inidisebut sebagai **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Distribusi dan Pemasaran Pangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor47);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3533;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
6. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN KESEPAKATAN

1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi dan harmonisasi dalam pendisitribusian dan pemasaran pangan sejalan dengan program kerja pengendalian inflasi daerah.
2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk stabilisasi harga, mengurangi disparitas harga, dan menjaga ketersediaan pasokan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan,serta urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Membangun sistem pengendalian inflasi daerah yang sinergi dan harmonis.
b. Menjalankan program kerja pengendalian inflasi yang mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauanharga, ketersediaan pasokan, kelancararan distribusi dan komunikasi efektif.
c. Memantapkan aksesibilitas pangan sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimasksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menugaskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
3) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tetapmengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3) Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**dalam adendum nota kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota Kesepakatan Bersama ini
2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Jayapura Provinsi Papua pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutukan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PITER GUSBAGER

PIHAK PERTAMA,

FRANS PEKEY

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA JAYAPURA

DENGAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

KAJIAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
DI KOTA JAYAPURA.

Nomor : 523/445/IX/2025
Nomor : 4202 /UN4.1.7/PT.01.03/2025

Surat perjanjian kerjasama ini berikut semua lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Selasa tanggal *Dua Puluh Dua* bulan September tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, antara:

Nama	:	**Matheys Sibi, S.ST.Pi., M.Si**
NIP	:	197701312002121006
Jabatan	:	Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
Alamat	:	Jl. Balaikota No.1 Entrop Gd. Otonom Lat. 2 Kota Jayapura

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama	:	**Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K)**
NIP	:	196709101996031001
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin
Alamat	:	JL. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar – Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

MENGINGAT BAHWA:

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengerjakan Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura.

(2) Untuk pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada point (1) perlu dipilih, ditetapkan dan ditunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;

(3) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan melalui MoU Pemerintah Kota Jayapura, dengan Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;

(4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

(5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah dibaca dan diteliti;
   c. telah memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA dengan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat atas objek perjanjian ini, termasuk didalamnya lampiran, addendum dan perubahannya jika ada sebagai suatu satu kesatuan;

(2) **Pihak** adalah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK** adalah keduanya;

(3) **Nilai Perjanjian Kerjasama** adalah nilai untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dalam rupiah;

(4) **Pekerjaan** adalah Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura. yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat perjanjian kerjasama ini;

Pasal 2
Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** dan sanggup untuk melaksanakan Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura.

Pasal 3
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Pekerjaan

(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura
(2) Kesepakatan kerjasama antara Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura, didasari oleh Dokumen Kesepakatan Bersama antara: Pemerintah Kota Jayapura Nomor: 400.3/1/1441 dengan Unversitas Hasanuddin Makassar Nomor: 41364/UN4.1/HK.07/2025, tentang Pelaksananaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarkat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah tidak melebihi dari tanggal 20 Desember 2025.

Pasal 5
Nilai Surat perjanjian kerjasama

Total Nilai Surat perjanjian kerjasama pekerjaan penyusunan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budi daya di Kota Jayapura ini adalah sebesar **Rp. 995.717.730,- (sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).**

Pasal 6
Penilaian dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

(1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan Demplot percontohan beberapa jenis komoditas perikanan dan memberitahukan laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setelah selesai melaksanakan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budi daya di Kota Jayapura.
(2) Hasil kegiatan yang telah diselesaikan diserahterimakan sesuai volume pekerjaan yang telah disepakati.

Pasal 7
Tahapan Pembayaran

Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai berikut:

(1) Tahap I 70% dari total nilai surat perjanjian kerjasama yaitu sebesar **Rp. 697.002.411,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ribu empat ratus sebelas rupiah),** selanjutnya akan dibayarkan setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan setelah: "Dilaksanakannya Seminar Pendahuluan Kegiatan".

(2) Tahap II sebesar 30% dari total nilai surat perjanjian kerjasama **Rp. 298.715.319,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** akan dibayarkan setelah:

- Dilaksanakannya seminar awal kegiatan
- Diselenggarakannya pelatihan teknisi tenaga lapangan
- Dilaksanakannya kegiatan percontohan/pembuatan demplot di lapangan
- Dilaksanakannya Seminar Akhir Kegiatan
- Diserahkannya Laporan Akhir Kegiatan Kajian
- Diserahkannya Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan atau SPJ

Pasal 8
Sistem Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung mentransfer dana kepada **PIHAK KEDUA** dengan rekening **Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening: 0098990071, atas nama Rektor Unhas QQ Bendahara Penerima Universitas Hasanuddin BHPP.**

Pasal 9
Pajak dan Biaya Materai

Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Materai yang timbul sebagai akibat adanya surat perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dimana besaran pajak disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Kewajiban Pemberi Kerja/PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA atau diwakili oleh satuan kerja berkewajiban untuk:

(1) Memudahkan atau memfasilitasi perijinan atau persyaratan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pekerjaan terhadap Pihak Terkait;

(2) Menerbitkan atau meneruskan kepada pejabat, agen, lembaga atau perwakilan pemerintah semua permohonan sebagaimana diperlukan atau dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan yang cepat dan efektif;
(3) Memberikan keputusan atas semua laporan, rekomendasi dan masalah lain yang diatur dengan benar untuk pengambilan keputusan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang wajar sehingga tidak menunda atau mengganggu pelaksanaan pelayanan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
(4) Membayar jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai nilai Surat Perjanjian Kerjasama dan ketentuan yang berlaku serta waktu yang telah disepakati.

Pasal 11
Kewajiban Penyedia Jasa/PIHAK KEDUA

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

(1) Bersama PIHAK PERTAMA menyusun Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Penyusunan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura
(2) Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi : **Pelatihan, pembuatan demplot, pemeliharan organisme, panen, pemasaran produk dari kegiatan** Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura
(3) Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan Seminar Awal dan Seminar Akhir Penyusunan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budidaya di Kota Jayapura.

Pasal 12
Mobilisasi Personil dan Peralatan

(1) Mobilisasi meliputi mendatangkan tenaga teknis dan menyiapkan peralatan serta perlengkapan pendukung.
(2) Mobilisasi tenaga teknis serta perlengkapan pendukung dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Pasal 13
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan;
(2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan;
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan;
(2) Apabila timbul perselisihan antar **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan;
(3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri terdekat;
(4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 15
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Surat perjanjian kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan dikirimkan masing-masing dengan alamat :

PIHAK PERTAMA :
Dinas Perikanan Kota Jayapura, Jalan Balai Kota No. 1 Entrop, Gedung Otonom Lantai 2, Kota Jayapura – Provinsi Papua

PIHAK KEDUA :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Kota Makassar – Sulawesi Selatan

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan Surat perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

Pasal 16
Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Seminar Awal, Kegiatan Pelatihan dan Laporan Akhir Kegiatan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Perikanan Budi daya di Kota Jayapura kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
Keutuhan Surat Perjanjian Kerjasama

Surat perjanjian kerjasama ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan selesainya jangka waktu surat perjanjian kerjasama ini dan/atau terjadi pemutusan surat perjanjian kerjasama berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dalam surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 18
Lain-lain

Hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal surat perjanjian kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 19
Penutup

(1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sah dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak;
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, dan sisanya 1 (satu) rangkap tidak dibubuhi materai yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Matheys Sibi, S. ST.Pi.,M.Si	Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA JAYAPURA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

KAJIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN
BERBASIS KAWASAN DI KOTA JAYAPURA

Nomor : 520/210/VIII/2025
Nomor : 3543/UN4.1.7/PT.01.03/2025

Surat perjanjian kerjasama ini berikut semua lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

Nama	: Salomina Y. Fingkreuw, S.Sos
NIP	: 198009172000122001
Jabatan	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura
Alamat	: Jln. Balaikota Gedung Otonom Lantai 3, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama	: Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K)
NIP	: 196709101996031001
Jabatan	: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin
Alamat	: JL. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar – Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

MENGINGAT BAHWA:

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengerjakan Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura;
(2) Untuk pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada point (1) perlu dipilih, ditetapkan dan ditunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
(3) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan melalui MoU Pemerintah Kota Jayapura, dengan Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;

(4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
(5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah dibaca dan diteliti;
   c. telah memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA dengan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) **Perjanjian Kerjasama** adalah perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat atas objek perjanjian ini, termasuk di dalamnya lampiran, addendum dan perubahannya jika ada sebagai satu kesatuan;
(2) **Pihak** adalah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK** adalah keduanya;
(3) **Nilai Perjanjian Kerjasama** adalah nilai untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dalam rupiah;
(4) **Pekerjaan** adalah Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 2
Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** dan sanggup untuk melaksanakan Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura.

Pasal 3
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Pekerjaan

(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot.
(2) Kesepakatan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot, didasari oleh Dokumen Kesepakatan Bersama antara: Pemerintah Kota Jayapura Nomor: 400.3/1/1143 dengan Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 41364/UN4.1/HK.07/2025, tentang Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan selama 140 (seratus empat puluh) hari;
(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah tidak melebihi dari tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 5
Nilai Surat perjanjian kerjasama

Total Nilai Surat perjanjian kerjasama pekerjaan penyusunan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot ini adalah sebesar **Rp. 994.611.500,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Pasal 6
Penilaian dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

(1) **PIHAK KEDUA** melakukan Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan pembuatan Demplot komoditas pertanian tertentu dan memberitahukan laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setelah selesai melaksanakan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini.
(2) Hasil kegiatan yang telah diselesaikan diserahterimakan sesuai volume pekerjaan yang telah disepakati.

Pasal 7
Tahapan Pembayaran

Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai berikut:
(1) Tahap I 70% dari total nilai surat perjanjian kerjasama yaitu sebesar **Rp.696.228.050,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah)**, selanjutnya akan dibayarkan setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setelah dilaksanakannya Seminar Awal kegiatan.
(2) Tahap II sebesar 30% dari total nilai surat perjanjian kerjasama **Rp.298.383.450,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)** akan dibayarkan setelah diserahkannya Laporan Kegiatan Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot, dan setelah dilaksanakannya Seminar Akhir kegiatan.

Pasal 8
Sistem Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung mentransfer dana kepada **PIHAK KEDUA** dengan rekening **Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening: 0098990071, atas nama Rektor Unhas QQ Bendahara Penerima Universitas Hasanuddin BHPP.**

Pasal 9
Pajak dan Biaya Materai

Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Materai yang timbul sebagai akibat adanya surat perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dimana besaran pajak disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Kewajiban Pemberi Kerja/PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA atau diwakili oleh satuan kerja berkewajiban untuk:

(1) Memudahkan atau memfasilitasi perijinan atau persyaratan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pekerjaan terhadap Pihak Terkait;
(2) Menerbitkan atau meneruskan kepada pejabat, agen, lembaga atau perwakilan pemerintah semua permohonan sebagaimana diperlukan atau dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan yang cepat dan efektif;
(3) Memberikan keputusan atas semua laporan, rekomendasi dan masalah lain yang diatur dengan benar untuk pengambilan keputusan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang wajar sehingga tidak menunda atau mengganggu pelaksanaan pelayanan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**;
(4) Membayar jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai nilai Surat Perjanjian Kerjasama dan ketentuan yang berlaku serta waktu yang telah disepakati.

Pasal 11
Kewajiban Penyedia Jasa/PIHAK KEDUA

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

(1) Bersama **PIHAK PERTAMA** menyusun Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Penyusunan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot.
(2) Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan pembuatan Demplot.
(3) Bersama PIHAK PERTAMA melaksanakan Seminar Awal dan Seminar Akhir Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan pembuatan Demplot.

Pasal 12
Mobilisasi Personil dan Peralatan

(1) Mobilisasi meliputi mendatangkan tenaga teknis dan menyiapkan peralatan serta perlengkapan pendukung.
(2) Mobilisasi tenaga teknis serta perlengkapan pendukung dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

Pasal 13
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan;
(2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan;
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan;
(2) Apabila timbul perselisihan antar **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan;
(3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri terdekat;
(4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 15
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Surat perjanjian kerjasama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan dikirimkan masing-masing dengan alamat :

PIHAK PERTAMA :
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura: Jln. Balaikota Gedung Otonom Lantai 3 Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

PIHAK KEDUA :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin: Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Kota Makassar – Sulawesi Selatan

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan Surat perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

Pasal 16
Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan sesuai Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini meliputi Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura dan Pembuatan Demplot kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17
Keutuhan Surat Perjanjian Kerjasama

Surat perjanjian kerjasama ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini sampai dengan selesainya jangka waktu surat perjanjian kerjasama ini dan/atau terjadi pemutusan surat perjanjian kerjasama berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dalam surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 18
Lain-lain

Hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal surat perjanjian kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 19
Penutup

(1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sah dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak;
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, dan sisanya 1 (satu) rangkap tidak dibubuhi materai yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Salomina Y. Fingkreuw, S.Sos	**Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.MK(K)**
NIP. 198009172000122001	**NIP. 196709101996031001**

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/307/ TAHUN 2025

TENTANG

HARGA ACUAN PENJUALAN DI KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program kerja pengendalian inflasi daerah di Wilayah Kota Jayapura, maka diperlukan stabilisasi dan mengurangi disparitas harga melalui 4 (empat) pilar keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Harga Acuan Penjualan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negeara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Thun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;

8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Acuan Penjualan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Harga acuan atau harga kelayakan di setiap distrik untuk jenis komoditas yaitu Cabai Merah, Cabai Rawit, Ikan Tuna, Ikan Cakalang dan Ikan Tongkol.

KETIGA :...../3

KETIGA : Harga acuan yang dimaksud diktum KEDUA yaitu :

a. mencakup harga terendah dan harga tertinggi jenis komoditas penyumbang inflasi di Kota Jayapura; dan
b. menjadi arahan tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura untuk mengendalikan secara lisan dan atau tertulis, jika suatu waktu harga di pasar tradisional melampaui harga tertinggi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA OPD terkait dalam lingkup Kota Jayapura yang berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi daerah Kota Jayapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Juli 2024

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP.19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/63/ TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SUBSIDI PERTANIAN PASAR MURAH DAN PENETAPAN NILAI SUBSIDI KOMODITAS PERTANIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura pada Tahun 2025 maka perlu menyediakan bantuan subsidi komoditas pertanian melalui Kegiatan Pasar Murah di Kota Jayapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Penerima Bantuan Subsidi Pertanian Pasar Murah dan Penetapan Nilai Subsidi Komoditas Pertanian dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014 dan 2015;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024;

11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :...../3

LAMPIRAN I : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/63/ Tahun 2025
Tanggal : 14 Februari 2025

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SUBSIDI PERTANIAN PASAR MURAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA/ KELOMPOK TANI	NO KTP	JENIS BARANG YANG DISUBSIDI	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	NURJANAH/KELOMPOK TANI SWAKARSA MANDIRI	9171044704800001	1. CABE RAWIT/KERITING 2. BAWANG MERAH 3. BAWANG PUTIH 4. TOMAT	SWAKARSA KM IX KELURAHAN KOYA BARAT, DISTRIK MUARATAMI
2	BAMBANG RIANTO/KELOMPOK TANI MAJU JAYA	9171042109850001	1. CABE RAWIT/KERITING 2. BAWANG MERAH 3. BAWANG PUTIH 4. TOMAT	JL.DEMBA KELURAHAN KOYA BARAT DISTRIK MUARA TAMI
3	RIMI/KELOMPOK TANI TANI MAKMUR	9171031401690004	1. CABE RAWIT/KERITING 2. BAWANG MERAH 3. BAWANG PUTIH 4. TOMAT	HOLTEKAMP DISTRIK ABEPURA
4	ISAK KOREY/PT.MULTI NUSA AGRO	9103013103830003	1. DAGING AYAM RAS LOKAL 2. TELUR AYAM RAS LOKAL	KELURAHAN KOYA TIMUR, DISTRIK MUARATAMI
5	ERWIN SISWANTO	9171052107760002	1. DAGING SAPI	KELURAHAN WAY MHOROCK, DISTRIK ABEPURA

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN II : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/63/ Tahun 2025
Tanggal : 14 Februari 2025

NILAI SUBSIDI KOMODITAS PERTANIAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KOMODITAS	JUMLAH	NILAI SUBSIDI (RP)	TOTAL SUBSIDI (RP)
1	2	3	4	5
1.	CABAI	2800 kg	28.000	78.400.000,-
2.	BAWANG MERAH	3000 kg	21.000	63.000.000,-
3.	BAWANG PUTIH	2800 kg	11.000	30.800.000
4.	TOMAT	2040 kg	5000	10.200.000
5.	TELUR AYAM RAS LOKAL	7200 Rak	25.000	180.000.000,-
6.	DAGING AYAM RAS LOKAL	1100 kg	23.000	25.300.000
7.	DAGING SAPI	300 kg	33.000	9.900.000

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Subsidi Pertanian Pasar Murah dan Penetapan Nilai Subsidi Komoditas Pertanian dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Subsidi Pertanian Pasar Murah adalah komoditas pertanian yang mendukung kenaikan inflasi meliputi :
a. bawang merah;
b. bawang putih;
c. tomat;
d. telur ayam ras;
e. daging ayam ras; dan
f. daging sapi.

KETIGA : Penerima Subsidi Komoditas pertanian yang mendukung kenaikan inflasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan melalui pasar murah.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 14 Februari 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/267/ TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT/PETANI PENERIMA BANTUAN OBAT-OBATAN PLASTIK MULSA DAN MESIN COMBINE MINI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanan program dan kegiatan kepada masyarakat petani guna meningkatkan hasil dan efektifitas produk pertanian, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura menyediakan bantuan kepada masyarakat petani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Kelompok Masyarakat/ Petani Penerima Bantuan Obat-Obatan Plastik Mulsa dan Mesin Combine Mini Pertanian di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Masyarakat/ Petani Penerima Bantuan Obat-Obatan Plastik Mulsa dan Mesin Combine Mini Pertanian di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, Nomor DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.00/001/2025 Tanggal 28 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Mei 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/267/ Tahun 2025
Tanggal : 26 Mei 2025

KELOMPOK MASYARAKAT/PETANI PENERIMA BANTUAN OBAT-OBATAN PLASTIK MULSA DAN MESIN COMBINE MINI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kelompok Tani	Alamat Lokasi		Jenis Paket	Jumlah/ Target		Ket.
		Distrik	Kampung/ Kelurahan		Jml/ Satuan	Luas/ (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harapan Baru	Muara Tami	Kampung Skouw Mabo	~ Gramaxxon ~ Dangke (Bubuk) ~ Score ~ Leili ~ Plastik Mulsa	Botol Bungkus Botol Botol Roll	1/4	Poktan Tanaman Cabe
2	Rukun Makmur	Muara Tami	Koya Barat	~ Sapporo ~ Score ~ Mesin Combine Mini Harvester	Botol Botol Unit	5	Poktan Tanaman Padi
3	Schito	Muara Tami	Kampung Skouw Mabo	~ Gramaxxon ~ Dangke (Bubuk) ~ Score ~ Leili ~ Plastik Mulsa	Botol Bungkus Botol Botol Roll	1/4	Poktan Tanaman Cabe

4	Swakarsa Mandiri	Muara Tami	Swakarsa	~ Gramaxxon ~ Dangke (Bubuk) ~ Score ~ Leili ~ Plastik Mulsa	Botol Bungkus Botol Botol Roll	1	Poktan Tanaman Tomat
5	Maju Jaya	Muara Tami	Koya Barat	~ Gramaxxon ~ Dangke (Bubuk) ~ Score ~ Leili ~ Plastik Mulsa		1	Poktan Tanaman Cabe dan Tomat
6	Tani Mandiri	Holtekam	Muara Tami	~ Gramaxxon ~ Dangke (Bubuk) ~ Score ~ Leili ~ Plastik Mulsa	Botol Bungkus Botol Botol Roll	1/4	Poktan Tanaman Cabe dan Tomat

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/234/ TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT/PETANI PENERIMA BANTUAN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanan program dan kegiatan bagi masyarakat petani guna meningkatkan hasil dan efektifitas produk pertanian, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura menyediakan bantuan kepada masyarakat petani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Kelompok Masyarakat/Petani Penerima Bantuan Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan...../3

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Masyarakat/Petani Penerima Bantuan Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, Nomor DPPA/A.2/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2025 Tanggal 20 April 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 Mei 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/234/ Tahun 2025
Tanggal : 9 Mei 2025

NAMA-NAMA KELOMPOK MASYARAKAT/PETANI PENERIMA BANTUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama dan Status Kelompok		Nama Anggota	Alamat		Jenis dan Volume Paket Hibah			Ket
	Nama	Status		Distrik	Kampung/ Kelurahan	Jenis Paket	Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KP2L Rumbit	Penum- buhan	- Beatrix Abidondfu - Linda H Yom - Fonny A Rumbay - Yeta Waromi - Adolfina T Dori - Elisabet Tokoro - Vera D Sawaki - Natasia Mandagie - Ridwan Tuharea - Yustus Daisiu	Jayapura Selatan	Hamadi	- Rumah Bibit - Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit - Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat - Baju Lengan Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor	1 5 5 5 5 5 13 4 15 2 2 20	Unit Bks Bks Bks Bks Bks Pcs Buah Buah Buah Buah Kg	

						- Polibag	20	Meter	
						- Selang Air	20	Botol	
						- Pupuk Cair		Zak	
						- Pupuk Kandang	20	Karung	
						- Sekam Padi	20	Buah	
						- Sekop kecil	2	Buah	
						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah	
						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah	
						- Parang	2	Buah	
						- Tanah Humus	2	Ret	
2	KP2L Skyline Kurnia;	Penum- buhan	- Fanny Sada - Silviana Kerirem - Rosita Rumaropen - Wa Saida - Wa Laluna - Samsiah - Diana Rumanasem - Sara Ronsumbre - Yolanda Yumalena - Maria Wakum - Maria Kbarek - Mia Yakarimilena	Jayapura Selatan	Entrop	- Rumah Bibit	1	Unit	
						- Bibit Bayam	5	Bks	
						- Bibit Cabe Rawit	5	Bks	
						- Bibit Kangkung	5	Bks	
						- Bibit Sawi	5	Bks	
						- Bibit Tomat	5	Bks	
						- Baju Lengan Pendek	13	Pcs	
						- Balok Kayu 5x5	4	Buah	
						- Papan Kayu	15	Buah	
						- Keranjang Sayur	2	Buah	
						- Gembor	2	Buah	
						- Polibag	20	Kg	
						- Selang Air	20	Meter	
						- Pupuk Cair	20	Botol	
						- Pupuk Kandang	20	Zak	
						- Sekam Padi	20	Karung	
						- Sekop kecil	2	Buah	

						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah	
						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah	
						- Parang	2	Buah	
						- Tanah Humus	2	Ret	
3	KP2L Tabur Tuai	Penum-buhan	- Margaretha Rumbewas - Teus Wouw - Genbik Wouw - Paulus Wouw - Andaerson Fakdawer - Paulina Rumbewas - Agnes Kawde - Falentin L Rarawi - Jein Rumbewas	Jayapura Selatan	Entrop	- Rumah Bibit	1	Unit	
						- Bibit Bayam	5	Bks	
						- Bibit Cabe Rawit	5	Bks	
						- Bibit Kangkung	5	Bks	
						- Bibit Sawi	5	Bks	
						- Bibit Tomat	5	Bks	
						- Baju Lengan Pendek	13	Pcs	
						- Balok Kayu 5x5	4	Buah	
						- Papan Kayu	15	Buah	
						- Keranjang Sayur	2	Buah	
						- Gembor	2	Buah	
						- Polibag	20	Kg	
						- Selang Air	20	Meter	
						- Pupuk Cair	20	Botol	
						- Pupuk Kandang	20	Zak	
						- Sekam Padi	20	Karung	
						- Sekop kecil	2	Buah	
						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah	
						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah	
						- Parang	2	Buah	
						- Tanah Humus	2	Ret	

4	KP2L Benteng Mas	Penum-buhan	- Maikel Ick - Ramses Asmuruf - Decy Ick - Since Ick - Adam Yaam - Irene Saud - Joni Turot - Helena Kocu - Magda Way - Merry Atanay	Heram	Yabansai	- Rumah Bibit - Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat - Baju Lengan Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor - Polibag - Selang Air - Pupuk Cair - Pupuk Kandang - Sekam Padi - Sekop kecil - Garpu / Cangkul Mini - Garuk-garuk Sampah - Parang - Tanah Humus	1 5 5 5 5 5 13 4 15 2 2 20 20 20 20 20 2 2 1 2 2	Unit Bks Bks Bks Bks Bks Pcs Buah Buah Buah Buah Kg Meter Botol Zak Karung Buah Buah Buah Buah Ret	
5	KWT Sion Padang Bulan	Pengem-bangan	- Ibu C Tanto - Agnes Ohodo - Yohana Suebu - Denok Armatha - Maria sada	Heram	Hedam	- Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat	5 5 5 5 5	Bks Bks Bks Bks Bks	

			- Deby Amansaman - Aca Pulalo - Henny Karma - Johana Deda - Sara Mayor			- Baju Lengan Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor - Polibag - Selang Air - Pupuk Cair - Pupuk Kandang - Sekam Padi - Sekop kecil - Garpu / Cangkul Mini - Garuk-garuk Sampah - Parang - Tanah Humus	13 4 15 2 2 20 20 20 20 20 2 2 1 2 2	Pcs Buah Buah Buah Buah Kg Meter Botol Zak Karung Buah Buah Buah Buah Ret	
6	TP.PKK Tanjung Ria	Pengembangan	-Mardiana Erni -Yohana Damers -Felisa Pasey -Fransina Masbawer -Hamdana Hatta -Milka Dadeduku -Yuliana Korwa -Hermelina Ayomi - Ana Rumatobi	Jayapura Utara	Tanjung Ria	- Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat - Baju Lengan Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor - Polibag	5 5 5 5 5 13 4 15 2 2 20	Bks Bks Bks Bks Bks Pcs Buah Buah Buah Buah Kg	

						- Selang Air	20	Meter	
						- Pupuk Cair	20	Botol	
						- Pupuk Kandang	20	Zak	
						- Sekam Padi	20	Karung	
						- Sekop kecil	2	Buah	
						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah	
						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah	
						- Parang	2	Buah	
						- Tanah Humus	2	Ret	
7	Klp Wanita Tani How Hena	Pengembangan	-Paradesiana Makanuay -Hilda Makanuay -David Maintindom -Aldiitha Makanuay -Petra Yopo -Ana Puy -Amelia Samay -Janet Sawor -Frans Puy -Getrida Yakadewa	Jayapura utara	Kayu Batu	- Bibit Bayam	5	Bks	
						- Bibit Cabe Rawit	5	Bks	
						- Bibit Kangkung	5	Bks	
						- Bibit Sawi	5	Bks	
						- Bibit Tomat	5	Bks	
						- Baju Lengan Pendek	13	Pcs	
						- Balok Kayu 5x5	4	Buah	
						- Papan Kayu	15	Buah	
						- Keranjang Sayur	2	Buah	
						- Gembor	2	Buah	
						- Polibag	20	Kg	
						- Selang Air	20	Meter	
						- Pupuk Cair	20	Botol	
						- Pupuk Kandang	20	Zak	
						- Sekam Padi	20	Karung	
						- Sekop kecil	2	Buah	
						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah	

						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah
						- Parang	2	Buah
						- Tanah Humus	2	Ret
8	Klp Wanita Tani Mawar	Pengembangan	-Margaretha iek -Anita.Boseren -Marety.Oropa -Monika.Maran -Dina.Aba -Cicilia .Aba -Cornelia.Itar -Milka.Boseren -Beatrix.Oropa -Bertha.Wugate	Abepura	Way-mhorok	- Bibit Bayam	5	Bks
						- Bibit Cabe Rawit	5	Bks
						- Bibit Kangkung	5	Bks
						- Bibit Sawi	5	Bks
						- Bibit Tomat	5	Bks
						- Baju Lengan Pendek	13	Pcs
						- Balok Kayu 5x5	4	Buah
						- Papan Kayu	15	Buah
						- Keranjang Sayur	2	Buah
						- Gembor	2	Buah
						- Polibag	20	Kg
						- Selang Air	20	Meter
						- Pupuk Cair	20	Botol
						- Pupuk Kandang	20	Zak
						- Sekam Padi	20	Karung
						- Sekop kecil	2	Buah
						- Garpu / Cangkul Mini	2	Buah
						- Garuk-garuk Sampah	1	Buah
						- Parang	2	Buah
						- Tanah Humus	2	Ret

9	TP.PKK Abepantai	Pengembangan	-Susana Merahabia -Hasna -Blandina Wamiaw -Haji Dasmawati -Dortina Merahabia -Siti Wahyuningsih -Susana Ronsumbre -Haji Ai Cici Amin -Hadija -Wasiani	Abepura	Abepantai	- Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat - Baju Lengan Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor - Polibag - Selang Air - Pupuk Cair - Pupuk Kandang - Sekam Padi - Sekop kecil - Garpu / Cangkul Mini - Garuk-garuk Sampah - Parang - Tanah Humus	5 5 5 5 5 13 4 15 2 2 20 20 20 20 20 2 2 1 2 2	Bks Bks Bks Bks Bks Pcs Buah Buah Buah Buah Kg Meter Botol Zak Karung Buah Buah Buah Buah Ret	
10	Dasawisma Holt	Pengembangan	-Sopphia S Samay -Mince Drunyi -marice Waromi -Bety Bebe -Dina Waromi -Marice Samalo	Muara Tami	Holtekam	- Bibit Bayam - Bibit Cabe Rawit - Bibit Kangkung - Bibit Sawi - Bibit Tomat - Baju Lengan	5 5 5 5 5 13	Bks Bks Bks Bks Bks Pcs	

			-Susi Latumahina -Oktofona Mambor -Martina Hababuk -Albert Mambor			Pendek - Balok Kayu 5x5 - Papan Kayu - Keranjang Sayur - Gembor - Polibag - Selang Air - Pupuk Cair - Pupuk Kandang - Sekam Padi - Sekop kecil - Garpu / Cangkul Mini - Garuk-garuk Sampah - Parang - Tanah Humus	 4 15 2 2 20 20 20 20 20 2 2 1 2 2	 Buah Buah Buah Buah Kg Meter Botol Zak Karung Buah Buah Buah Ret	

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/402/ TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT PETANI PENERIMA BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK AYAM BROILER DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat petani guna meningkatkan hasil dan efektifitas produksi Peternakan, maka di Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah menyediakan bantuan kepada masyarakat petani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Kelompok Masyarakat Petani Penerima Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Ayam Broiler di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Peraturan...../3

4. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Masyarakat Petani Penerima Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Ayam Broiler di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dan Nomor DPPA SKPD : DPPA/A.1/2.09.3.27.0.00.02.0000/001/2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 November 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19710505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/402/ Tahun 2025
Tanggal : 4 November 2025

KELOMPOK MASYARAKAT PETANI PENERIMA BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK AYAM BROILER D1 WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KELOMPOK	SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA	JENIS BARANG	VOLUME	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1.	MAJU BERSAMA	Ketua : SAMUEL ROLLO Sekretaris : BERTINCE MEMBILONG Bendahara : BERNIKE LOMO Anggota : 1. TINOFEL ROLLO 2. DORIS DOLEN 3. ESTER LANTA 4. DEDI DASARONA 5. HENDRA BUDIKASI 6. LINDA ROLLO 7. ABNER GIAY 8. JEMI DOLEN	AYAM BROILER PAKAN VITAMIN	4000 EKOR 5294 KG 76 BOTOL	KAMPUNG SKOUW SAE

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19[illegible]0805 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/340/ TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga sebelas bahan pokok di Kota Jayapura diperlukan langkah cepat, tepat, fokus terpadu dan sinergis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis, maka perlu adanya satuan Tugas Ketahanan Pangan, Kota Jayapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negeara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Thun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 292);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

12. Undang-Undang...../3

12. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggara Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

13. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. patroli dan inpeksi di titik distribusi seperti pelabuhan, pasar, gudang, hingga toko.
b. pemantauan terhadap aktivitas distribusi barang-barang yang berpotensi ilegal (misalnya tekstil, makanan, baja, elektronik, dll.
c. penyusunan laporan dan rekomedasi penindakan hukum terhadap pelanggaran.
d. barang tanpa label resmi (misalnya tidak mencantumkan SNI, tidak ada label halal, atau tanpa izin edar BPOM)
e. barang ilegal yang merugikan penerimaan negara, seperti rokok tanpa cukai atau elektornik tanpa pajak.
f. pakaian bekas impor (thrifting) yang dilarang sesuai peraturan nasional.
g. edukasi barang legal kepada pedagang untuk menjual barang yang legal bagi masyarakat. dan
h. bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Jayapura.

KETIGA :...../4

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-OPD/KOTA-JPR/2025 Bappeda Kota Jayapura Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Agustus 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/340/ Tahun 2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALIKOTA JAYAPURA	PENGARAH
2	PLT. SEKRETARIS DAERAH	KETUA
3	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA	SEKRETARIS
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
5	KAPOLRESTA KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
6	KEPALA KANTOR BEA CUKAI JAYAPURA	ANGGOTA
7	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
8	KEPALA KANTOR BULOG KANWIL PAPUA DAN PAPUA BARAT	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
10	INSPEKTUR KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
11	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
12	KABID KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
13	KABID PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
14	KABID EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPURA	ANGGOTA
15	KASUBBID INDAGSI DITRES KRIMSUS POLDA PAPUA	ANGGOTA

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/368/ TAHUN 2025

TENTANG

NELAYAN DI DISTRIK ABEPURA – KAMPUNG NAFRI PENERIMA BANTUAN HIBAH PERAHU TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Walikota Tahun 2025-2030 serta program prioritas peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, maka diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah dalam penyediaan bantuan produksi perikanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan Bantuan Hibah Perahu untuk Nelayan di Distrik Abepura - Kampung Nafri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Nelayan di Distrik Abepura – Kampung Nafri Penerima Bantuan Hibah Perahu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2507);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang–Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang ...../3

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

19 Peraturan ...../4

19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nelayan di Distrik Abepura – Kampung Nafri Penerima Bantuan Hibah Perahu Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2025 Nomor : 3.25.0.00.0.00.02.00/DPA-OPD/KOTA-JPR/2025 Tanggal 16 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 4 September 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/368 / Tahun 2025
Tanggal : 4 September 2025

NELAYAN DI DISTRIK ABEPURA - KAMPUNG NAFRI PENERIMA BANTUAN HIBAH PERAHU TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan Hibah	Keterangan
			PERAHU	
1	2	3	4	5
1	ALBERTH FINGKREUW	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
2	AMSAL AWI	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
3	FREDERIK HENDRIK TANIAU	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
4	INO DONATUS KLAU	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
5	HERMAN SINERI	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
6	JEMMY MERAHABIA	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
7	LAMEK HANASBEY	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
8	LAZARUS MERAHABIA	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
9	MARKUS KORWA	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
10	MIKA DEMAS INFANDI	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
11	PAULUS SUEBU	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
12	YULIUS AWI NERO	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP
13	ZET SREM SREM	KAMPUNG NAFRI - DISTRIK ABEPURA	1 Unit	NELAYAN OAP

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/388/ TAHUN 2025

TENTANG

NELAYAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN, ABEPURA DAN MUARA TAMI PADA KAMPUNG TAHIMA SOROMA, KAMPUNG ENGGROS DAN KAMPUNG SKOUW PENERIMA BANTUAN HIBAH MOTOR TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Walikota Jayapura Tahun 2025-2030 serta program prioritas peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, maka diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah dalam penyediaan bantuan produksi perikanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan Bantuan Hibah Motor Tempel di Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami (Kampung Tahima Soroma, Kampung Enggros dan Kampung Skouw);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Nelayan Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami pada Kampung Tahima Soroma, Kampung Enggros dan Kampung Skouw Penerima Bantuan Hibah Motor Tempel Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2507);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang–Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang ...../3

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

20. Peraturan ...../4

20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nelayan Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami Pada Kampung Tahima Soroma, Kampung Enggros dan Kampung Skouw Penerima Bantuan Hibah Motor Tempel Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura, DPA-SKPD Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2025 Nomor : 3.25.0.00.0.00.02.00/DPA-OPD/KOTA-JPR/2025 Tanggal 16 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 7 Oktober 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/388/ Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

NELAYAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN, ABEPURA DAN MUARA TAMI PADA KAMPUNG TAHIMA SOROMA, KAMPUNG ENGGROS DAN KAMPUNG SKOUW PENERIMA BANTUAN HIBAH MOTOR TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan Hibah Motor Tempel 15 PK	Keterangan
1	2	3	4	5
1	AGUSTINUS IMBIRI	Hamadi Belakang Pasar	1 Unit	NELAYAN OAP
2	FRANS HANASBEY	Kampung Tahima Soroma	1 Unit	NELAYAN OAP
3	HENOCK MERAUDJE	Kampung Enggros, RT.003/RW.001	1 Unit	NELAYAN OAP
4	HERMAN SPEINER MUTANG	Kampung Skouw Sae	1 Unit	NELAYAN OAP
5	JIMMY CAKER NUMBERI	Hamadi Belakang Pasar	1 Unit	NELAYAN OAP
6	KORNELES WAROMI	Hamadi Belakang Pasar	1 Unit	NELAYAN OAP
7	LEO RUMBEWAS	Hamadi, Jl Sawi RT.002/RW.004	1 Unit	NELAYAN OAP
8	MAXI SIBI	Kampung Tahima Soroma	1 Unit	NELAYAN OAP
9	MAURITS BONAY	Hamadi Belakang Pasar	1 Unit	NELAYAN OAP
10	TERRIX HAAY	Kampung Tobati	1 Unit	NELAYAN OAP
11	SASKAR LOMO	Kampung Skouw Sae	1 Unit	NELAYAN OAP
12	SIMON MERAUDJE	Kampung Enggros, RT.002/RW.001	1 Unit	NELAYAN OAP
13	VIKTOR HANASBEY	Kampung Enggros, RT.002/RW.001	1 Unit	NELAYAN OAP

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/389/ TAHUN 2025

TENTANG

MASYARAKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN PENERIMA HIBAH SARANA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU/LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Visi Misi Walikota Jayapura Tahun 2025-2030 serta melaksanakan program prioritas peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, maka diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah dalam penyediaan bantuan produksi perikanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan Bantuan Hibah Sarana Budidaya Ikan Air Payau/Laut di Distrik Jayapura Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Masyarakat Distrik Jayapura Selatan Penerima Hibah Sarana Budidaya Ikan Air Payau/Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2507);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang–Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Undang-Undang ...../3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan ...../4

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);
19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masyarakat Distrik Jayapura Selatan Penerima Hibah Sarana Budidaya Ikan Air Payau/Laut Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2025 Nomor :3.25.0.00.0.00.02/DPA-OPD/KOTA-JPR/2025 Tanggal 16 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 7 Oktober 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/389 / Tahun 2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

MASYARAKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN PENERIMA HIBAH SARANA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU/LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Alamat	JENIS BANTUAN			Keterangan
			BENIH (Ekor)	PAKAN (Karung)	Waring Penampung Ikan (Unit)	
1	2	3	4	5	6	7
1	EDO HAMADI	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
2	FEKY HAAY	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
3	HARIANSI HABABUK	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
4	MOSES SIBI	Kampung Tahima Soroma	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
5	MAIKEL HAAY	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
6	NEHEMIA HAAY	Kampung Tahima Soroma	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
7	NIKO HAMADI	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
8	SANDRA SIBI	Kampung Tahima Soroma	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
9	WELLLEM HAAY	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
10	YAN PEPUHO	Kampung Tobati	1.000	5	2	Pembudidaya OAP
	Total		10.000	50	20	

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/255/ TAHUN 2025

TENTANG

MASYARAKAT KAMPUNG ENGGROS DISTRIK ABEPURA
PENERIMA BANTUAN HIBAH *FISH APARTEMEN ATTRACTIVE*
(RUMAH IKAN) TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan daerah di sektor kelautan dan perikanan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah dalam penyediaan bantuan sarana dan prasarana perikanan;

b. untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2025 menyediakan Bantuan Hibah *Fish Apartement Atractive* di Distrik Abepura - Kampung Enggros);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Masyarakat Kampung Enggros Distrik Abepura Penerima Bantuan Hibah *Fish Apartemen Attractive* (Rumah Ikan) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2507);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang–Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang ...../3

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

20. Peraturan ...../4

20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masyarakat Kampung Enggros Distrik Abepura Penerima Bantuan Hibah *Fish Apartemen Attractive* (Rumah Ikan) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura, DPA-SKPD Dinas Perikanan Kota Jayapura Tahun 2025 Nomor : 3.25.0.00.0.00.02.00/DPA-OPD/KOTA-JPR/2025 Tanggal 16 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Mei 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/255 / Tahun 2025
Tanggal : 16 Mei 2025

MASYARAKAT KAMPUNG ENGGROS DISTRIK ABEPURAPENERIMA BANTUAN HIBAH *FISH APARTEMEN ATTRACTIVE* (RUMAH IKAN) TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan Hibah	Keterangan
			Fish Apartement (Rumah Ikan)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ELLY HAAY	RW.004/RT.001 KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP
2	MAIKEL HABABUK	RW.004/RT.001KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP
3	MARTHINUS HABABUK	RW.004/RT.001 KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP
4	MELKIANUS MERAUJE	RW.004/RT.001 KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP
5	PAULUS HABABUK	RW.004/RT.001 KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP
6	SEPTER HABABUK	RW.004/RT.006 KAMPUNG ENGGROS – DISTRIK ABEPURA	5 Unit	NELAYAN OAP

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/256/ TAHUN 2025

TENTANG

ORANG ASLI PAPUA PENERIMA HIBAH BANGUNAN BANGSAL PENGOLAHAN IKAN DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan khususnya Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Jayapura, maka diperlukan dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah berupa pengadaan bangunan bangsal pengolahan Ikan (Ikan asap) bagi pelaku usaha pengolah hasil perikanan di Kota Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2025, menyediakan Bantuan hibah pengadaan bangunan bangsal pengolahan ikan bagi pelaku usaha pengolah hasil perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Orang Asli Papua Penerima Hibah Bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten–Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2507);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);

3. Undang–Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang ...../3

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

19. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

20. Peraturan ...../4

20. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Orang Asli Papua Penerima Hibah Bangunan Bangsal Pengolahan Ikan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura (DPA SKPD), Tahun Anggaran 2025 SKPD Dinas Perikanan Kota Jayapura Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.02.0000/2025 Nomor kegiatan 3.25.06.2.03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Mei 2025

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLINA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP.19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/256/ Tahun 2025
Tanggal : 16 Mei 2025

ORANG ASLI PAPUA PENERIMA HIBAH BANGUNAN BANGSAL PENGOLAHAN IKAN DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENGOLAH	ALAMAT	ALAMAT USAHA	SUKU			JENIS BANTUAN
				PAPUA	PORT NUMBAY	JENIS USAHA	BANGUNAN BANGSAL PENGOLAHAN IKAN ASAP (Unit)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Paulins Imbiri	Hamadi Pantai RT 003/RW 003 Kel. Hamadi Jayapura Selatan	Hamadi Pantaii RT 003/RW 003 Kel. Hamadi Jayapura Selatan	Papua		Pengolah Ikan Asap	1
2	Merce Maniani	Hamadi Pantai RT 003/RW 003 Kel. Hamadi Jayapura Selatan	Hamadi Pantaii RT 003/RW 003 Kel. Hamadi Jayapura Selatan	Papua		Pengolah Ikan Asap	1
JUMLAH (Unit)							1

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/111/ TAHUN 2025

TENTANG

SEPULUH KAMPUNG ADAT PENERIMA BANTUAN HIBAH PANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INTERVENSI KERAWANAN PANGAN DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kota Jayapura dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan, maka perlu menetapkan hibah pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Sepuluh Kampung Adat Penerima Bantuan Hibah Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Intervensi Kerawanan Pangan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan...../3

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sepuluh Kampung Adat Penerima Bantuan Hibah Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Intervensi Kerawanan Pangan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, Nomor : DPA/A.1.2.09.327.0.00.02.0000/001/2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 14 April 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/111/ Tahun 2025
Tanggal : 14 April 2025

NAMA-NAMA SEPULUH KAMPUNG ADAT PENERIMA BANTUAN HIBAH PANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INTERVENSI KERAWANAN PANGAN DI KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kampung	Alamat Lokasi		Jenis Paket	Volume / Target		Ket
		Kampung	Kampung		Jml/ Satuan	Jumlah (KK)	
1	*4*	*5*	*6*	*10*			
1	Skouw Sae	Muara Tami	Kampung Skouw Sae	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
2	Skouw Mabo	Muara Tami	Kampung Skouw Mabo	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
3	Skouw Yambe	Muara Tami	Kampung Skouw Yambe	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	

4	Nafri	Abepura	Kampung Nafri	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
5	Tahima Soroma	Jayapura Selatan	Kampung Kayupulo	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
6	Waena	Heram	Kampung Waena	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
7	Yoka	Heram	Kampung Yoka	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
8	Enggros	Abepura	Kampung enggros	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	

9	Tobati	Jayapura Selatan	Kampung Tobati	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	
10	Kayu Batu	Jayapura Utara	Kampung Kayu Batu	- Garam Beryodium - Gula Pasir (1 Kg) - Ikan Sarden - Kornet - Telur Ayam - Sagu - Beras 10 Kg	2 Bks 2 Bks 1Kaleng 2 Kaleng 1Rak 2 Bks 1 Pack	100 KK	

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/287/ TAHUN 2025

TENTANG

KOPERASI PENERIMA BANTUAN HIBAH SEMBAKO DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan usaha koperasi di Kota Jayapura perlu adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa bantuan Hibah Sembako;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Koperasi Penerima Bantuan Hibah Sembako di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

10. Peraturan..../3

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Penerima Bantuan Hibah Sembako di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 Nomor 3-31.01.000 Tanggal 10 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Juni 2025
WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlun

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/287/ Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

NAMA-NAMA KOPERASI PENERIMA BANTUAN HIBAH SEMBAKO
KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT		JENIS BANTUAN
		KELURAHAN/ KAMPUNG	DISTRIK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KOPERASI PELANGI KASIH VIADOLOROSA	TOBATI	ABEPURA	SEMBAKO
2	KOPERASI THOMAS GKI ABARA INJROS	ENGROS	ABEPURA	SEMBAKO
3	KOPERASI PETRA NAFRI ONOMI	NAFRI	MUARA TAMI	SEMBAKO
4	KOPERASI GETSEMANI	HOLTEKAMP	MUARA TAMI	SEMBAKO
5	KOPERASI HU PALANG ALING	SKOUW YAMBE	MUARA TAMI	SEMBAKO

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/290/ TAHUN 2025

TENTANG

KOPERASI PENERIMA BANTUAN HIBAH BANGUNAN TPK, SEMBAKO DAN MEUBELER DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan usaha koperasi di Kota Jayapura perlu adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa bantuan Hibah Bangunan TPK Sembako dan Meubeler;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Koperasi Penerima Bantuan Hibah Bangunan TPK, Sembako dan Meubeler di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

10. Perturan..../3

10. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

11. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Penerima Bantuan Hibah Bangunan TPK, Sembako dan Meubeler di Wilayah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 Nomor 3-31.01.000 Tanggal 09 Januari 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 16 Juni 2025
WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
4. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/290/ Tahun 2025
Tanggal : 16 Juni 2025

NAMA-NAMA KOPERASI PENERIMA BANTUAN HIBAH BANGUNAN TPK, SEMBAKO DAN MEUBELER DI WILAYAH KOTA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT		JENIS BANTUAN	KET
		KELURAHAN/KAMPUNG	DISTRIK		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	KOPERASI KONSUMEN PETANI SUMBER REJEKI	KELURAHAN KOYA TIMUR	MUARA TAMI	BANGUNAN	1 UNIT
2	KOPERASI KONSUMEN PETANI SUMBER REJEKI	KELURAHAN KOYA TIMUR	MUARA TAMI	SEMBAKO	11 ITEM
3	KOPERASI KONSUMEN PETANI SUMBER REJEKI	KELURAHAN KOYA TIMUR	MUARA TAMI	MEUBELAIR 1. MEJA ½ BIRO 2. KURSI KAYU 3. SHOWCASE 4. LEMARI ETALASE 5. RAK BARANG	 1 BUAH 2 BUAH 1 BUAH 2 BUAH 2 BUAH
4	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA SILOAM WAENA	KELURAHAN YABANSAI	HERAM	MEUBELAIR 1. RAK BARANG 2. KURSI KAYU 3. LEMARI ETALASE	 1 BUAH 1 BUAH 1 BUAH

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

WALIKOTA JAYAPURA

INSTRUKSI WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN JAM LAYANAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA,

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kenyamanan dalam kelancaran lalu lintas di Kota Jayapura, perlu diatur jam operasional pelayanan Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi di Stasiun Pengisian bahan Bakar Minyak (SPBU) untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Jayapura, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Pengelola SPBU/APMS di Kota Jayapura;
2. Seluruh lapisan Masyarakat Kota Jayapura.

Untuk :

KESATU : Jam Layanan Pengisian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di SPBU, diatur sebagai berikut :

1. Angkutan Penumpang Umum Pengisian BBM mulai pukul 12.00-22.00 WIT (Taksi Starwagon, Grab Solar, Maxim Solar, Gocar Solar);
2. Kendaraan Angkutan Khusus (Truck Operasional Logistik dan Tronton/Kontainer) mulai pukul 09.00-18.00 WIT; dan
3. Angkutan Barang Umum (truck muatan material) mulai Pukul 18.00-22.00 WIT, kecuali kendaraan truck sampah.

KEDUA : Setiap Masyarakat di Kota Jayapura dapat mengawasi pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak di stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai instruksi ini serta dapat melaporkan pelanggaran terhadap Instruksi ini kepada Tim Satgas Pengawasan Monitoring BBM dan Aparat Hukum Terdekat.

KETIGA : Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana Diktum KESATU akan diambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau pencabutan izin usaha dan sanksi administrasi lainnya kepada pemegang izin.

KEEMPAT : Pada saat intruksi ini ditetapkan, Intruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengaturan Jam Layanan Pengisiam Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi di Wilayah Kota Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Demikian Instruksi ini dikeluarkan untuk ditaati dan dilaksanakan.

KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jayapura
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALIKOTA JAYAPURA,

ABISAI ROLLO, SH, MH

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Nomor : 511.2/ 0512 / SET
Lampiran : -
Perihal : ***Dukungan Kegiatan Pasar Murah Tahun 2025***

Kepada
Yth. **Ketua APRINDO**
Provinsi Papua
di -
Jayapura

Dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Tahun 2025, Maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura bermaksud melaksanakan upaya pengendalian Inflasi dengan melaksanakan pasar murah yang di rencanakan bulan Maret – Desember 2025.Pada 5 Distrik dan 25 Kelurahan sebanyak 48 Kali Pelaksanaan, Sehingga kami mohon partisipasi dan dukungan APRINDO Provinsi Papua untuk terlibat dalam kegiatan di maksud. (Jadwal Kegiatan Pasar Murah Terlampir).

Demikian disampaikan atas Kerjasamanya di ucapakan trimakasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan :
Walikota Jayapura (Sebagai laporan

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 10 Maret 2025

Nomor : 500 / 0596 / SET
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Permintaan Data Harga Komoditi Mingguan di Kota Jayapura.**

Kepada
Yth. **KEPALA BPS KOTA JAYAPURA**
Di_
JAYAPURA

Dalam rangka pengendalian Inflasi Kota Jayapura Tahun 2025, maka melalui surat ini kami hendak menyampaikan permintaan data harga komoditi mingguan/bulanan yang dilakukan oleh BPS sebagai informasi dan data bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi inflasi daerah di kota Jayapura.

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat membantu dalam penyampaian data dimaksud.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
PIt. SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690308 199403 1 010

Tembusan :
1. Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

KOMPONEN AKUNTABILITAS

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 23 April 2025

Nomor : 900/0766/SET
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : Laporan Triwulan I Kota Jayapura Tahun 2025

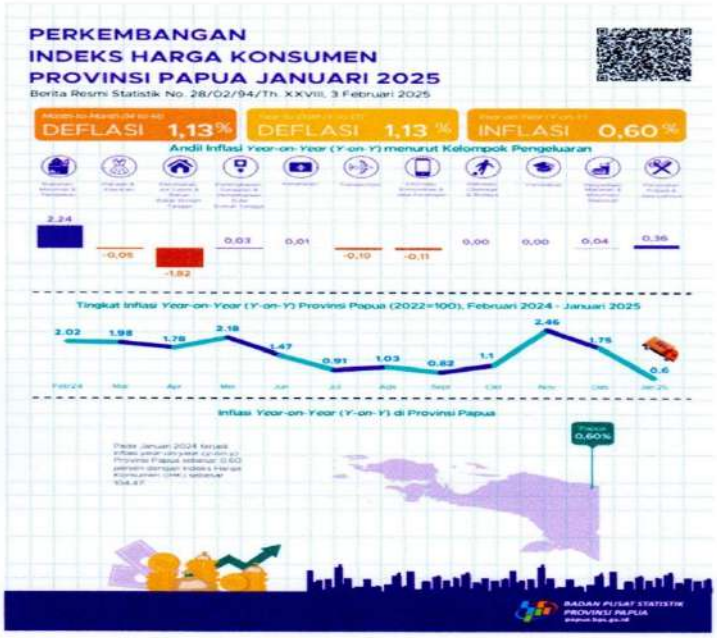
Kepada
Yth. Ketua Sekretariat TPIP
(Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan)
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan
Republik Indonesia
Di –
JAKARTA

Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan I

1.Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Papua sebesar 0,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,47.

Kelompok Pengeluaran	IHK Januari 2024	IHK Desember 2024	IHK Januari 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Januari 2025 [1] (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Januari 2025 [2] (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Januari 2025 [3] (%)	Andil Inflasi m-to-m Januari 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Januari 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (*Headline*)	**103,85**	**105,66**	**104,47**	**-1,13**	**-1,13**	**0,60**	**-1,13**	**0,60**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,29	107,25	110,27	2,82	2,82	6,76	0,94	2,24
Pakaian dan Alas Kaki	100,32	99,88	99,06	-0,82	-0,82	-1,26	-0,03	-0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	99,69	99,88	88,55	-11,34	-11,34	-11,17	-1,82	-1,82
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,50	102,14	102,21	0,07	0,07	0,70	-0	0,03
Kesehatan	103,53	103,42	104,00	0,56	0,56	0,45	0,01	0,01
Transportasi	110,65	111,87	109,83	-1,82	-1,82	-0,74	-0,25	-0,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,42	97,89	97,72	-0,17	-0,17	-1,71	-0,01	-0,11
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,66	102,80	102,81	0,01	0,01	0,15	-0	-0
Pendidikan	114,38	114,49	114,49	-0	-0	0,10	-0	-0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,56	103,16	103,16	-0	-0	0,59	-0	0,04
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,80	112,65	113,11	0,41	0,41	4,93	0,03	0,36

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK Januari 2025 terhadap IHK Desember 2024.
[2] Persentase perubahan IHK Januari 2025 terhadap IHK Desember 2024.
[3] Persentase perubahan IHK Januari 2025 terhadap IHK Januari 2024.
[-] Data sangat kecil/mendekati nol



Gambar 2 Infografis Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua, Januari 2025

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI JANUARI 2025

(m – to – m , %)

1	**Ikan tuna**	**0.2315**
2	**Tomat**	**0.1412**
3	**Ikan cakalang /Ikan sisik**	**0.1215**
4	**Kangkung**	**0.0768**
5	**Sewa rumah**	**0.0654**

5 KOMODITAS ANDIL DEFLASI JANUARI 2025

(m – to – m , %)

1	Tarif listrik	1.8899
2	Angkutan Udara	0.2708
3	Bawang Merah	0.0471
4	Blus Wanita	0.0394
5	Sirih	0.2339

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI JANUARI 2025

(Y – o – Y, %)

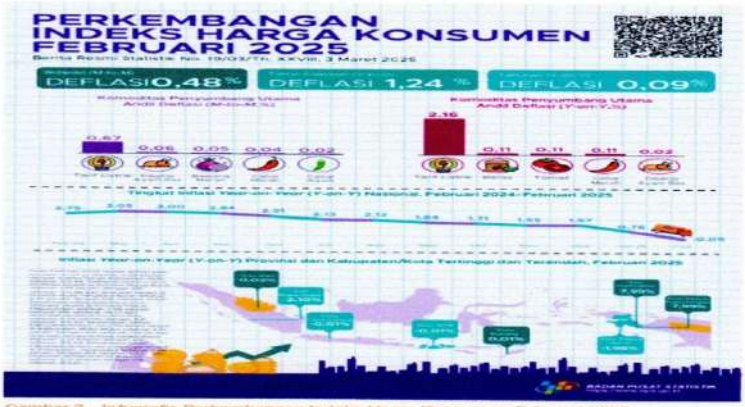
1	Emas Perhiasan	0.3460
2	Tomat	0.3011
3	Beras	0.2877
4	Ikan cakalang / Ikan Sisik	0.2283
5	Kopi bubuk	0,1703

2. Februari 2025 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Papua sebesar 0,81 persen.
   Catatan: Inflasi Kota Jayapura adalah Representasi inflasi Provinsi Papua
   Pada Februari 2025

Tabel 1 IHK dan Tingkat Inflasi *Month-to-Month* (*M-to-M*), *Year-to-Date* (*Y-to-D*), dan *Year-on-Year* (*Y-on-Y*) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Februari 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2024	IHK Desember 2024	IHK Februari 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Februari 2025[1] (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Februari 2025[2] (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Februari 2025[3] (%)	Andil Inflasi M-to-M Februari 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Februari 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	**105,58**	**106,80**	**105,48**	**-0,48**	**-1,24**	**-0,09**	**-0,48**	**-0,09**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	109,63	110,41	112,10	-0,40	1,53	2,25	-0,12	0,66
Pakaian dan Alas Kaki	102,28	103,38	103,49	0,01	0,11	1,18	-0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,20	102,60	89,85	-3,59	-12,43	-12,08	-0,52	-1,92
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,96	103,87	104,01	-0	0,13	1,02	-0	0,05
Kesehatan	103,39	104,64	105,24	0,17	0,57	1,79	0,01	0,05
Transportasi	109,04	109,48	110,07	0,36	0,54	0,94	0,04	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,67	99,48	99,41	0,01	-0,07	-0,26	-0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,41	104,26	104,59	0,11	0,32	1,14	-0	0,02
Pendidikan	102,97	104,92	105,07	0,01	0,14	2,04	-0	0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	104,56	106,64	107,14	0,17	0,47	2,47	0,02	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,40	113,22	115,37	1,29	1,90	8,43	0,09	0,52

Catatan: [1]Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Januari 2025.
[2]Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Desember 2024.
[3]Persentase perubahan IHK Februari 2025 terhadap IHK Februari 2024.
-0: Data sangat kecil/mendekati nol



Gambar 2 Infografis Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Februari 2025

Sumber : BPS Kota Jayapura

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI FEBRUARI 2025

(m – to – m , %)

1	**Ikan tuna**	**0.3470**
2	**IKan Asap**	**0.0864**
3	**Emas**	**0.0707**
4	**Ikan Deho**	**0,0674**
5	**Cabai Rawit**	**0,0401**

5 KOMODITAS ANDIL DEFLASI FEBRUARI 2025

(m – to – m , %)

1	**Tarif listrik**	**0.0499**
2	**Angkutan Udara**	**0.3697**
3	**Tomat**	**0.3116**
4	**Bawang merah**	**0.0595**
5	**Sepatu anak**	**0.0391**

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI FEBRUARI 2025

(Y– to – Y , %)

1	**Ikan Tuna**	**0.5452**
2	**Emas Perhiasan**	**0.4162**
3	**Ikan Cakalang /Ikan sisik**	**0.2316**
4	**Beras**	**0.2094**
5	**Kopi bubuk**	**0,1827**

5 KOMODITAS ANDIL DEFLASI FEBRUARI 2025

(Y– to – Y , %)

1	**Tarif listrik**	**2,4029**
2	**Angkutan Udara**	**0.4869**
3	**Telepon sesluler**	**0.1060**
4	**Sekolah menengah Pertama**	**0.0693**
5	**Masker**	**0.0437**

3. IHK Nasional bulan Maret 2025 IHK 107,22
Inflasi Bulanan 1,65 %
Inflasi Tahun Kalender 0,39 %
Inflasi Tahun ke Tahun 1,03

IHK Kota Jayapura Bulan Maret 2025
IHK 105,10
Inflasi Bulanan 1,13 %
Inflasi Tahun Kalender -0,53%
Inflasi Tahun ke Tahun 2,51

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI MARET 2025

(m – to – m , %)

1	**Tarif Listrik**	**1.6304**
2	**Angkutan Udara**	**0,2530**
3	**Emas Perhiasan**	**0,0614**
4	**Bawang Merah**	**0,0484**
5	**Blus Wanita**	**0,0460**

5 KOMODITAS ANDIL INFLASI FEBRUARI 2025

(Y– to – Y , %)

1	**Emas Perhiasan**	**0,4291**
2	**Ikan Tuna**	**0,3103**
3	**Ikan Cakalang**	**0,2294**
4	**Beras**	**0,2187**
5	**Kopi bubuk**	**0,1861**

✓ Hal ini dibuktikan dengan harga tiket pesawat sebagai berikut:

Tabel 1. Harga tiket penerbangan Jayapura – Jakarta Triwulan I

No	Maskapai penerbangan	Bulan Maret	
		Harga terendah	Harga tertinggi
1.	Garuda Indonesia	4.894.400	4.972.300
2.	Batik Air	2.946.700	3.203.100
3.	Lion Air	2.721.000	2.946.700
4.	Sriwijaya Air	3.326.700	3.448.000
5.	Citilink	4.379.700	4.379.700

No	Maskapai penerbangan	Bulan April	
		Harga terendah	Harga tertinggi
1.	Garuda Indonesia	4.995.800	21.315.600
2.	Batik Air	3.676.600	6.793.900
3.	Lion Air	4.682.400	4.899.900
4.	Sriwijaya Air	4.178.900	4.178.900
5.	Citilink	4.225.400	4.915.800

Harga Ikan Ekor Kuning dan Cakalang Triwulan I

NO	JENIS IKAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET IV	
		JAN - I	JAN -IV	FEB - I	FEB - IV	MARET - I	MARET - IV
1	Tuna Ekor kuning	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Cakalang	30.000	35.000	35.000	30.000	25.000	25.000
	Tongkol Deho	35.000	35.000	35,000	35.000	30.000	30,000
	Tengiri	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60,000
	Kembung	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50,000
	Kawalina	60.000	60.000	30,000	30.000	40,000	40,000
	Udang	100.000	100.000	120.000	120.000	120,000	80,000
	Mujair	45.000	45.000	45.000	45.000	45,000	45,000
	Bandeng	50.000	50.000	50.000	50.000	50,000	50,000

1. IHK Nasional bulan Maret 2025 IHK 107,22

   Inflasi Bulanan 1,65 %

   Inflasi Tahun Kalender 0,39 %

   Inflasi Tahun ke Tahun 1,03

   IHK Kota Jayapura Bulan Maret 2025

   IHK 105,10

   Inflasi Bulanan 1,13 %

   Inflasi Tahun Kalender -0,53%

   Inflasi Tahun ke Tahun 2,51

   Adapun Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi bulanan (MtM)

   1. Tarif Listrik (1,6304)
   2. Angkutan Udara (0,2530)
   3. Emas Perhiasan (0,0614)
   4. Bawang Merah (0,0460)

   Komoditas Penyumbang tertinggi Inflasi tahunan (YoY)

   1. Ikan Tuna (0,4291)
   2. Emas Perhiasan (0,3103)
   3. Ikan Cakalang / Ikan Sisik (0,2294)
   4. Beras (0,2187)
   5. Kopi Bubuk (0,1861)

✓ Hal ini dibuktikan dengan harga tiket pesawat sebagai berikut:

Tabel 1. Harga tiket penerbangan Jayapura – Jakarta Triwulan I

No	Maskapai penerbangan	Bulan Maret	
		Harga terendah	Harga tertinggi
1.	Garuda Indonesia	4.894.400	4.972.300
2.	Batik Air	2.946.700	3.203.100
3.	Lion Air	2.721.000	2.946.700
4.	Sriwijaya Air	3.326.700	3.448.000
5.	Citilink	4.379.700	4.379.700

No	Maskapai penerbangan	Bulan April	
		Harga terendah	Harga tertinggi
1.	Garuda Indonesia	4.995.800	21.315.600
2.	Batik Air	3.676.600	6.793.900
3.	Lion Air	4.682.400	4.899.900
4.	Sriwijaya Air	4.178.900	4.178.900
5.	Citilink	4.225.400	4.915.800

Harga Ikan Ekor Kuning dan Cakalang Triwulan I

NO	JENIS IKAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET IV	
		JAN - 1	JAN -1V	FEB - 1	FEB - IV	MARET - I	MARET - IV
1	Tuna Ekor kuning	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Cakalang	30.000	35.000	35.000	30.000	25.000	25.000
	Tongkol Deho	35.000	35.000	35,000	35.000	30.000	30,000
	Tengiri	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60,000
	Kembung	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50,000
	Kawalina	60.000	60.000	30,000	30.000	40,000	40,000
	Udang	100.000	100.000	120.000	120.000	120,000	80,000
	Mujair	45.000	45.000	45.000	45.000	45,000	45,000
	Bandeng	50.000	50.000	50.000	50.000	50,000	50,000

1. **Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi**
   - Masalah yang menyebabkan harga ikan naik di bulan Januari ,Ikan tuna karena minimnya suplai dari nelayan,factor,cuaca dan banyak nelayan pulang kampung halaman begitu juga ikan cakalang/sisik .,tomat naik karena jumlah stok terbatas dan dikirim ke luar daerah,
   - Harga Bahan Makanan lainnya seperti telur, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih masih bergantung pada daerah lain seperti Surabaya (contohnya: Harga telur pada minggu ketiga dan keempat Januari mengalami kenaikan disebabkan karena terlambatnya stok telur dari Surabaya dan menurunnya produksi telur lokal karena musim hujan; Harga cabe rawit pada minggu ketiga dan keempat mengalami penurunan disebabkan masuknya stok cabe rawit dari Surabaya dan harga bawang merah pada minggu ketiga dan keempat mengalami penurunan disebabkan produksi bawang merah yang melimpah dari Surabaya. Tetapi adapun stok lokal seperti yang berasal dari Koya (Kota Jayapura) dan Arso (Kabupaten Keerom)\

2. **Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi**
   - Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk setiap senin bersama Mendagri dan juga rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura
   - Melakukan sidak lapangan dalam rangka hari Raya Idul fitri
   - Pelaksanaan pasar murah secara berkala;
   - Pelaksanaan pasar murah Bersubsidi sebanyak 48 kali Periode Maret - Desember 2025 harga komoditas yang di jual lebih rendah 30 – 40 % dari harga pasar trasisional ,dengan sumber pembiayaan pasar murah berasal dari Otonomi Khusus dan Dana Alokasi umum (DAU) Pemerintah Kota Jayapura.pada komoditas Cabe,Bawang merah ,Bawang Putih,Tomat,Ayam Lokal,Daging sapi,telur ayam lokal,ikan kembung,ikan tongkol,ikan cakalang,ikan ekor kuning, dan dalam bentuk paket Beras Premium (5 kg) ,Gula 1 Kg,dan Minyak goreng)
   - Rogram Dinas Perhubungan Kota Jayapura Melaksanakan posko pada titik rawan dan pusat keramaian menjelang Hari Raya Lebaran Tahun 2025

- Dalam rangka persiapan menjelang Idul Fitri tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Jayapura melakukan kolaborasi dengan kepolisian secara khusus Dirlantas Polda Papua, Satuan Polresta Jayapura, Jasa Raharja Papua,diawali dengan apel gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan Cartens 2025 Polda Papua yang ana apel serentak se Indonesia dilaksanakan pada 10 Februari 2025.

1. RAPAT KOORDINASI TPID KOTA JAYAPURA

Pimpinan Rapat Pj.Walikota Jayapura (17 Februari 2025)



Pimpinan Rapat TPID oleh : Pj.Walikota Jayapura (28 Februari 2025)



Pimpinan Rapat TPID Walikota Jayapura bersama Asisten II Setda Kota Jayapura



2. **WALIKOTA JAYAPURA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA BERSAMA TPID KOTA JAYAPURA DAN FORKOPIMDA MELAKUKAN SIDAK PADA DISTRIBUTOR, PASAR MODEREN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA JAYAPURA MENJELANG IDUL FITRI 2025**



3. PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasar Murah Bersubsidi Sebanyak 48 kali Periode Maret - Desember 2025
(Harga komoditas yang dijual lebih rendah 30 - 40% dari harga pasar tradisional).
Sumber Pembiayaan Pasar Murah berasal dari Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Jayapura
pada Anggaran T.A 2025

No	Komoditas	Stok per pasar murah	Harga (Rp) per paket/kg/rak	Keterangan
1	Beras premium (5 kg), Gula (1 kg) dan Minyak goreng (1 liter)	100 - 200 paket	75,000	Dinas Perindag
2	Ikan Ekor Kuning	100 kg	35,000	Dinas Perikanan
3	Ikan Cakalang	50 kg	30,000	
4	Ikan Tongkol	60 kg	20,000	
5	Ikan Kembung	20 kg	35,000	
6	Udang	30 kg	70,000	
7	Daging Sapi	192 kg	110,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Telur Ayam Lokal	100 rak	45,000	
9	Ayam Lokal	16 kg	25,000 - 30,000	
10	Cabai	100 kg	20,000 - 25,000	
11	Tomat	100 kg	10,000 - 13,000	
12	Bawang Merah	100 kg	30,000	
13	Bawang Putih	100 kg	Â 40,000	

Sumber: TPID Kota Jayapura

Pelaksanaan Pasar murah bersubsidi menjelang Idul Fitri 2025





4. **Program Dinas Perhubungan menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025:**



1.Penyiapan posko pada titik rawan dan pusat keramaian di Kota Jayapura bersama tim gabungan Dishub, TNI/POLRI dan Satpol PP.

2 Dalam rangka persiapan menjelang Idul Fitri tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Jayapura berkolaborasi dgn kepolisian secara khusus

Dirlantas Polda Papua, Satuan Polresta Jayapura, Jasa Raharja Papua diawali dgn apel gelar pasukan dlm rangka operasi keselamatan Cartens 2025 Polda Papua yg mana Apel serentak se indonesia dilaksanakan pada tgl 10 Februari 2025, untuk wilayah Papua apel gelar pasukan dilaksanakan di halaman apel Polda Papua.

5. Adapun tugas yg dilakukan kedepan antara lain melakukan swiping/pemeriksaan Kendaraan Bermotor/Rem chek seperti Laik Jalan, juga melakukan kegiatan Posko Keamanan, keselamatan lalu lintas dgn bersinergi terhadap Instansi terkait yaitu pada Hari Raya Idul Fitri 2025.
6. Transportasi di Kota Jayapura dalam menjelang Idul Fitri 2025 tidak terlalu berdampak seperti di Kota besar di Indonesia seperti pulau Jawa dan Sumatera, di Kota Jayapura relatif aman dan terkendali artinya terlayani di masing – masing trayek. Begitu juga Tarif Angkutan umum di wilayah Kota Jayapura berjalan normal.

3.Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi

- Siaran radio dalam rangka menginformasikan harga pasar ketersediaan barang dan harga;
- Rapat koordinasi TPID secara periodik;
- Rapat koordinasi tematik;
- Rapat terbatas OPD
- Sidak menjelang hari raya (hari besar keagamaan)
- Stasiun Agro Bisnis (STA) harus difungsikan kembali agar petani yang ingin memasarkan hasil pertaniannya dapat tereallisasi dengan baik
- Perlu adanya tindakan terhadap pemotongan hewan yang masih melakukan pemotongan di luar (RPH)
- Pengawasan masih lemah sehingga perlu melibatkan kepolisian.

4.Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi

- Program kerja secara terjadwal disiapkan oleh TPID;
- Temu Wicara/*Coffee Morning* dengan *stakeholder* terkait inflasi secara berkala;
- Stabilitas harga melalui operasi pasar dilakukan oleh OPD terkait lintas koordinasi TPID;

Penyelenggaraan pasar murah dengan melibatkan secara langsung Petani Sayur/Buah;

- Dukungan Transportasi untuk Pertanian dalam pelaksanaan pasar murah
- Mendata jumlah produksi Pertanian, padi ,cabe,Bawang merah ,di Distrik Muaratami
- Memanfaatkan lahan tidur di daerah pertanian untuk di jadikan lahan pertanian padi
- Memperbaiki irigasi daerah pertanian yang ada di wilayah Distrik Muaratami sebagai sentra pertanian.

Demikian laporan Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan I Bulan Januari sampai bulan Maret 2025 yang kami sampaikan . Atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

A.n. WALIKOTA JAYAPURA
PLT.SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE,S.Sos,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Walikota Jayapura sebagai laporan.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 29 Juli 2025

Nomor : 500.1/1427/SET
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : Laporan Triwulan II Kota Jayapura Tahun 2025

K e p a d a
Yth. Ketua Sekretariat TPIP
(Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan)Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan
Republik Indonesia
Di –
J A K A R T A

Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan II

1. Bulan April 2025



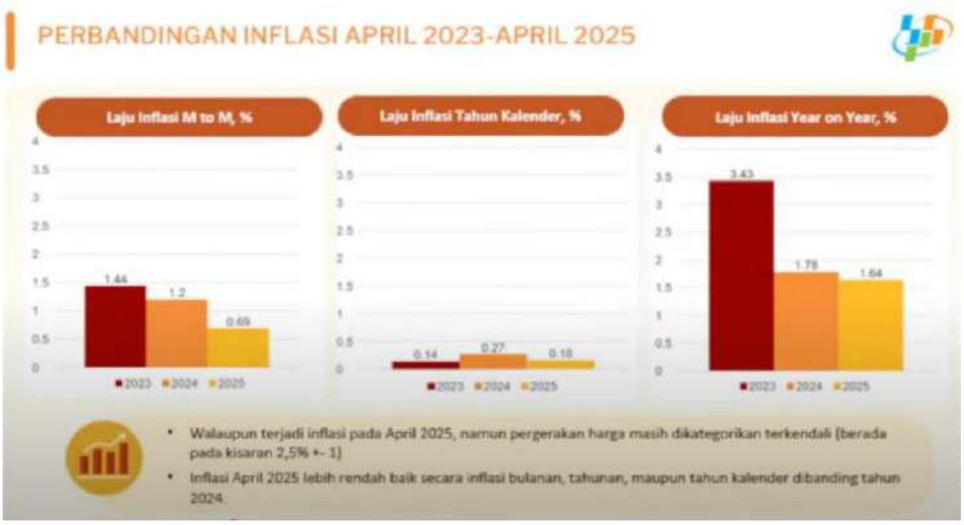
Sumber : BPS



Sumber : BPS



Sumber : BPS



Sumber : BPS



Sumber : BPS

2. Bulan Mei 2025







3. Bulan Juni Tahun 2025



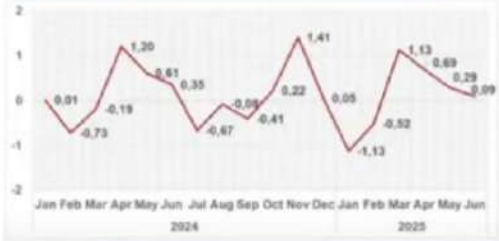
PERBANDINGAN INFLASI JUNI 2023 - JUNI 2025



- Walaupun terjadi inflasi pada Juni 2025, namun pergerakan harga masih dikategorikan terkendali (berada dibawah kisaran 2,5% +- 1)
- Inflasi Juni 2025 lebih rendah baik secara inflasi bulanan, tahunan, maupun tahun kalender dibanding tahun 2023 dan 2024.

INFLASI JUNI 2025 (m-to-m)

Inflasi Bulan ke Bulan 0,09%
(Juni 2025 terhadap Mei 2025)



Inflasi Bulan ke Bulan Per Kelompok Pengeluaran (%)

Rincian	Inflasi (m-to-m)	Andil
INFLASI UMUM	0,09	0,09
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	-1,16	-0,40
2. Pakaian dan Alas Kaki	-1,10	-0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	*0	*0
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rute	-0,62	-0,03
5. Kesehatan	0,39	0,01
6. Transportasi	4,13	0,56
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,01	*0
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,06	*0
9. Pendidikan	*0	*0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	0,01
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,24	-0,02

- Dari Januari 2024 -Juni 2025, secara umum pergerakan harga di Kota Jayapura cenderung meningkat. Tercatat pada Juni 2025 Kota Jayapura mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09 persen.
- Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar terjadi pada kelompok Transportasi dengan inflasi sebesar 4,13 persen dan andil 0,56 persen.
- Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan deflasi sebesar 1,16 persen dan andil 0,40 persen.

1. **Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi**

- Harga cabai rawit dan tomat mulai naik di minggu ke empat bulan April harga masih tinggi sampai dengan bulan mei, karena factor cuaca atau iklim sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman khususnya proses pembuahan berkurang.

- Harga Bawang putih juga mengalami kenaikan juga di bulan April dan turun di bulan mei minggu ke empat, tetapi di bulan Juni mengalami kenaikan sampai dengna minggu ke empat bulan Juni 2025 harga masih tinggi, bawang merah juga dari luar kota yaitu Surabaya harga juga sudah tinggi.

- komditas lainnya seperti telur, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih masih bergantung pada daerah lain seperti Surabaya (contohnya : Harga telur pada minggu ketiga dan keempat Januari mengalami kenaikan disebabkan karena terlambatnya stok telur dari Surabaya dan menurunnya produksi telur local).

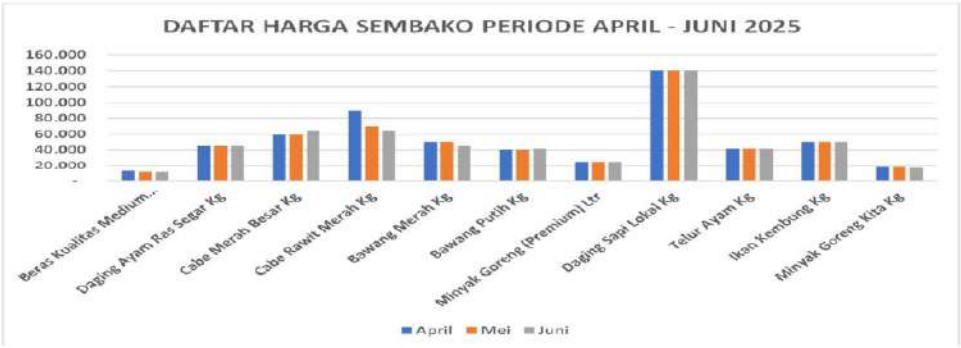
- Harga beras naik karena keterbatasan produksi gabah dari Petani di kota Jayapura dan juga menunggu penyaluran beras SPHP dari bulog yang belum di salurkan di Kota jayapura, sehingga menimbulkan harga beras naik .

- Harga minyak juga mengalami kenaikan sebabkan oleh : banyak pedagang yang belum bisa menggunakan aplikasi Simira, dan belum belajar cara mengakses sehingga dapat membeli minyak dengan harga yang murah dengan 1 liter berkisar Rp. 13.500 s/d 14.500 yang di ijinkan oleh Permendagri, tetapi jika membeli langsung dari distributor dianggap sebagai pengecer sehingga harga yang di jual adalah 15.700 /Liter dan jika di jual harganya akan menjadi 17.500 s/d 18.500.

DATA HARGA SEMBAKO PERIODE APRIL-JUNI 2025

LAPORAN MINGGUAN

No.	JS BARANG/SATUAN		2-Apr-25	9-Apr-25	16-Apr-25	23-Apr-25	30-Apr-25	7-May-25	14-May-25	21-May-25	28-May-25	4-Jun-25	11-Jun-25	18-Jun-25	25-Jun-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Beras Me	Kg	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
2	Daging Ay	Kg	31,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
3	Gula Cura	Kg	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	Cabe Mer	Kg	80,000	70,000	50,000	70,000	87,500	99,900	95,000	75,000	70,000	80,000	80,000	65,000	70,000
5	Cabe Raw	Kg	85,000	60,000	55,000	85,000	95,000	100,000	90,000	80,000	70,000	70,000	70,000	55,000	80,000
6	Bawang M	Kg	50,000	45,000	50,000	50,000	55,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	65,000
7	Bawang P	Kg	50,000	50,000	50,000	45,000	50,000	54,000	50,000	50,000	50,000	45,000	50,000	50,000	54,000
8	Minyak G	Ltr	20,645	21,645	21,645	22,990	21,645	21,645	21,645	21,990	21,990	21,990	22,090	25,000	25,000
9	Daging Sa	Kg	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
10	Telur Aya	Kg	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	39,100	39,100
11	Udang	Kg	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
12	Ikan Kem	Kg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
13	Mie Instar	Pcs	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
14	Tempe	Kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
15	Tahu	Kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
16	Susu Dan	400 gr	41,000	41,500	41,500	41,500	41,000	41,000	41,000	41,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500
17	Susu SGN	400 gr	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
18	Jeruk	Kg	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000
19	Pisang Ba	Kg	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Tepung T	Kg	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
21	Minyak G	Ltr	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500



2. **Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi**

- Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk setiap senin bersama Mendagri dan juga rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura
- Pelaksanaan pasar murah secara berkala :

  Pelaksanaan pasar murah Bersubsidi sebanyak 48 kali Periode Maret - Desember 2025 harga komoditas yang di jual lebih rendah 30-40 % dari harga pasar tradisional , dengan sumber pembiayaan pasar murah berasal dari Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Jayapura. Pada komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, ayam lokal, daging sapi, telur ayam lokal, ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan dalam bentuk paket beras premium (5 kg), gula 1 kg, dan minyak goreng).

  dalam pelaksanaan pasar murah sebulan di laksanakan empat kali sedangkan di hari raya bulan November sebanyak 5 kali pelaksanaan pasar murah dan bulan Desember dilaksankan sebanyak 8 kali padas Distrik Jayapura utara, Distrik Jayapura selatan dan Distrk Heram.
- Melakukan kerja sama antar daerah melalui MOU Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, dalam PKS Komoditas Holtikultura dan Peternakan.
- Penerbitan SK Pelaksanaan kebijakan antara lain :
  - Draf SK Gerakan Pasar murah, sementara proses Hukum;
  - Draf SK Penggunaan Dana BTT untuk Program Prioritas Koperasi Merah Putih dalam pengururusan akta pendirian Koperasi Merah Puti;
  - Draf SK Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Jayapura Tahun 2025;
  - SK draf Harga Acuan;
  - Surat Edaran Hari Raya lebaran Tahun 2025;
  - Draf Surat Edaran Walikota untuk Pelaku Usaha dalam Pengendalian Harga , baik Natal dan Hari besar Nasional;
  - Surat Dukungan dari Sekda Pelaksanaan Pasar murah pada Distrik dan Kelurahan serta instansi Vertikal;
  - Bantuan bibit Cabai Dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi kepada Masyarakat di Kota Jayapura dalam rangka Pengendalian Inflasi;
  - Bantuan bibit cabai, tomat dan sayur bagi kelompok tani OAP di Kota Jayapura dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

1. RAPAT KOORDINASI TPID KOTA JAYAPURA

Pimpinan Rapat Wakil Walikota Jayapura di dampingi Asisten II (12 JUNI 2025)

Rapat Inflasi Daerah dan dirangkaikan dengan Program Prioritas Nasional.






PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

SEKRETARIAT DAERAH



➢ RISALAH RAPAT 12 JUNI 2025



PENERIMAH KOTA JAYAPURA







PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

HARI/TANGGAL KAMIS,12 JUNI 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.
2	Widhi Hartanto	Consulate Jayapura	Advisor		2.
3	Djoni Nova	Bappeda	Kepala	082282494913	3.
4	Elias Y. Tabuni	DPMPTSP	Kabid Pelayanan Jasa Usaha	085215555393	4.
5	Kristin W	Dinas Pertanian	Sekretaris		5.
6	Arfiani Paisah	Dinas Perindag Jap	Plt. Kabid. Laporan		6.
7	Salomina Jungsereuw	DKepp	Sekretaris		7.
8	Ali Iswalina	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA		8.
9	Arius Y Mobri	Dinas Pendidikan	Kabid. Akreditasi SMP		9.
10	Stanie Korwa	Dinas Sosial	Kasie Inventaris		10.

1. Rapat Kootdinasi Bersama Kementrian Dalam Negeri Yang Dilaksanakan Setiap Senin



2. Jadwal Pelaksanaan Pasar Murah Secara Berkala Di 25 Kelurahan Di Kota Jayapura Dari Bullan Maret - Desember 2025

   Sebanyak 48 Kali



Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tanggal : 04 Maret 2025

JADWAL PELAKSANAAN PASAR MURAH SUBSIDI KOTA JAYAPURA
BULAN MARET – DESEMBER TAHUN 2025

No	Waktu		Tempat
1	13 Maret 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Yahim
2	20 Maret 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Awiyo
3	21 Maret 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Kotaraja
4	26 Maret 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Tanjung Ria
5	27 Maret 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Gurabesi
6	03 April 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Imbi
7	17 April 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Entrop
8	23 April 2025	Distrik Muara Tami	Distrik Muara Tami
9	24 April 2025	Distrik Heram	Kelurahan Heram
10	25 April 2025	Distrik Heram	Kelurahan Yabansai
11	30 April 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Vim
12	03 Mei 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Angkasapura
13	22 Mei 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Bhayangkara
14	23 Mei 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Waena
15	4 Juni 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Hamadi
16	5 Juni 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Base
17	18 Juni 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Tanjung Ria
18	19 Juni 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Kayu Batu
19	24 Juli 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Entrop
20	25 Juli 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Kota
21	30 Juli 2025	Distrik Muara Tami	Kelurahan Muara Tami Barat
22	31 Juli 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Asano
23	14 Agustus 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Abepantai
24	15 Agustus 2025	Distrik Heram	Kelurahan Waena
25	28 Agustus 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Nimbokrang
26	29 Agustus 2025	Distrik Heram	Kampung Yoka
27	10 September 2025	Distrik Heram	Kampung Yoka
28	11 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Waena
29	25 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Asano
30	26 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Kotaraja
31	29 Oktober 2025	Distrik Muara Tami	Kelurahan Tanjung Ria
32	30 Oktober 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Yoka
33	30 Oktober 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Abepantai
34	31 Oktober 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Hamadi
35	15 November 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Imbi
36	21 November 2025	Distrik Heram	Kelurahan Yabansai
37	22 November 2025	Distrik Heram	Kelurahan Medlam
38	28 November 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Vim
39	27 November 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Bhayangkara
40	29 November 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Waena
41	4 Desember 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Kayu Batu
42	5 Desember 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Gurabesi
43	10 Desember 2025	Distrik Heram	Kampung Yoka
44	11 Desember 2025	Distrik Heram	Kampung Waena
45	17 Desember 2025	Distrik Heram	Kelurahan Waena
46	18 Desember 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Angkasapura
47	19 Desember 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Angkasapura
48	19 Desember 2025	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Gurabesi

WALIKOTA JAYAPURA
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah

ABISAI ROLLO, S.H., M.H.

- Surat Dukungan Pelaksanaan Pasar Murah Oleh Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, Mh)



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT TPID

- Surat Dukungan Dari Sekda Pelaksanaan Pasar Murah Pada Distrik Dan Kelurahan Serta Instansi Vertikal



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Pasar Murah Bersubsidi Sebanyak 48 kali Periode Maret - Desember 2025
(Harga komoditas yang dijual lebih rendah 30 - 40% dari harga pasar tradisional).
Sumber Pembiayaan Pasar Murah berasal dari Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Jayapura
pada Anggaran T.A 2025

No	Komoditas	Stok per pasar murah	Harga (Rp) per paket/kg/rak	Keterangan
1	Beras premium (5 kg), Gula (1 kg) dan Minyak goreng (1 liter)	100 - 200 paket	75,000	Dinas Perindag
2	Ikan Ekor Kuning	100 kg	35,000	Dinas Perikanan
3	Ikan Cakalang	50 kg	30,000	
4	Ikan Tongkol	60 kg	20,000	
5	Ikan Kembung	20 kg	35,000	
6	Udang	30 kg	70,000	
7	Daging Sapi	192 kg	110,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Telur Ayam Lokal	100 rak	45,000	
9	Ayam Lokal	16 kg	25,000 - 30,000	
10	Cabai	100 kg	20,000 - 25,000	
11	Tomat	100 kg	10,000 - 13,000	
12	Bawang Merah	100 kg	30,000	
13	Bawang Putih	100 kg	A 40,000	

Sumber: TPID Kota Jayapura

- Pelaksanaan Pasar Murah Bulan April S/D Juni 2025 Pada Kelurahan Imbi, Kelurahan Tanjung Ria





- Pelaksanaan Pasar Murah Di Kelurahan Numbay



- Pasar Murah Kelurahan Vim



- Laporan Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Di 14 Kampung Di Kota Jayapura Dilaksanakan Sesuai Jadwal Walikota Turun Kampung. Dari Bulan 19 Mei 2025 S/D 04 Juli Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Alamat : Jln. Balaikota No.2 Gedung Dinas Otonom Lantai 3 Entrop
JAYAPURA - PAPUA

LAPORAN PENYERAHAN SIMBOLIS
PENYALURAN BANTUAN PANGAN CPPD DAN INTERVENSI
KERAWANAN PANGAN
TAHUN 2025

1. KEGIATAN BANTUAN PANGAN CPPD DAN INTERVENSI KERAWANAN PANGAN MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM DIKOTA JAYAPURA DENGAN TUJUAN MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN UNTUK PANGAN DAN MENGENTASKAN DAERAH RENTAN PANGAN DAN MENGUATAN DAERAH TAHAN PANGAN
2. TARGET PENERIMA 100 KK SETIAP KAMPUNG UNTUK KELUARGA RAWAN PANGAN SESUAI DATA DINDA PAKE (PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM).
   DENGAN SEBARAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SEBAGAI BERIKUT:
   - KAMPUNG SKOUW SAE
   - KAMPUNG SKOUW YAMBE
   - KAMPUNG SKOUW MABO
   - KAMPUNG NARI
3. KOMPONEN PAKET BANTUAN PANGAN :
   - BERAS PREMIUM 10 Kg
   - SAGU 2Kg
   - GARAM BEKYODIUM 2 BUNGKUS
   - TELUR AYAM 1 RAK
   - GULA PASIR 2 Kg
   - KORNETKU 2 KALENG
   - IKAN SARDEN 1 KALENG

PENYALURAN BANTUAN PANGAN CPPD DAN INTERVENSI
KERAWANAN PANGAN
TAHUN 2025

1 PENYERAHAN BANTUAN DI KAMPUNG SKOUW SAE

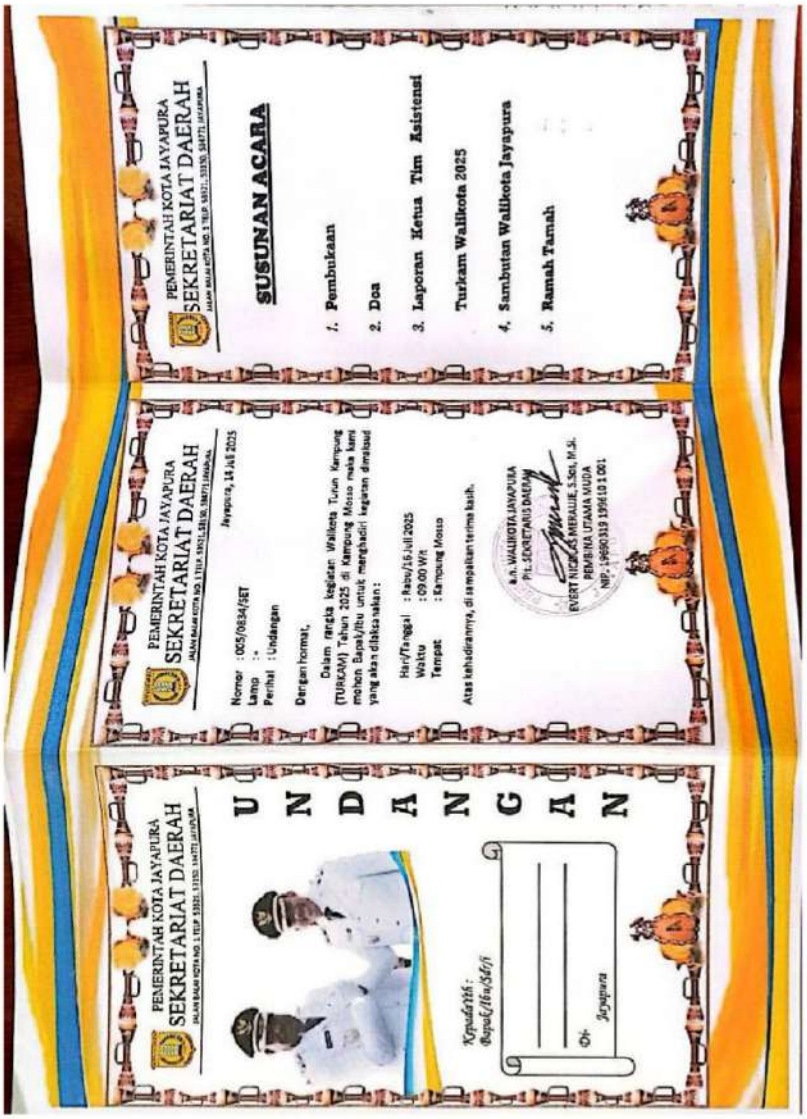
DOKUMENTASI








➢ Laporan Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Di 14 Kampung Di Kota Jayapura Dilaksanakan Sesuai Jadwal Walikota Turun Kampung. Dari Bulan 19 Mei 2025 S/D 04 Juli Tahun 2025



1. Program Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, Mh) Turun Kampung Pada Kampung Skouw Yambe Dalam Memberikan Bantuan Ketahanan Pangan Jagung Lokal.



2. Program Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, Mh)
   Turun Kampung Pada Tanggal 23 Mei 2025, Dalam Pemberian Bibit Cabai Bagi Kelompok Tani Yang Ada Di Skouw Mabo



3. Bantuan Bibit Cabe Dan Tomat Serta Bibit Sayur Bagi Kelompok Tani Oap Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Jayapura



4. Kesepakatan Bersama Tentang Tindak Lanjut Mou Dan Pks Kota Jayapura Dan Kabupaten Kerom Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Komoditas Holtikultura Dan Peternakan Tahun 2025



5. Dokumentasi Kesepakatan Mou Dan Pks Holtikultura Dan Peternakan Lanjutan Dari Tahun 2024 Ke Tahun 2025 Yaitu Kabupaten Kerom Dan Kota Jayapura





6. Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Jayapura Dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Selaku Pembina Dalam Tpid Kota Jayapura, Dengan Pembahasan Terkait Pks Lanjutan Ke Kabupaten. Jayapura Dan Perkembangan Laporan Kinerja Tpid Tahun 2025





7. Jadwal Walikota Jayapura Turun Di 14 Kampung Dengan Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Dan Melaksanakan Peletakkan Batu Pembangunan Koperasi Merah Putih.Di Laksanakan Pada 14 Mei S/D 04 Juli 2025

NO	KAMPUNG	HARI/TANGGAL	JAM	AGENDA	TEMPAT
01	SKOUW SAE	Senin, 19 Mei 2025	08.30- 09.00	Penyambutan Walikota Jayapura beserta Rombongan dan Peresmian Taman Wisata Skouw Sae	Taman Kampung Skouw Sae
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
			09.30- 12.00	"Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			12.00- 13.30	**ISOMA**	
			13.30- 15.00	Lanjutan "Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	
			15.00-18.00	**ISTIRAHAT**	Tenda Pertemuan
			18.00- 19.30	Pertemuan Walikota bersama Ondoafi dan Kepala Suku	
			19.30-20.30	Doa bersama Walikota dengan masyarakat	
		Selasa, 20 Mei 2025	07.00- 08.30	Walikota Olaraga Bersama Masyarakat	Taman Wisata
			08.30- 09.30	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap,dll)	
			09.30- 10.00	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
			10.00-12.00	Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat.	
			12.00-13.00	**ISOMA**	
			13.00- 15.00	Lanjutan Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat.	Tenda Pertemuan
			15.00-18.00	**ISTIRAHAT**	
			18.00- 19.30	Pertemuan Walikota dengan Aparatur Kampung dan Bamuskam	Tenda Pertemuan
			19.30- 20.30	Doa malam bersama	Tenda Pertemuan
			07.00- 08.30	Walikota olaraga bersama Masyarakat	Tempat Kegiatan
			08.30- 09.00	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap, dll)	
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**

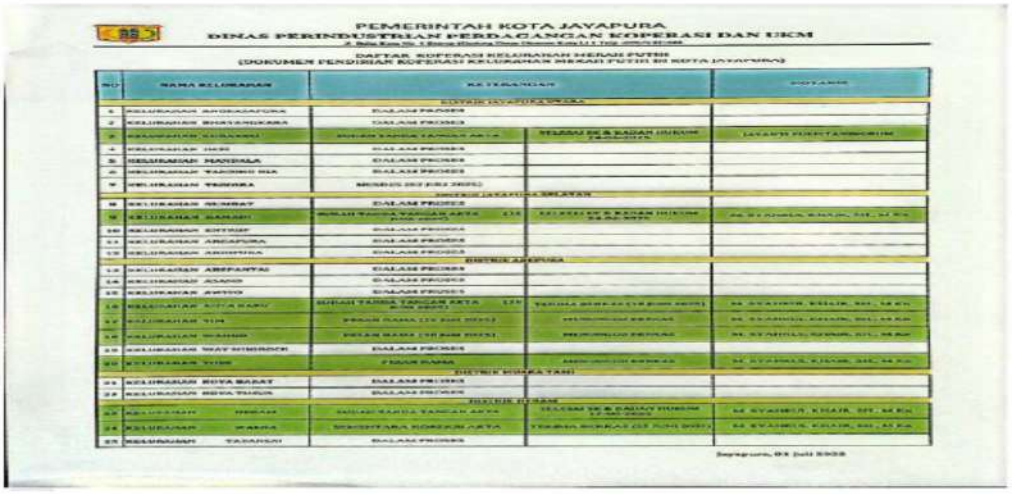
NO	KAMPUNG	HARI/TANGGAL	JAM	AGENDA	TEMPAT
		Rabu, 21 Mei 2025	09.30-12.00	Pertemuan Walikota dengan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			12.00-13.30	**ISOMA**	
			13.30-14.00	Pertemuan Walikota dengan Ondoafi, Kepala Suku, Aparat Kampung, Bamuskam, dan Kelembagaan Masyarakat Kampung.	Tenda Pertemuan
			14.00-15.00	Doa bersama	Tenda Pertemuan
			15.00-Selesai	Persiapan Pulang	
02	SKOUW MABO	Kamis,22 Mei 2025	08.30- 09.00	Penyambutan Walikota Jayapura beserta Rombongan	Taman Kampung
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
			09.30- 12.00	"Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			12.00- 13.30	**ISOMA**	
			13.30- 15.00	Lanjutan "Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	
			15.00-18.00	**ISTIRAHAT**	Tenda Pertemuan
			18.00- 19.30	Pertemuan Walikota bersama Ondoafi dan Kepala Suku	
			19.30-20.30	Doa malam bersama	
		Jumat, 23 Mei 2025	07.00- 08.30	Walikota Olaraga Bersama Masyarakat	Taman Wisata
			08.30- 09.30	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap,dll)	
			09.30- 10.00	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
			10.00-12.00	Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat.	
			12.00-13.00	**ISOMA**	
			13.00- 15.00	Lanjutan Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat.	Tenda Pertemuan
			15.00-18.00	**ISTIRAHAT**	

NO	KAMPUNG	HARI/TANGGAL	JAM	AGENDA	TEMPAT
			16.00- 19.30	Pertemuan Walikota dengan Aparatur Kampung dan Bamuskam	Tenda Pertemuan
			19.30-20.30	Doa malam bersama	
			07.00- 08.30	Walikota olaraga bersama Masyarakat	Halaman Tempat Kegiatan
			08.30- 09.00	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap, dll)	
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Sabtu, 24 Mei 2025	09.30-12.00	Pertemuan Walikota dengan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			12.00-13.30	**ISOMA**	
			13.30-14.00	Pertemuan Walikota dengan Ondoafi, Kepala Suku, Aparat Kampung, Bamuskam dan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			14.00-15.00	Doa bersama	Tenda Pertemuan
			15.00-Selesai	Persiapan Pulang	
			14.00- 15.00	Penyambutan Walikota Jayapura beserta Rombongan	Taman Kampung
			15.00-15.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Minggu,25 Mei 2025	15.30-16.00	"Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			16.00-18.00	**ISTIRAHAT**	
			18.00- 19.30	Pertemuan Walikota bersama Ondoafi dan Kepala Suku	
			19.30-20.30	Doa malam bersama	
			07.00- 08.30	Walikota Olaraga Bersama Masyarakat	Taman Wisata
			08.30- 09.00	Bersih-bersih (Mandi, siap siap,dll)	
			09.30- 10.00	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Senin, 26 Mei 2025	10.00-12.00	Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat	
03	SKOUW YAMBE		**12.00-13.30**	**ISOMA**	

NO	KAMPUNG	HARI/TANGGAL	JAM	AGENDA	TEMPAT
				layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat	
			15.00-16.00	**ISTIRAHAT**	
			16.00- 19.30	Pertemuan Walikota dengan Aparatur Kampung dan Bamuskam	Tenda Pertemuan
			19.30- 20.30	Doa malam bersama	Tenda Pertemuan
			07.00- 08.30	Walikota olaraga bersama Masyarakat	Halaman Tempat Kegiatan
			08.30- 09.00	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap, dll)	
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Selasa, 27 Mei 2025	09.30-12.00	Pertemuan Walikota dengan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			12.00-13.30	**ISOMA**	
			13.30-14.00	Pertemuan Walikota dengan Ondoafi, Kepala Suku, Aparat Kampung, Bamuskam dan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			14.00-15.00	Doa bersama	Tenda Pertemuan
			15.00-Selesai	Persiapan Pulang	
			08.30- 09.00	Penyambutan Walikota Jayapura beserta Rombongan	Taman Kampung
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Senin,02 Juni 2025	09.30- 12.00	"Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			12.00- 13.30	**ISOMA**	
			13.30- 15.00	Lanjutan "Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			15.00-16.00	**ISTIRAHAT**	
			16.00- 19.30	Pertemuan Walikota bersama Ondoafi dan Kepala Suku	
			19.30-20.30	Doa malam bersama	
			07.00- 08.30	Walikota Olaraga bersama Masyarakat	Taman Wisata
			08.30- 09.30	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap,dll)	

04	NAFRI	Selasa,03 Juni 2025	**09.30- 10.00**	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
			10.00-12.00	Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat.	
			12.00-13.00	**ISOMA**	
			13.00- 15.00	Lanjutan Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni, Peninjauan lokasi ketahanan pangan, dan pemberian bantuan kepada Masyarakat	Tenda Pertemuan
			15.00-16.00	**ISTIRAHAT**	
			16.00- 19.30	Pertemuan Walikota dengan Aparatur Kampung dan Bamuskam	Tenda Pertemuan
			19.30- 20.30	Doa malam bersama	Tenda Pertemuan
			07.00- 08.30	Walikota olaraga bersama Masyarakat	Halaman Tempat Kegiatan
			08.30- 09.00	Bersih-bersih (Mandi, siap-siap, dll)	
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Rabu, 04 Juni 2025	09.30-12.00	Pertemuan Walikota dengan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			12.00-13.30	**ISOMA**	
			13.30-14.00	Pertemuan Walikota dengan Ondoafi, Kepala Suku, Aparat Kampung, Bamuskam, dan Kelembagaan Masyarakat Kampung	Tenda Pertemuan
			14.00-15.00	Doa bersama	Tenda Pertemuan
			15.00-Selesai	Persiapan Pulang	
			08.30- 09.00	Penyambutan Walikota Jayapura beserta Romicongan	Taman Kampung
			09.00-09.30	**Coffee Break**	**Tenda Pertemuan**
		Selasa,10 Juni 2025	09.30- 12.00	"Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab" (Walikota bersama seluruh Masyarakat)	Tenda Pertemuan
			12.00- 13.30	**ISOMA**	
			13.30- 15.00	Lanjutan "Masyarakat Bertanya, Walikota Menjawab"	

8. Daftar Koperasi Merah Putih Di 25 Kelurahan Di Kota Jayapura
   Kepengurusan Akta Pendirian Koperasi Menggunakan Dana (Btt)
   Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

DAFTAR KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
(DOKUMEN PENDIRIAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA JAYAPURA)

NO	NAMA KELURAHAN	KETERANGAN		NOTARIS
	KOTA JAYAPURA UTARA			
1	KELURAHAN ANGKASAPURA	DALAM PROSES		
2	KELURAHAN BHAYANGKARA	DALAM PROSES		
3	KELURAHAN DOK V	SUDAH TANDA TANGAN AKTA	SEDANG DI A BADAN HUKUM	
4	KELURAHAN HEIV	DALAM PROSES		
5	KELURAHAN PANDAWA	DALAM PROSES		
6	KELURAHAN TANJUNG RIA	DALAM PROSES		
7	KELURAHAN TRIKORA			
	JAYAPURA SELATAN			
8	KELURAHAN ARGAPURA	DALAM PROSES		
9	KELURAHAN BAHARI	SUDAH TANDA TANGAN AKTA		
10	KELURAHAN DOYO BARU	DALAM PROSES		
11	KELURAHAN ARGAPURA	DALAM PROSES		
12	KELURAHAN ARGAPURA	DALAM PROSES		
	DISTRIK ABEPURA			
13	KELURAHAN ABEPANTAI	DALAM PROSES		
14	KELURAHAN ASANO	DALAM PROSES		
15	KELURAHAN AYAYO	DALAM PROSES		
16	KELURAHAN KOTA BARU	SUDAH TANDA TANGAN AKTA		
17	KELURAHAN YOA			
18	KELURAHAN WAMENA			
19	KELURAHAN WAY HIMBROM	DALAM PROSES		
20	KELURAHAN YOKE			
	DISTRIK HERAM TAMI			
21	KELURAHAN ENTROP	DALAM PROSES		
22	KELURAHAN HEIV TIMUR	DALAM PROSES		
	DISTRIK PERAM			
23	KELURAHAN HERAM	SUDAH TANDA TANGAN AKTA		
24	KELURAHAN PANIA	SEKRETARIS KOPERASI AKTA		
25	KELURAHAN TANAHMIRAH	DALAM PROSES		

Jayapura, 01 Juli 2025

9. Daftar Koperasi Merah Putih Di 25 Kelurahan Di Kota Jayapura
   Kepengurusan Akta Pendirian Koperasi Menggunakan Dana (Btt)
   Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

DAFTAR KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
(DOKUMEN PENDIRIAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA JAYAPURA)

10. Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih Oleh Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, Mh)



11. Peletakan Batu Dan Pembangunan Koperasi Merah Putih
Di 14 Kampung Di Kota Jayapura Tahun 2025



12. Bantuan Benih Ikan Nila Bagi Masyarakat Di 14 Kampung Dalam Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Yang Di Serahkan Oleh Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, M. Si)



- Dokumentasi Kegiatan Pasar Murah Dalam Rangka Walikota Turun Kampung Pada 14 Kampung Di Kota Jayapura 2025 Yang Di Buka Oleh Walikota Jayapura (Abisai Rollo, Sh, Mh)



- Bantuan Bibit Cabai Dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Kepada Masyarakat Di Kota Jayapura Tahun 2025



3. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi

- Siaran radio dalam rangka menginformasikan harga pasar ketersediaan barang dan harga;
- Rapat koordinasi TPID secara periodik;
- Rapat terbatas OPD;
- Sidak menjelang hari raya (hari besar keagamaan);
- Stasiun Agro Bisnis (STA) harus difungsikan kembali agar petani yang ingin memasarkan hasil pertaniannya dapat tereallisasi dengan baik;
- Perlu adanya tindakan terhadap pemotongan hewan yang masih melakukan pemotongan di luar (RPH);
- Pengawasan masih lemah sehingga perlu melibatkan kepolisian;
- Harga yang di naikan oleh pedagang dan belum penngawasan yang tegas;
- Perluas kerjasama antar daerah Surplus.

4. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi

- Program kerja secara terjadwal disiapkan oleh TPID;
- Melaksanakan penjadwalan Walikota Turun kampung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan bibit ikan, bantuan sembako, melaksanakan Program Nasional, peletakan batu program Koperasi merah putih dan Rumah layak huni, kesehatan gratis, bantua bibit bawaang merah dan cabai kepada perani di 14 kampung di Kota Jayapura dari Bulan Maret s/d bulan Juli 2025;

- Melajutkan MOU antara Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, dan dilanjutkan dengan persiapan kerja sama Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura;
- Stabilitas harga melalui operasi pasar dilakukan oleh OPD terkait lintas koordinasi TPID;
- Penyelenggaraan pasar murah dengan melibatkan secara langsung Petani Sayur/Buah : sebanyak 48 kali di 25 Kelurahan;
- Dukungan Transportasi untuk Pertanian dalam pelaksanaan pasar murah;
- Menyiapkan lahan bawang merah dan cabai sebagai komoditas yang sering menyumbang inflasi;
- Berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk membantu petani berupa sarana prasarana pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian;
- Melaksanakan Program /Kegiatan Festifal Kampung Nelayan yang dapat membantu UKM Masyarakat Lokal;
- Melaksanakan Koordinasi pada Biro Perekonomian Provinsi Papua;
- Melaksanakan Koordinasi pada BPS Kota Jayapura setiap bulan untuk mengetahui perkembangan inflasi;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua;

Demikian laporan Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan II Bulan Januari sampai bulan Maret 2025 yang kami sampaikan, Atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

A.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt.SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE,S.Sos,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19690319 199610 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Walikota Jayapura sebagai laporan.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 03 September 2025

Nomor : 500.1/1428/SET
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : Laporan Triwulan III Tahun 2025

K e p a d a
Yth. Ketua Sekretariat TPIP
(Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan)Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia
Di –
JAKARTA

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH TRIWULAN III

1. BULAN JULI 2025 :

IHK Nasional bulan Juli 2025
IHK 108, 60
Inflasi Bulanan 0, 30%
Inflasi Tahun Kalender 1, 69 %
Inflasi Tahun ke Tahun 2, 37 %

IHK Kota Jayapura bulan Juli 2025
IHK 105, 88
Inflasi Bulanan -0, 34 %
Inflasi Tahun Kalender 0, 21 %
Inflasi Tahun ke Tahun 1, 40 %

Adapun Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi Bulanan (MtM) :

1. Tomat 0, 2072
2. Cabai Rawit 0, 1317
3. Sekolah Menengah Pertama 0, 1037
4. Sekolah Dasar 0, 0601
5. Bawang Merah 0, 0587

Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi YoY :

1. Emas Perhiasan 0, 5037
2. Kopi Bubuk 0, 1643
3. Tomat 0, 1425
4. Cabai Rawit 0, 1158
5. Sigaret Kretek Mesin 0, 1146

Sumber : BPS Kota Jayapura

2. Bulan Agustus 2025 :

IHK Nasional 108, 51

Inflasi Bulanan -0, 08 %

Inflasi Tahun Kalender 1, 60 %

Inflasi Tahunan 2, 31 %

IHK Kota Jayapura bulan Agustus 2025
IHK 104, 90
Inflasi Bulanan -0, 93 %
Inflasi Tahun Kalender -0, 72 %
Inflasi Tahun ke Tahun 0, 54 %

Adapun Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi Bulanan (MtM) :

1. Beras 0, 0883
2. Angkutan Laut 0, 0535
3. Bawang Merah 0, 0437
4. Sirih 0, 0396
5. Cabai Rawit 0, 0252

Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi YoY :

1. Emas Perhiasan 0, 4989
2. Bawang Merah 0, 2386
3. Tomat 0, 1912
4. Beras 0, 1614
5. Kopi Bubuk 0, 1557

3. **Bulan September 2025 :**

IHK Nasional 108, 74

Inflasi Bulanan -0, 21 %

Inflasi Tahun Kalender 1, 82 %

Inflasi Tahunan 2, 65 %

IHK Kota Jayapura bulan Agustus 2025
IHK 104, 90
Inflasi Bulanan -0, 04 %
Inflasi Tahun Kalender -0, 68 %
Inflasi Tahun ke Tahun 0, 99 %

Adapun Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi Bulanan (MtM) :

1. Angkatan Udara 0, 2338
2. Tomat 0, 2308
3. Buah Pinang 0, 0915
4. Emas Perhiasan 0, 0790
5. Udang Basah 0, 0105

Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi YoY :

1. Emas Perhiasan 0, 5595
2. Tomat 0, 4340
3. Bawang Merah 0, 2913
4. Beras 0, 1651
5. Kopi Bubuk 0, 1364

Gerakan Pangan Murah pada Kampung Skouw
Minggu, 14 September 2025



Komoditi yang terjual :
Beras SPHP : 1.500 Kg (300 sak)
Gula : 44 Kg
Minyak : 48 Liter

Gerakan Pangan Murah pada Kelurahan Argapura
Jumat, 12 September 2025



Stok yang dibawa : 500 kg (100 sak)
Stok yang Laku : 310 Kg (62 sak)
Sisa Stok : 190 Kg (38 sak)

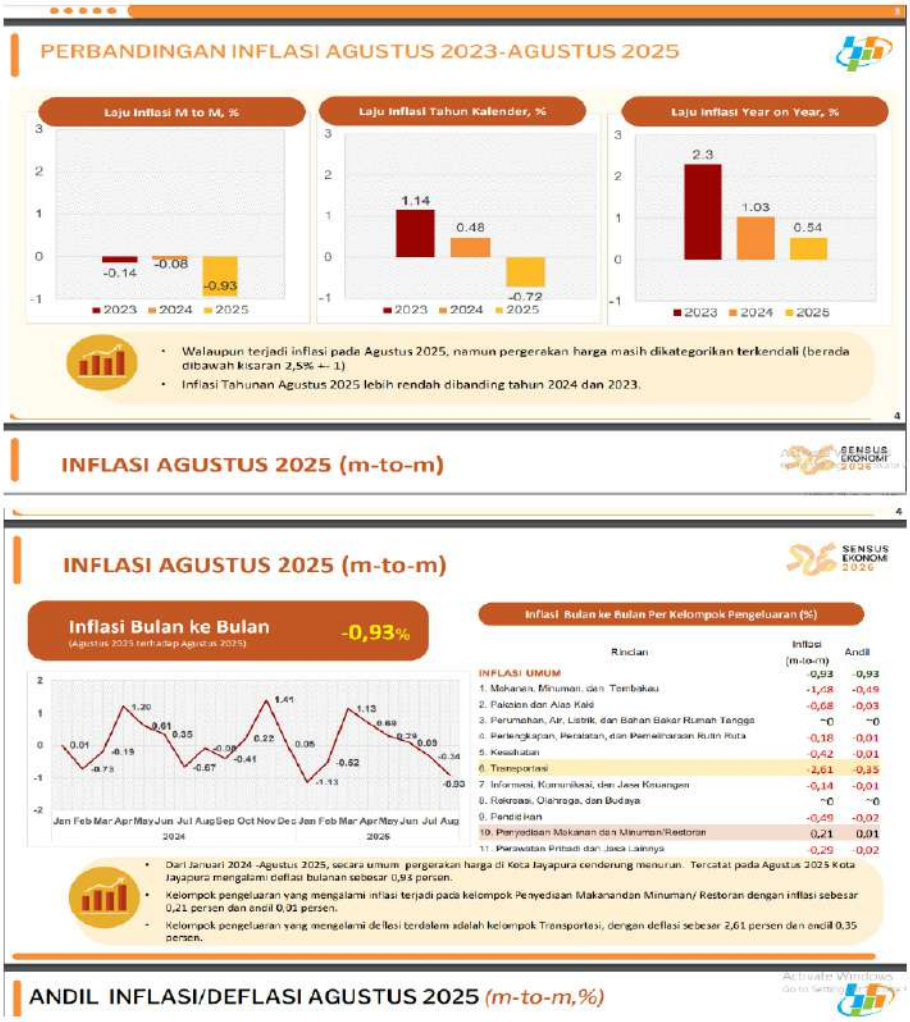
Gerakan Pangan Murah pada Kampung Kayo Pulau
Senin, 15 September 2025



Komoditi yg laku :
Beras sphp : 20 sak
Minyak goreng botol 1 ltr : 21 Liter

Gerakan Pangan Murah pada Kampung Yoka
Minggu, 12 September 2025





Sumber : BPS

1. **Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi**
   - Stok beras naik karna masih menunggu penyaluran beras SPHP yang belum masuk di Papua.dan beras yang naik pun bukan beras SPHP melainkan beras medium non bulog.

- Harga cabe rawit merah yang masih mengalami kenaikan 100 000 – 125.000/kg pada minggu pertama bulan Agustus
- Harga Bawang merah mengalami kenaikan pada bulan Agustus minggu ke dua sampai dengan minggu ke 4 berkisar antara 65.000 – 70.000/kg



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA
JL. DAGU KOTA NO. 1 ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN
JAYAPURA - PAPUA
DATA HARGA SEMBAKO PERIODE JULI 2025
LAPORAN HARIAN PASAR

No	JENIS BARANG	SATUAN	1-Aug-25	4-Aug-25	5-Aug-25	7-Aug-25	8-Aug-25	11-Aug-25	12-Aug-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beras Kualitas Medium (Bulog)	Kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	Daging Ayam Ras Segar	Kg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
3	Gula Lokal	Kg	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	Cabe Merah Besar	Kg	70,000	60,000	70,000	100,000	100,000	80,000	80,000
5	Cabe Rawit Merah	Kg	100,000	100,000	100,000	110,000	125,000	100,000	100,000
6	Bawang Merah	Kg	60,000	60,000	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000
7	Bawang Putih	Kg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8	Minyak Goreng (Premium)	Lit	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
9	Daging Sapi Lokal	Kg	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
10	Telur Ayam	Kg	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
11	Udang	Kg	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
12	Ikan Kembung	Kg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
13	Mie Instan Rebus	Pcs	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
14	Tempe	Kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
15	Tahu	Kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
16	Susu Dancow	400 gr	65,000	65,000	65,000	55,000	55,000	55,000	55,000
17	Susu SGM Balita Vanilla	400 gr	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
18	Terek	Kg	8,000	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
19	Pisang Barangan	Kg	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Tepung Terigu	Kg	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
21	Minyak Goreng Kita	Lit	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA JAYAPURA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA
JL. PASAR KOTA NO.1 ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN
JAYAPURA - PAPUA

DATA HARGA SEMBAKO PERIODE SEPTEMBER 2025

LAPORAN HARIAN PASAR

No.	JENIS BARANG	SATUAN	1-Sep-25	2-Sep-25	3-Sep-25	4-Sep-25	8-Sep-25	9-Sep-25	10-Sep-25	11-Sep-25	12-Sep-25	15-Sep-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Beras Kualitas Medium (Dolog)	Kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	Daging Ayam Ras Segar	Kg	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
3	Gula Curah	Kg	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	Cabe Merah Besar	Kg	65,000	80,000	75,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000
5	Cabe Rawit Merah	Kg	80,000	80,000	75,000	70,000	70,000	70,000	70,000	65,000	80,000	80,000
6	Bawang Merah	Kg	65,000	65,000	65,000	60,000	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000	65,000
7	Bawang Putih	Kg	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
8	Minyak Goreng (Premium)	Ltr	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
9	Daging Sapi Lokal	Kg	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
10	Telur Ayam	Kg	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
11	Udang	Kg	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
12	Iga Kambing	Kg	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
13	Mie Instan Bakso	Pcs	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
14	Tempe	Kg	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
15	Tahu	Kg	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
16	Susu Dancow	800 gr	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
17	Susu SGM Balita Vanila	400 gr	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
18	Jeruk	Kg	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000
19	Pisang Barangan	Kg	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Tomat Tanjo	Kg	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
21	Minyak Goreng Kita	Ltr	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA JAYAPURA

2. **Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi**

- Pada Triwulan III tahun 2025 ,Pemerintah Kota Jaapura telah bersinergi dengan lintas instansi dan Aprindo dalam pelaksanaan gerakan pasar murah ,sebanyak 12 kali ,dari bulan juli pelaksanaan gerakan pasar murah sebanyak 4 kali ,bulan Agustus sebanyak 4 kali ,bulan September sebanyak 4 kali :
  - kegiatan pasar murah yang dilaksanakan sebagai upaya keterjangkauan harga di Kota Jayapura ,pada bulan Juli sebanyak (4 kali) dalam sebulan pada :
    Distrik Jayapura selatan Kelurahan Argapura, pada tanggal 23 Juli 2025
    Distrik Abepura Kelurahan Yobe, paa tangggal 24 Juli 2025
    Distrik Muara tami kelurahan Koya Barat, Pada tanggal 30 Juli 2025
    Distrik Abepura kelurahan Asano pada tanggal 31 Juli 2025

JADWAL PELAKSANAAN PASAR MURAH SUBSIDI KOTA JAYAPURA
BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2025

No	Waktu	Tempat	
1	23 Juli 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Argapura
2	24 Juli 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Yobe
3	30 Juli 2025	Distrik Muara Tami	Kelurahan Koya Barat
4	31 Juli 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Asano
5	14 Agustus 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Abepantai
6	15 Agustus 2025	Distrik Heram	Kelurahan Waena
7	28 Agustus 2025	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Hamadi
8	29 Agustus 2025	Distrik Heram	Kampung Waena
9	18 September 2025	Distrik Heram	Kampung Yoka
10	19 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Waimhorok
11	25 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Awiyo
12	26 September 2025	Distrik Abepura	Kelurahan Kotabaru

Komoditas yang di jual pada pasar murah di bulan Juli S/D September 2025 antara lain :

Cabe 618 Kg degan harga 25.000 s/d

B.Merah 792 Kg

B.Putih 751 Kg

Tomat 546 Kg

Daging ayam 320 Kg

Telur 1.505 Rak





- Harga paket yang terdiri dari : Beras Premium 5 Kilo, Gula 1 Kilo, Minyak Goreng 1 Liter dengan total harga Rp 75.000 yang dilaksankan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Pelaksanaan untuk Bulan Juli S/D September 2025 sebanyak 2400. Paket 12 Kelurahan pada 3 Distrik di Kota Jayapura.
- Penjulan Ikan Pada Pasar murah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Jayapura dari Bulan Juli S/D September 2025

  sebanyak 360 Ekor,

  - Ikan Ekor Kunig Rp 35 .000
  - Ikan Cakalang Rp 30.000
  - Ikan Tongkol Rp 20.000
  - IKan Kembung Rp 35.000

- Penjualan Beras SPHP ,Gula dan Minyak goreng yang dilaksanakan oleh BULOG dari bulan Juli S / D September 2025 sebanyak di 12 Kelurahan di Kota Jayapura pada 3 Distrik di Kota Jayapura tahun 2025 .

- Surat Permintaan Rekomendasi pada Dinas Ketahanan pangan untuk penjualan beras SPHP pada kegiatan pasar murah di Kota Jayapura


PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Sebagai langkah Ketersediaan Pasokan di Kota Jayapura beberapa upaya yang telah dilakukan pada triwulan III antara lain :
  - Permohonan Surat Rekomendasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura dalam Penjualan Beras SPHP oleh Bulog pada pelaksanaan pasar murah di Kota Jayapura yang dilaksankan mulai dari bulan Juli 2025


PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKREATRIAT DAERAH

Gerakan Pasar Murah sebagai upaya keterjangkauan harga di Kota Jayapura pada tahun 2025
Kegiatan bulan Juli 2025









Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Bulan Juli Tahun 2025

Rapat TPID Kota Jayapura yang di rangkaikan dengan Program Nasional
pada tanggal 7 Juli 2025
Pimpinan Rapat Wakil Walikota Jayapura





PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKREATRIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrag Telp. (0967) 531021

Jayapura, 07 Juli 2025

Nomor : 900.2.3/3665/SET
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth.
Di –
JAYAPURA

Berdasarkan Rediagram dari Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jendral Nomor : 900.2.3/3665/SJ terkait upaya Pengendalian Inflasi di Daerah dirangkaian dengan Program Prioritas Presiden :

1. Program MBG;
2. Program Pembangunan 3 Juta Rumah;
3. Program Pembenahan Koperasi Merah Putih;
4. Program Pemerikasaan Kesehatan Gratis;
5. Program Sekolah Rakyat;
6. Dan Program SMA Unggul Garuda (SKUGAR).

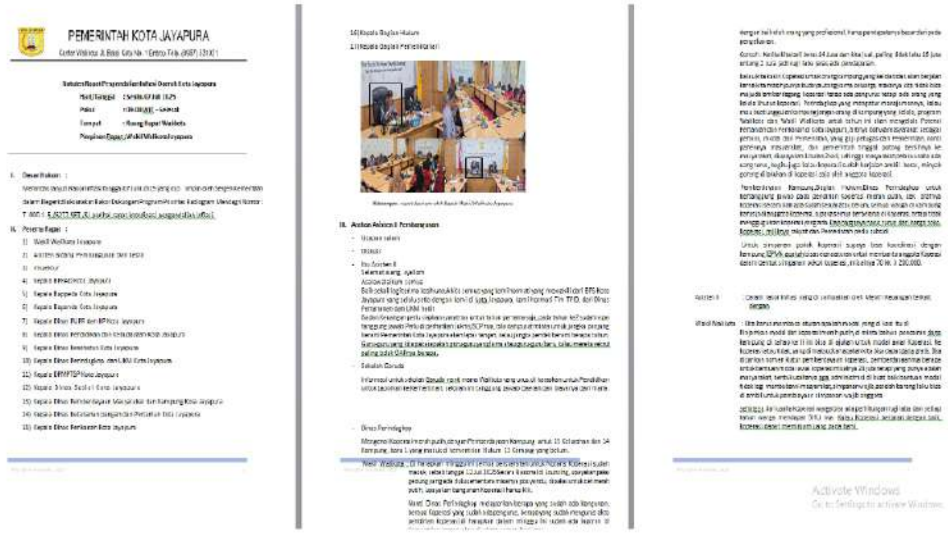
Maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk hadir dan mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

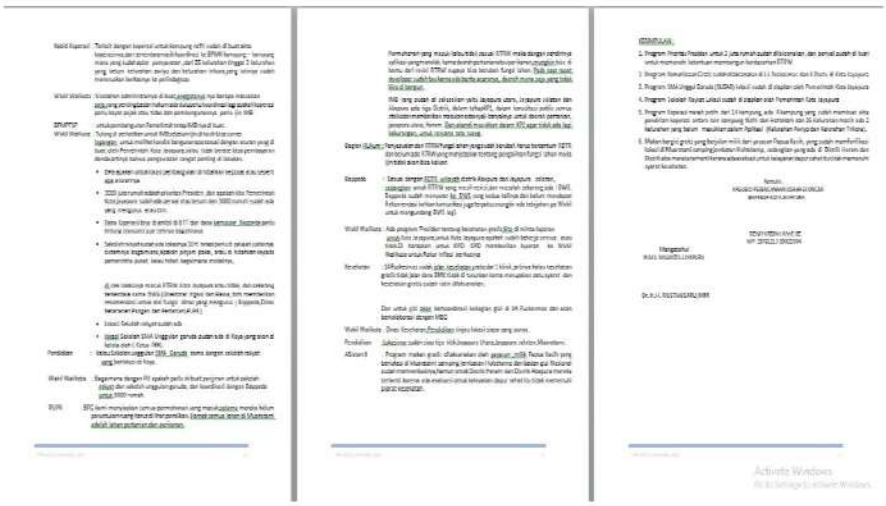
Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Jam : 10.00 Wit – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota Jayapura

Demikian permohonan kami atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
ELIAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700130 199610 1 010

Tembusan :
1. Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
3. Arsip

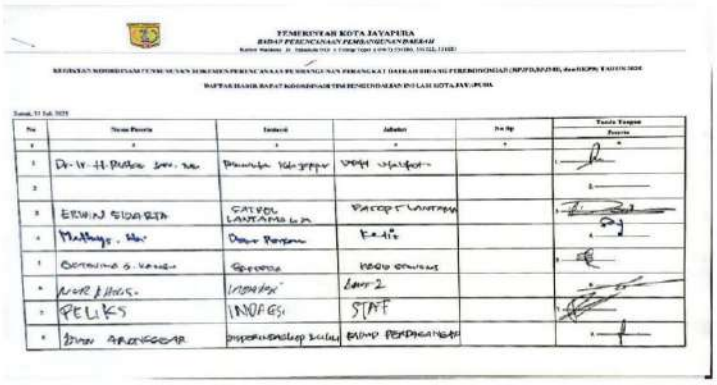

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA



Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Bulan Juli Tahun 2025







PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3	ERWIN SUWARTA	SATPOL PP	PASDAL LANTAMAL	
4				
5				
6				
7	PELIKS	INDAGSI	STAFF	
8				



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 22 Juli 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1					1.
2					2.
3	Hidayat T. Baramuli	Bank Indonesia	Pimpinan Wilayah	081344772647	3.
4	Yulieta Manitgazi	Dinas Perhubungan	Kabid Darat	085241394905	4.
5	Selvi	Dinas Perhubungan	Staf	082176308931	5.
6	Putri Mega	Dinas Perhubungan	Staf	082277744980	6.
7	Endang Lestari	DKPP	Kabid Tan. & Hort		7.
8	Deang - Kroma Faj	Bappeda	Kasubid		8.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nama/Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Ni' Nyoman Sri Astuti		Plt. Kis I		1.
2					2.
3					3.
4	Dinny Kesna Kaap	Bappeda	Kasubit		4.
5	Rifai	Inspektorat	AUDITOR		5.
6	Endah Wijaya	UKPP	Kasubag TU & Bina		6.
7	Hendry Us	DPUPR DKP	Kasie Ops		7.
8	Sugiyanto F	Perhubungan	Kasie Angkutan		8.

Rapat Koordinasi TPID Kota Jayapura Bulan Agustus 2025











PEMERINTAH KOTA JAYAPURA













PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TPID KOTA JAYAPURA





Gerakan Pasar Murah pada Bulan Agustus Tahun 2025





- Upaya upaya yang dilakukan dalam rangka ketersediaan Pasokan beras di Kota Jayapura pada bulan Agustus 2025 Kegiatan Pengolahan lahan padi oleh kelompok tani rukun Makmur Koya Barat Distik Muaratami Kota Jayapura .







- Bantuan benih cabe kepada masyarakat pada Hari Jumat 1,Agustus 2025 sebagai upaya ketersediaan Pasokan cabe di Kota Jayapura



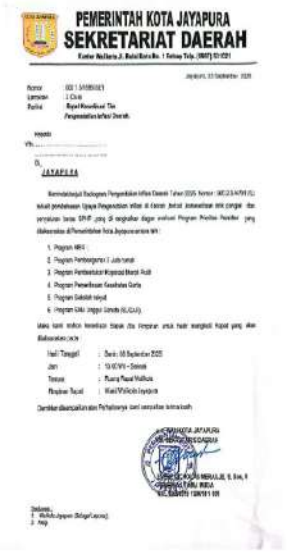




Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Bulan September Tahun 2025
Pimpinan Rapat Wakil walikota Jayapura







PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH

Kantor Walikota Jl. Baliem Baru No. 1 Telepon Telp. (0967) 531121

Jayapura, 15 September 2025

Nomor : 000.1.3/5555/SET
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kepada
Yth. .....
di
JAYAPURA

Berkenaan dengan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Nomor : 900.2.3/4791/SJ, telah ditindaklanjuti Upaya Pengendalian Inflasi di Daerah, berkaitan dengan hal tersebut kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang di laksanakan di Ruang Rapat Walikota Jayapura, yang akan membahas Program Prioritas Pengendalian Inflasi Daerah (PPID) yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Jayapura antara lain :

1. Program HBH ;
2. Program Pembangunan / Jalan tani ;
3. Program Pembentukan Kluster Mandiri Pupuk ;
4. Program Pemanfaatan Kawasan Gizi ;
5. Program Gerakan tanam ;
6. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) ;

Untuk hadir tepat waktu kehadiran Bapak /Ibu Pimpinan atau Pejabat yang ditunjuk Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 September 2025
Jam : 13:00 WIT – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

Demikian disampaikan dan Perhatiannya dari semuanya kami ucapkan terimakasih

WALIKOTA JAYAPURA
[illegible]
ABISAI RUMAKIESO, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196807191995111001

Tembusan :
1. Wakil Walikota Jayapura (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran : 2 (Dua)
Nomor : 000.1.3/5555/SET
Tanggal : 15 September 2025

DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. WALIKOTA JAYAPURA;
2. WAKIL WALIKOTA JAYAPURA;
3. KETUA DPRD KOTA JAYAPURA;
4. KAPOLRESTA JAYAPURA KOTA;
5. KOMANDAN KODIM 1701;
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
7. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
8. DANSATRIL LANTAMAL X;
9. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA;
10. KEGETDA X PRIMARA/DANA DINA KOTA;
11. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
12. KEPALA DINAS PERINDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA JAYAPURA;
13. KEPALA BPKAD KOTA JAYAPURA;
14. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA JAYAPURA
15. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
16. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA;
17. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA;
18. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA
19. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAYAPURA
20. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA;
22. KASUBDOL PPKOTA JAYAPURA;
23. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA;
24. KEPALA PT. PLN CABANG KOTA JAYAPURA;
25. KEPALA PDAM KOTA JAYAPURA;
26. KEPALA PT. PELINDO CABANG JAYAPURA;
27. KEPALA BULOG DIVRE KOTA JAYAPURA;
28. KEPALA BALAI KOSTAR PROVINSI PAPUA;
29. KEPALA BPS KOTA JAYAPURA;
30. KEPALA PT. PERTAMINA KOTA JAYAPURA;
31. KEPALA UPT PANTAI KAMAJI JAYAPURA;
32. KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
33. KASUBBID MONEV DITRESKRIMSUS POLDA PAPUA;
34. KEPALA BIDANG PEMBELIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA
35. KEPALA BIDANG PERTERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA
36. KEPALA BIDANG PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
37. KASUBBID PERENCANAAN USAHA EKONOMI BAPPEDA KOTA JAYAPURA
38. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA
39. KEPALA DINAS TENAGA KERJA;
40. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
41. KETUA APKINDO KOTA JAYAPURA
42.

WALIKOTA JAYAPURA
[illegible]
ABISAI RUMAKIESO, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196807191995111001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD/RPJPMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1					
2					
3	AGUS DAMDO M	PN Jayapura	KPN	082137247777	
4	Siswanto Agung N	Bank Indonesia	Asisten Direktur	0813 8235 7777	
5	Sugiyanto	BPS Kota Jayapura	KC BPS	0815 4499 1121	
6	Fransina A. Tumuju	BPKAD	Kabid perbend		
7	Rezdiantari D. W.	Bank Indonesia	Manajer		
8	Fitrajaya Nalesan	Pelindo	Asst. Manajer		



9	Ewar Mehue	Direksi	Kasie Hargas/Gin	082197116078	
10	Kepton Edowar	Sentral Technical Jr	Damkar Pttm	081533529824	
11	Rasid Mahdy	Perhumas	CO SA Papua	085563935520	
12	Kompol I Dewa	Polresta JPR Kota	Kasat Reskrim	081238175923	
13	JENS J. KONTAREN	PT. PELINDO TPK JAYAPURA	MANAGER OPERASI	082195249391	
14	SYUKRI	PT. ANGKASA PURA	STAF SDM	0812 4710 7400	
15	Paulus D. Waworundeng	PTAM Jayapura	Humas	085259596596	
16	MICKY W. MAMO	DPUPR PKP	KABID PKP	082238775307	
17	MARSELINA ARON	DKUPP - KOTA JAYAPURA KABID. POTENSI KEAWAN	KABID POTENSI PERTANIAN	081248447761	
18	Salomina Y. Pingkan Wo	DKPP	PLT. Kadis	085249503859	
19	Bambang.	PTAM Jayapura	Team Leader	082248826262	
20	ENTIS SUTISNA	PTAM Jayapura	Direksi		
21	Afrianti	Kasubag Pol Jpr	Penter	081247734900	

Rapat Tim Pengendalian Inflasi
tanggal 23 September 2025
Pimpinan Rapat Asisten 2 Setda Kota Jayapura



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 23 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1					1.
2	Widhi Hartanti	Pem. kota jayapura	Asisten II		2.
3	Muhamm. Sidik	Dinas Perinda	Kadis		3.
4	Firman	Dinkes	Admin SPM	081349869269	4.
5	MICKA W. MANU	DINAS PUPR PKP	kabid. PKP	082238775303	5.
6	Fawzah Lewa	Bappeda	Kabag Kesra		6.
7	DIAN ARONGGEAR	DISPERINDAGKOP & UKM	KASID PERDAGANGAN		7.
8	DANY . HOWAY	DKPP	Kasi . PRODUKSI		8.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kantor Walikota Jl. Mahakam NO. 1 Entrop Telp/fax (0967) 534786, 531122, 531021

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Selasa, 2 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6
1					1.
2	Sugiyarto	Bps Kota jayapura	Kepala	0813 4449 9121	
3	Widhi Hartanto	Pem. Kota Jayapura	Asisten Pemb. & Kesra		3.
4	Richard Nahumury	Bappeda	Plt. Kadispar	085244749095	4.
5	MILKA W. MANO	DPUPR PKP	Kabid PKP	082238775302	5.
6	Salomina Y. Fingkreuw	Dkpp	Plt. Kadis Dkpp		6.
7	M. Agussalim	Dinas Perikanan	Kabid Pdspp		7.
8	DAUD. HOWAY	DKPP	Kasi. PRODUKSI		8.

Rapat Koordinasi Pengendal;ian Inflasi Daerah
Pada tanggal 2 September 2025
Pimpinan Rapat Wakil Walikota Jayapura





UNDANGAN RAPAT TPID TANGGAL 2 September 2025
Pimpinan Rapat Wakil Walikota Jayapura

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKREATRIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 01 September 2025

Nomor : **500.6.1/1587/SET**
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada
Yth.
Di –
JAYAPURA

Berdasarkan Radiogram dari Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jendral Nomor : 500.2.3/3669/JJ terkait upaya Pengendalian Inflasi di Daerah dirangkaian dengan Program Prioritas Presiden :

1. Program MBG;
2. Program Pembangunan 3 Juta Rumah;
3. Program Pembentukan Koperasi Merah Putih;
4. Program Pemeriksanaan Kesehatan Gratis;
5. Program Sekolah Rakyat;
6. Dan Program SMA Unggul Garuda (SUGAR).

Maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk hadir dan mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 02 September 2025
Jam : 09:00 Wit - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota Jayapura

Demikian penyampaian kami atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA JAYAPURA
PJ. SEKRETARIS DAERAH

NICOLAS MERAUJE, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 010

Tembusan:
1. Walikota Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
3. Arsip.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Notulen Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura Hari/Tanggal : Selasa, 02 Sep 2025

Pukul : 10.00 WIT – Selesai

Tempat : Ruang Rapat Walikota

Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

I. **Dasar Hukum :**

Menindak lanjuti Rakor Inflasi tanggal 02 September 2025 yang di pimpin oleh Sekjen Kementrian dalam Negeri dilaksanakan Rakor Dukungan Program Prioritas Radiogram Mendagri Nomor : T. 000 1. S /6277 SET /SJ perihal rapat koordinasi pengendalian inflasi.

II. **Peserta Rapat :**

1) **Asisten II Pembangunan dan Kesra**
2) **Satrol Lantamal X**
3) **Kepala BPS Kota Jayapura**
4) **Kapolres Kota Jayapura**
5) **Kasubbid Indagsi Polda Papua**
6) **Kepala Bulog Provinsi Papua**
7) **Inspektorat**
8) **Kepala Bappeda Kota Jayapura**
9) **Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura**
10) **Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura**
11) **Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura**
12) **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura**
13) **Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Jayapura**
14) **Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura**
15) **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura**









Gerakan pasar murah bulan September 2025









- Pelaksanaan Pengawasan harga bahan Pokok oleh di pasar
  oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura pada bulan September tahun 2025.



DOKUMENTASI PENGAWASAN HARGA BAHAN POKOK DI PASAR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025



- Dari Hasil Pengawasan di Lapangan pada pasar tradisional dan moderen maka di keluarkan SK Harga Acuan Penjualan agar harga tidak di jual terlalu tinggi .



4

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Jayapura
Nomor : 188.4/307/ Tahun 2025
Tanggal : 8 Juli 2025

DAFTAR HARGA ACUAN PENJUALAN DI KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KOMODITAS	HARGA TERENDAH (Rp.)	HARGA TERTINGGI (Rp.)
1	2	3	4
1	Cabai	60.000	75.000
2	Buah Tuna	35.000	50.000
3	Buah Cakalang	30.000	45.000
4	Buah Tongkol	20.000	40.000

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200012 2 012

Jadwal Pelaksanaan Pangan Murah (GPM) di Kota Jayapura pada Bulan September s/d Desember 2025

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jln. Balai Kota No. II Gedung Dinas Otonom Lantai 3 Entrop

Nomor :520/248/IX/2025
Tanggal :9 SEPTEMBER 2025

JADWAL PELAKSANAAN PANGAN MURAH
BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN 2025

NO	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	
		DISTRIK	KELURAHAN
1	13-Sep-2025	DISTRIK JAYAPURA UTARA	KEL. ANGKASA
	24-Sep-2025	DISTRIK JAYAPURA UTARA	KEL.IMBI
2	30-Sep-2025	DISTRIK JAYAPURA SELATAN	KEL.ENTROP
	3-Oct-2025	DISTRIK JAYAPURA SELATAN	KEL.ARDHIPURA
3	8-Oct-2025	DISTRIK ABEPURA	KEL.ABE PANTAI
	15-Oct-2025	DISTRIK ABEPURA	KAMPUNG KOYA KOSO
4	5-Nov-2025	DISTRIK HERAM	KEL.HEDAM
	12-Nov-2025	DISTRIK HERAM	WAENA KAMPUNG
5	8-Dec-2025	DISTRIK MUARA TAMI	KAMPUNG SKOUW MABO
	17-Dec-2025	DISTRIK MUARA TAMI	KAMPUNG KOYA TENGAH
6	WAKTU PELAKSANAAN : SEPTEMBER S/D DESEMBER		
	PUKUL : 09.00 - 13.00 WIT		
7	SARAN		
-	RENCANA DAN ANGGARAN BIAYA		
-	PELAKSANAAN YANG TIDAK TERCOVER		

MENGETAHUI,
PLH.KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA JAYAPURA

SALOMINA Y. FINGKREUW,S.Sos
PEMBINA
NIP. 19800917200012 2000



Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka ketersediaan Pasokan di keluran Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 12 September 2025







Gerakan Pangan Murah (GPM) Kampung Skouw Distrik Muaratami Kota Jayapura pada hari Minggu, 14 September 2025



Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Bulan September Tahun 2025









PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1	ABISAI ROLLO, SH, MH		WALI KOTA		
2	Wiehni Herlawati		Asisten Pemb.		
3					
4	Sabarina Y. Fingkreuw,SE	DKPP	Plt Kadis	085244432739	
5	RYAN ZULYENDRI	BPS Kota Jpr	Statistisi Ahli Pertama	0811 6046018	
6	Ucmi Nur S.R	BPS Kota Jpr.	Statistisi Ahli Pertama	082333847545	
7	Dessy Kaaf	Bappeda	Kasubid		
8	Welka W. RAMO	DPUPR - PKP	Kabid PKP	082230775307	

	Ryan APONGSEWAR	Inspektorat Daerah Kota Jpr	Ketua Pemeriksa		
	Rodrik Tecuari	DKPP	Staf Ahli Bidang		
	Stanley V. Siwenpy	Perikanan	Ka. UPTD PPHP		
	Badrah Anggraheni	Dinas Perhubda	Fungsional PK & P		
	M. RIPAI	INSPEKTORAT	AUDITOR		
	Yolsen Maraborar	Dinas Sosial	Sekretaris		



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, 03 September 2025

Nomor : 000.1.3/1685/SET
Lampiran : 2 (Dua)
Perihal : ***Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah***

Kepada
Yth. .....
.....
Di
JAYAPURA

Menindaklanjuti Radiogram Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Nomor : 500.2.3/4701 /SJ terkait pembahasan Upaya Pengendalian Inflasi di daerah ,terkait ketersediaan stok pangan dan penyaluran beras SPHP ,yang di rangkaikan degan evaluasi Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan di Pemerintahan Kota Jayapura antara lain :

1. Program MBG ;
2. Program Pembangunan 3 Juta rumah
3. Program Pembentukan Koperasi Merah Putih
4. Program Pemeriksaan Kesehatan Gartis
5. Program Sekolah rakyat
6. Program SMA Unggul Garuda (SUGAR).

Maka kami mohon kesediaan Bapak /Ibu Pimpinas untuk hadir mengikuti Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 September 2025
Jam : 13.00 Wit – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Walikota
Pimpinan Rapat : Wakil Walikota Jayapura

Demikian disampaikan atas Perhatiannya kami sampaikan terma kasih.

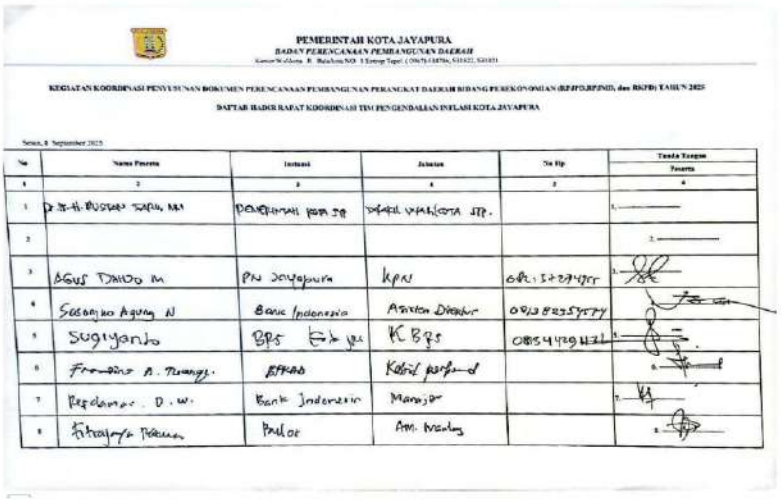
a.n. WALIKOTA JAYAPURA
SEKRETARIS DAERAH

EVERT NICHOLAS MERAUJE, S. Sos, M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680310 199610 1 001

Tembusan :
1. *Walikota Jayapura (Sebagai Laporan)*
2. *Arsip*

1. WALIKOTA JAYAPURA;
2. WAKIL WALIKOTA JAYAPURA
3. KETUA DPRD KOTA JAYAPURA;
4. KAPOLRESTA JAYAPURA KOTA;
5. KOMANDAN KODIM 1701;
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
7. KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA JAYAPURA;
8. DANSATROL LANTAMAL X;
9. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA;
10. ASISTEN II PEMBANGUNAN DAN KESRA
11. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA;
12. KEPALA DINAS PERINDUSTRIA DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA JAYAPURA;
13. KEPALA BPKAD KOTA JAYAPURA;
14. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA;
15. KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA;
16. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA;
17. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA;
18. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA;
19. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAYAPURA;
20. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA;
22. KASATPOL PP KOTA JAYAPURA;
23. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAYAPURA;
24. KEPALA PT. PLN CABANG KOTA JAYAPURA;
25. KEPALA PDAM KOTA JAYAPURA;
26. KEPALA PT. PELINDO CABANG JAYAPURA;
27. KEPALA BULOG DRIVE KOTA JAYAPURA;

Daftar hadir rapat tim Pengedalian Inflasi Daerah Kota Jayapura
pada tanggal 8 September 2025



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD/RPJMD), dan RKPD TAHUN 2025

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI KOTA JAYAPURA

Senin, 8 September 2025

No	Nama Peserta	Instansi	Jabatan	No Hp	Tanda Tangan Peserta
1					1.
2					2.
3	AGUS DANDO M	PN Jayapura	KPN	082152274757	3.
4	Sesanjiko Agung N	Bank Indonesia	Asisten Direktur	0813 8235 5574	4.
5	Sugiyanto	BPS	KC BPS	0854 4289 4321	5.
6	Fransiska A. Tuanaya.	BPKAD	Kabid perbend		6.
7	Rezdamar. D. W.	Bank Indonesia	Manajer		7.
8	Fitrayati Perwira	Bulog	Adm. Manag		8.



Notulen Rapat TPID yang dirangkaikan dengan Program Nasional .

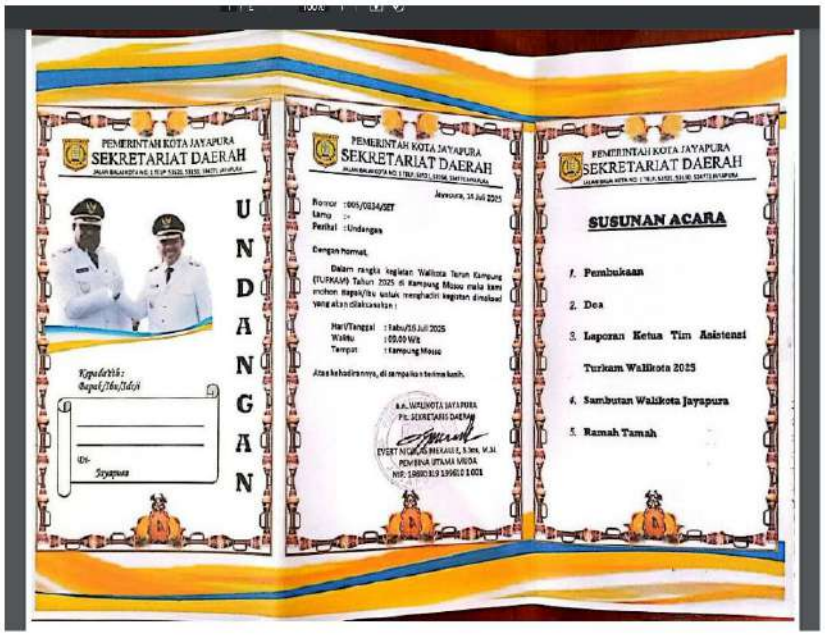






Rekomendasi :

1. Program Prioritas Presiden perlu dilakukan.
2. Semua OPD yang berakitan langsung dengan Program Nasional untuk dapat mengimput data yang diminta
3. Makan Gizi Gratis yang dilakukan perlu kami mendapat laporan dari Pemerintah Kota Jayapura dan di harapkan untuk bahan lokal dapat di ambil dari petani di Kota jayapura ,dan bukan di datangkan dari Luar ,sehingga petani di Kota Jayapura dapat terbantu.



Melaksanakan Pencanangan Penanaman cabai di Kampung Mosso Distrik Muaratami Oleh Walikota Jayapura pada tanggal 24 September 2025 dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah di Kota Jayapura pada tahun 2025.







Bibit Cabai sebagai simbolis gerakan menanam cabai di Kampung Mosso Distrik Muaratami pada tanggal 24 September 2025



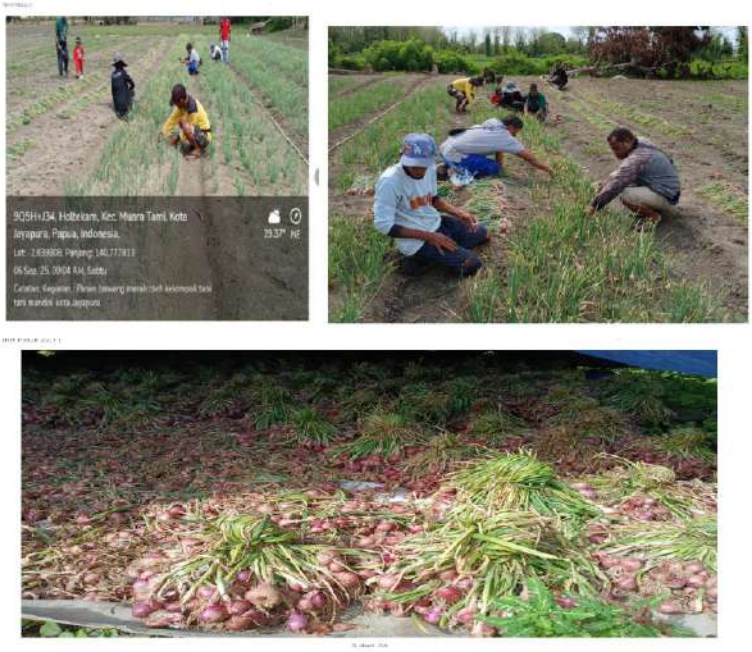

- Penerbitan SK Pelaksanaan kebijakan antara lain :
- Harga Acuan Penjualan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada Bulan Juli Tahun 2025







- Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Bawang merah di Kota Jayapura dilakukan kegiatan panen Bawang merah oleh kelompok tani mandiri Holtekamp Distrik Muaratami pada Sabtu, 6 September 2025.



- Surat Penjajakan Kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Kota Jayapura dalam rangka ketersediaan Pasokan kebutuhan pangan di Kota Jayapura ,dan pemberian


PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT TPID

3. **Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi**

- Perlunya Perbaikan sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga tidak adalagi pemotonga di luar RPH dan terjadi di pemotongan di halaman rumah warga yag sangat mengganggu dari sisi kesehatan
- harapan kami RPH dapat di perbaiki sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Jayapura ,tetapi dapat di gunakan untuk pemotongan hewan yang higenis dan bersih sesuai SOP yang benar.
- Perlu adanya Cold Storage yang dapat membantu petani dalam penyimpanan Cabe atau Bawang merah ,tomat ketika produksi melimpah ,dan pada saat harga komoditas Cabe ,Bawangdan Tomat naik dapat di jual kembali sehingga harga dapat terjangkau
- Perlu adanya Peningkatan Pengawasan harga pangan di Kota Jayapura sehingga tidak terjadi penimbunan dan harga semakin naik.

4. **Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi**

- Melajutkan MOU antara Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, untuk meningkatkan kelancaran Distribusi , dan Ketersediaan pasokan
  - Komoditas Holtikulura :,CabaiRawit,Cabai merah,dan bawang merah
  - Tanaman pangan : Jagung,
  - Peternakan : Telur ayam dan daging ayam ras
- Pengawasan Pada harga pangan perlu di tingkatkan.
- Peningkatan Penyulu pertanian ,dan Pendampingan bagi Petani Milenial .
- Perlu adanya pemeliharaan dan Renovasi RPH Kota Jayapura untuk memberikan manfaat bagi masyarakat untuk daging yang higenis dan serta tidak ada pemotongan liar di luar RPH yang tidak memenuhi SOP.
- Menyiapkan lahan untuk komoditas cabe merah perlu di tinggaktkan dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada,sebagai upaya ,dalam ketresediaan pangan di Kota jayapura.

- Peningkatan Koordinasi pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk membantu petani berupa sarana prasarana pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian.
- Melaksanakan Program/Kegiatan vestifal kampung Nelayan dan juga kegiatan UMKM lainnya yang dapat membantu Masyarakat Lokal/ataupun pelaku usaha dalam peningkatan pendapatan .

Demikian laporan Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan I Bulan Januari sampai bulan Maret 2025 yang kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

A.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt.SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

EVERT NICOLAS MERAUJE,S.Sos,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19690319 199610 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Walikota Jayapura sebagai laporan.

1	RUSTAN SARU	Pemkot Jpr	Wakil Walikota		1.
2	Sugiyanto	BPS Kota Jayapura	Kepala	0813 [illegible]	2.
3	Widhi Hartanto	Pem. Kota Jayapura	Asisten Pemb. & Kesra		3.
4	Richard Nahumury	DISPAR	Plt. Kadispar	085244479305	4.
5	MIKA W. MANO	DPUPR PKP	Kabid PKP	082293775302	5.
6	Salomina Y. Fingkreuw	DKPP	Plt. Kadis DKPP		6.
7	M. Agussalim	Dinas Perkanan	Kabid PPSPP		7.
8	DAUD. HOWAY	DKPP	Fasi. PRODUKSI		8.

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

Jayapura, Januari 2026

Nomor : 500.2.6/0343/SET
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Perihal : Laporan Triwulan IV Tahun 2025

K e p a d a

Yth. Ketua Sekretariat TPIP
(Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan)Kementrian Koordinator Bidang Perekonomiaan Republik Indonesia

Di –

JAKARTA

1. Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan IV

a. BULAN OKTOBER 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK	Tingkat m2m	Tingkat y2d	Tingkat yoy	Andil inf m2m	Andil inf yoy Okt
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Umum	104,69	-0,24	0,92	0,53	-0,24	0,53
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,64	-0,97	-2,43	1,22	-0,31	0,41
Pakaian dan Alas Kaki	98,56	-0,03	-1,32	-1,12	0	-0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,34	0	0,46	0,48	0	0,08
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,49	0,23	-0,64	-0,25	0,01	-0,01
Kesehatan	105,84	0,16	2,34	1,25	0	0,03
Transportasi	104,48	-1,41	-6,61	-4,16	-0,19	-0,58
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,63	-0,01	-0,27	-0,6	0	-0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	103,32	0	0,51	0,51	0	0,01
Pendidikan	117,09	0	2,27	2,27	0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	103,48	0	0,31	0,33	0	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,66	3,16	8,89	7,23	0,25	0,56

Komoditi Penyumbang Inflasi	Persen
Emas Perhiasan	0,2513
Ikan Tuna	0,112
Sirih	0,0323
Daging Ayam Ras	0,0291
Ikan Asap	0,0253

Komoditas Penyumbang Deflasi	Persen
Tomat	0,274
Angkutan Udara	0,1885
Bawang Merah	0,1188
Cabai Rawit	0,0543
Buah Pinang	0,0457

b. **Bulan NOVEMBER 2025**

Kelompok Pengeluaran	IHK	Tingkat m2m	Tingkat y2d	Tingkat yoy	Andil inf m2m	Andil inf yoy Nov
1	2	3	4	5	6	7
Umum	106,46	1,69	0,76	0,8	1,69	0,8
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,52	2,75	0,25	0,23	0,91	0,07
Pakaian dan Alas Kaki	98,11	-0,46	-1,77	-1,9	-0,02	-0,07
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,34	~0	0,46	0,46	~0	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,73	-0,75	-1,38	-1,14	-0,03	-0,05
Kesehatan	105,88	0,04	2,38	1,06	~0	0,03
Transportasi	107,74	3,12	-3,69	-3,01	0,41	-0,42
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,61	-0,02	-0,29	-0,62	0	-0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	103,33	0,01	0,52	0,52	~0	0,01
Pendidikan	117,09	~0	2,27	2,27	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	103,48	~0	0,31	0,33	~0	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	128,86	5,05	14,39	14,36	0,42	1,09

Komoditi Penyumbang Inflasi	Persen
Ikan Tuna	0,4153
Angkutan Udara	0,3932
Buah Pinang	0,2293
Emas Perhiasan	0,141
Daging Ayam Ras	0,0853

Komoditas Penyumbang Deflasi	Persen
Cabai Rawit	0,0242
Kulkas / Lemari Es	0,0216
Ikan Ekor Kuning	0,0157
Minyak Goreng	0,0122
Bawang Merah	0,012

c. **BULAN DESEMBER 2025**

Kelompok Pengeluaran	IHK	Tingkat m2m	Tingkat y2d	Tingkat yoy	Andil inf m2m	Andil inf yoy Des
1	2	3	4	5	6	7
Umum	108,34	1,77	2,54	2,54	1,77	2,54
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,53	3,73	3,99	3,99	1,26	1,35
Pakaian dan Alas Kaki	97,69	-0,43	-2,19	-2,19	-0,02	-0,08
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,34	~0	0,46	0,46	~0	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,06	-0,67	-2,04	-2,04	-0,03	-0,09
Kesehatan	105,95	0,07	2,45	2,45	~0	0,06
Transportasi	111,31	3,31	-0,5	-0,5	0,44	-0,07
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,63	0,02	-0,27	-0,27	~0	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	107,33	3,87	4,41	4,41	0,05	0,06
Pendidikan	117,09	~0	2,27	2,27	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	103,72	0,23	0,54	0,54	0,02	0,04
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	129,49	0,49	14,95	14,95	0,05	1,13

Komoditi Penyumbang Inflasi	Persen
Angkutan Udara	0,3909
Ikan Tuna	0,2872
Ikan Cakalang / Ikan Sisik	0,2144
Bawang Merah	0,1913
Daging Ayam Ras	0,1797

Komoditas Penyumbang Deflasi	Persen
Angkutan Laut	0,0213
Kasur	0,0192
Bayam	0,0166
Tahu Mentah	0,0152
Sabun Deterjen Bubuk	0,0094



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi

- Harga cabai rawit yang naik dari 80.000/kg sampai dengan 100.000/kg saat bulan November 2025 sampai dengan bulan Desember 2025
- Harga Tomat yang naik dari 5000 /kg menjadi 20.000/ kg pada Bulan Desember 2025 .

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi

- Pelaksanaaan kegiatan Pasar Murah dan Gerakan pangan Murah
- Pada Triwulan IV tahun 2025 ,Pemerintah Kota Jaapura telah bersinergi dengan lintas instansi dan Aprindo dalam pelaksanaan gerakan pasar murah ,sebanyak 18 kali ,dari bulan Oktober 2025 pelaksanaan gerakan pasar murah sebanyak 4 kali, bulan November sebanyak 6 kali, dan desember sebanyak 6 kali.

LAPORAN KOMODITAS YANG DI JUAL PASAR MURAH

- Ayam lokal 23 kilo pasar 53.000/ kg di jual di pasar murah 40.000 berat 2 kilo, Beras Paket, beras 90.000, gula 21.000 dan minyak 21.000, Bawang merah 70.000 di pasar di jual 40.000, cabai di pasar 85.000 jual 60.000, bawang putih 50.000 jual 40.000, cabai besar di pasar 55.000 di jual 30.000, tomat 20.000 jual 15.000, Telur gret c pasar 65.000 jual 40.000, Sphp di pasar 65.000, jual 60.000, gula 20.000 kalau 19.000, minyak goreng kita premium 19.000-20.000 kalau dari bulog 18.500, Molto di toko 13.000 di jual 10.000, rinso 63.000 di jual 50.000, sunlight 1,5 di toko 26.000 di jual 20.000, minyak bimoli di toko 50.000 di jual 45.000, Buncis 1/2 10.000 di pasar 18.000, jagung 10.000 di pasar 15.000 kalau 1 karung jagung 50.kg 200.000-250.000. Sayur terong di pasar 100.000 1 karung, terong 6 buah di pasar 9.000 di jual di pasar murah 6.000.

- 20 ekor untuk ekor kuning, cakalang 10 ekor, biasa nya masing-masing ikan ekor kuning dam cakalang 30 ekor kalau sekarang ikan kurang cuman di bawa masing masing 10 ekor. Bawang di bawah 27 kilo, laku 20 kilo, Bawang putih 23 kilo laku 19 kilo, Cabai 20 kilo habis, cabai besar 10 kilo laku 8 kilo, tomat 26 kilo habis semua, telur 120 rak habis. Bulog jual beras sphp dari 50 karung sampai 150 karung sesuai lokasinya. Beras SPHP sisa 4 karung ukuran 5 kg, gula 25 bungkus.

- Paket 100-150 paket sembako, beras 5 kg, gula dan minyak 1 liter dan paket habis penjualan beras SPHP, gula dan minyak goreng yang dilaksanakan oleh BULOG dari bulan Oktober S/D Desember 2025 sebanyak di 18 kali di Kelurahan di Kota Jayapura pada 3 Distrik di Kota Jayapura Tahun 2025.

Pelaksanaan Sidak Bapok Pada Pasar moderen dan Pasar Tradisisinal dan Distributor di Kota Jayapura Menjelang Natal 2025.

➢ GERAKAN PASAR MURAH BULAN OKTOBER




KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN YOBE, DISTRIK ABEPURA
JUMAT, 24 OKTOBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
24


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN ASANO, DISTRIK ABEPURA
KAMIS, 30 OKTOBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
30



➢ **GERAKAN PASAR MURAH BULAN NOVEMBER**




KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN YABANSAI, DISTRIK HERAM
KAMIS, 20 NOVEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
20


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN HEDAM, DISTRIK HERAM
JUMAT, 21 NOVEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
21


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN VIM, DISTRIK ABEPURA
RABU, 26 NOVEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
26


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN BHAYANGKARA, DISTRIK JAYAPURA UTARA
KAMIS, 27 NOVEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
27



➢ **GERAKAN PASAR MURAH BULAN DESEMBER**




KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN GURABESI, DISTRIK JAYAPURA UTARA
JUMAT, 5 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
05


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KAMPUNG YOKA, DISTRIK HERAM
RABU, 10 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
10


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KAMPUNG WAENA, DISTRIK HERAM
KAMIS, 11 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
11


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN WAENA, DISTRIK HERAM
JUMAT, 12 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
12


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN
RABU, 17 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
17


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
GEBYAR PASAR MURAH PENGENDALIAN INFLASI
KELURAHAN ANGKASAPURA, DISTRIK JAYAPURA UTARA
KAMIS, 18 DESEMBER 2025
bulog
Gebyar Pasar Murah
TPID KOTA JAYAPURA
18

RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- **BULAN OKTOBER**






KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
RAPAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI VIA ZOOM MEETING
SENIN, 20 OKTOBER 2025


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
RAPAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI VIA ZOOM MEETING
SENIN, 27 OKTOBER 2025

➢ **BULAN NOVEMBER**







➢ **Bulan Desember**




KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
RAPAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI VIA ZOOM MEETING
SENIN, 8 DESEMBER 2025


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
RAPAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI VIA ZOOM MEETING
SENIN, 15 DESEMBER 2025


KOTA JAYAPURA
TPID KOTA JAYAPURA
RAPAT PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI VIA ZOOM MEETING
SENIN, 22 DESEMBER 2025

SIDAK BAPOK MENJELANG NATAL 2025
OLEH WAKLIKOTA JAYAPURA BERSAMA WAKIL WALIKOTA DAN FORKOPIMDA KOTA JAYAPURA






RUSTAN SARU


ASN KOTA JAYAPURA
BerAKHLAK





4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi

- Pengawasan terhadap harga pangan perlu di tingkatkan;
- Pedagang masih menaikan harga sesuka hati melebihi harga HET;
- Perlu Penegasan Hukum bagi pedangang yang bermain harga di pasar;
- Perlu di buka kerja sama lebih banyak lagi dengan champion cabe bahkan bawang merah dalam memenuhi kebutuhan pokok di Kota Jayapura;
- Penggunaan lahan tidur untuk komoditas cabe atau bawang;
- Anggaran untuk kegiatan pengendalian Inflasi masih minim dalam memberikan subsidi;
- Peningkatan Rapat Koordinasi TPID dengan Forkopimda dan ketua TPID bperlu di tingkatkan;
- Perbanyak Koordinasi dalam pengendalian Inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi

- Peningkatan Kegiatan Pasar murah dan penambahan bahan pokok yang akan dsi jual baik telur, daging dan cabai;
- Melanjutkan penjajakan untuk MoU dengan kabupaten lain di Papua;
- Melajutkan MOU antara Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom,dan dilanjutkan dengan persiapan kerja sama Kota Jayapura dan Kab.Jayapura;
- Stabilitas harga melalui operasi pasar dilakukan oleh OPD terkait lintas koordinasi TPID;
- Melaksanakan Koordinasi pada BPS Kota Jayapura setiap bulan untuk mengetahui perkembangan inflasi;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua.

Demikian laporan Perkembangan Inflasi Daerah Triwulan IV Bulan Oktober sampai bulan Desember 2025 yang kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

A.n. WALIKOTA JAYAPURA
Plt.SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



MUCHLIS KARIM, SE., MM., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710414 199712 1 001

Tembusan Yth :

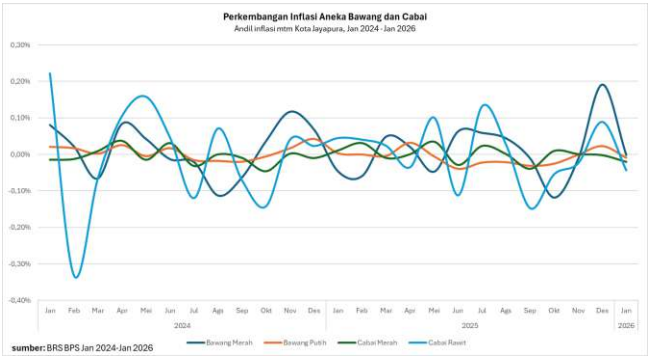
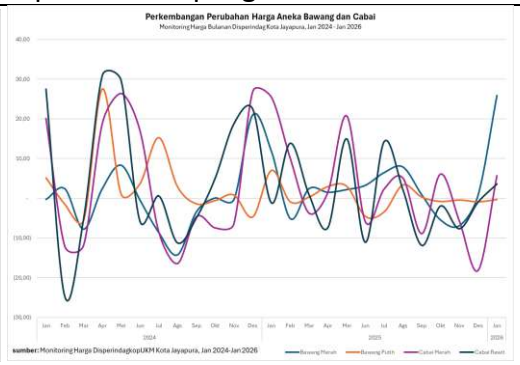
1. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Walikota Jayapura sebagai laporan.

Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2025

Kabupaten/Kota : KOTA JAYAPURA

Nama Program Kerja:	**KE**tersediaan **LA**han Cabai dan Bawang Merah guna Mengen**D**alikan **I**nflasi di Kota Jayapura (**KELADI**)

Latar belakang pelaksanaan program kerja :	Pengendalian inflasi di Kota Jayapura memiliki tantangan geografis yang signifikan sebagai wilayah ***remote area*** dengan topologi beragam. Kota Jayapura sebagai pusat perekonomian Papua juga menjadikan wilayah ini sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, termasuk bagi Provinsi Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebagai daerah konsumen, meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat mendorong dinamika harga yang perlu dikendalikan agar inflasi terkendali dalam sasaran nasional **2,5±1% (yoy)**. Di sisi lain, ketidakpastian cuaca, alih fungsi lahan dan keterbatasan ketahanan pangan lokal menjadi tantangan struktural pengendalian inflasi. Dengan kontribusi nilai konsumsi Jayapura yang mencapai sekitar **15% konsumsi kota IHK di kawasan Sulampua**, sinergi lintas K/L, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam program **KELADI** diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi berbasis **4K**, melalui pemanfaatan peran kota Jayapura sebagai *hub* ekonomi Papua. Upaya ini diarahkan untuk menjaga inflasi tetap stabil di tengah tren inflasi Papua yang tercatat **2,54% (yoy) pada Desember 2025**, meningkat dibandingkan **1,75% (yoy) pada Desember 2024**, namun tetap terjaga dalam sasaran inflasi Nasional. Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program **KELADI,** telah terlaksananya sinergi yang erat antar entitas di Jayapura, baik pemerintahan, instansi vertikal, hingga pihak swasta selaku pelaku usaha dan lebih khusus **kelompok tani** terkait di daerah. Pembiayaan program juga berkaitan dengan adanya sinergi yang terjalin, dibuktikan dengan total **realiasi anggaran APBD Kota Jayapura sebesar Rp. 5,698,174,500.00** dengan rincian kontribusi sumber **OTSUS Rp 4,842,331,000.00 , APBD DAU Rp. 389,112,000.00, DID Rp. 466,731,500.00** , serta kontribusi Bank Indonesia **Rp. 338.500.000,-** dalam rangkaian program **KELADI.**
Implementasi program/kegiatan	Implementasi program **KELADI** didasari atas potensi ekonomi yang berkaitan dengan inflasi pangan, dalam hal ini berarti komoditas pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Terutamanya adalah komoditas bawang dan cabai. Dalam memastikan terkendalinya inflasi Jayapura, Program **KELADI** memastikan pengelolaan komoditas cabai dan bawang merah dimulai dari hulu guna memastikan ketersediaan pasokan. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh OPD teknis terkait dilakukan dengan pemberian bantuan pupuk/benih/bibit tanaman/sarana prasarana pertanian. Selain itu, dilakukan juga pelatihan dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong produktivitas pertanian lokal melalui *capacity building* kelompok tani dengan melaksanakan demonstrasi ploting area seluas 1 Ha dengan teknologi ***digital farming - drip system***. *Pilot project* dilaksanakan pada beberapa kelompok tani yang diharapkan menjadi champion, diantaranya kelompok Tani Fajar Timur, Adil Makmur, Maju Jaya, Mandiri, Bambangpuan, Embun Pagi, dan Rukun Sentosa. Adapun, luasan pengelolaan lahan cabai mencapai sekitar **30 H**a dapat memproduksi **±24 ton/tahun** dan komoditas Bawang Merah dengan luas **5 ha memproduksi 120 ton/tahun**. Berdasarkan

	pada jumlah produksi Cabai dan Bawang yang sangat terbatas, maka diperkuat dengan melakukan kerjasama B2B, B2C, hingga G2G, guna memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dari program **KELADI**. Sinergi konkret lainnya tercermin dalam **MoU** antara Dinas Ketapang Kota Jayapura dan Distan Kab. Keerom yang berlaku hingga tahun 2028 perihal **kerjasama distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah nomor 521/2021 dan Nomor 52/667/BUP** serta diperkuat juga dengan **Kerjasama dengan Universitas Hasanudin perihal kajian pengembangan komoditas pertanian berbasis kawasan di Kota Jayapura** dengan nomor **520/210/VIII/2025 dan 3543UN4.1.7/PT.01.03/2025.** Selain itu, dalam mengoptimalkan dampak pengendalian inflasi hingga masyarakat sebagai konsumen akhir, di sisi hilir turut didorong partisipasi rencana aksi pengendalian inflasi berupa **pasar murah subsidi** bersumber alokasi dana APBD di 39 Kelurahan/Kampung di Kota Jayapura, sebanyak 48 kali, dengan harga yang **lebih murah sekitar 30%-40% terhadap harga di pasar tradisional** selama satu tahun berjalan di 2025. Dukungan antar lapisan masyarakat dan jabatan hingga pimpinan daerah pun positif, salah satunya tercantum pada **SK Walikota No.188.4/307/tahun 2025 perihal HAP** untuk komoditas aneka cabai yang meningkatkan dampak konkret pengendalian inflasi.
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan	  Implementasi program KELADI terbukti membuahkan hasil berupa meredamnya inflasi terutama pada komoditas aneka bawang dan cabai. Mengacu pada data BPS, tercatat bahwa andil inflasi mtm **aneka bawang di 2025** mengalami **penurunan 0,018% basis poin atau setara 86,76% dibandingkan inflasi di 2024**, begitupun dengan **aneka cabai** yang tercatat mengalami ***averaging down*** inflasi. Selain itu, dari sandingan data monitoring (Indeks Perubahan Harga) oleh Dinas Perindagkop dan UKM kota Jayapura, tercatat seluruhya mengalami perbaikan terhadap *volatilitas* perubahan harga, terutama **cabai rawit lebih rendah -6,58 basis poin atau setara 95,01% dibanding tahun 2024**, dan **bawang putih menjadi lebih rendah -3,05 basis poin atau setara 85,1%** lebih rendah tingkat gejolak perubahan harganya dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan program KELADI mendukung stabilitas harga terutama pada komoditas aneka bawang dan cabai yang menjadi fokus pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan lahan pertanian.
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program **KELADI**, perlu dilakukan: 1. Program keberlanjutan perihal *capacity building* bagi TPID, kelompok tani, hingga UMKM dalam memahami inflasi dan strategi pengendaliannya, tanpa menekan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung kemandirian pangan lokal. 2. Fokusan penyelesaian permasalahan struktural inflasi terutama perihal ketidakpastian cuaca, melalui *capacity building* penggunaan tools digital prakiraan cuaca BMKG serta penyaluran bantuan yang berfokus tidak hanya dorongan produktivitas tetapi juga mitigasi risiko dari adanya bencana alam yang menyebabkan gagal panen oleh petani lokal. 3. Penindaklanjutan secara tegas fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha di pasar, baik dalam konteks distributor, tengkulak, maupun retailer sebagai pemasok pangan.



Pemberian Bantuan Bibit Cabai, Panen Raya, dan Peningkatan Kompetensi Petani



Pemberian Bantuan Pupuk



Panen Raya Champion Bawang



Pemberian Bantuan Alat Produksi Pertanian



KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/307/ TAHUN 2025

TENTANG

HARGA ACUAN PENJUALAN DI KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program kerja pengendalian inflasi daerah di Wilayah Kota Jayapura, maka diperlukan stabilisasi dan mengurangi disparitas harga melalui 4 (empat) pilar keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Harga Acuan Penjualan di Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Thun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357;

4. Undang-Undang...../2



WALIKOTA JAYAPURA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

TENTANG

KERJASAMA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PANGAN SERTAPENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

Nomor: 521/2021
Nomor: 521/667/Bup

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-04-2023) kamiyang bertanda tangan di bawah ini:

I. Frans Pekey : Penjabat Walikota Jayapura, berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 1 Entrop Kota Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Piter Gusbager : Bupati Keerom, berkedudukan di Jalan Pemerintahan Nomor 1 Yuwanain Kabupaten Keerom, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama inidisebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Distribusi dan Pemasaran Pangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jl. Balai kota No. 1 Entrop Jayapura www.jayapurakota.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA JAYAPURA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

KAJIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN BERBASIS KAWASAN DI KOTA JAYAPURA

Nomor : 520/10/III/2025
Nomor : 3042/UN4.1.7/PT.01.03/2025

Surat perjanjian kerjasama ini berikut semua lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

Nama : Sekonina Y. Fingkreuw, S.Sos
NIP : 196909172009122001
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura
Alamat : Jln. Balaikota Gedung OtonomLantai 3, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.M(K)
NIP : 196709101996031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea Kota Makassar – Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA:

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk mengerjakan Kajian Pengembangan Komoditas Pertanian Berbasis Kawasan di Kota Jayapura;
(2) Untuk pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada point (1) perlu dipilih, ditetapkan dan ditunjuk pelaksana pekerjaan tersebut;
(3) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan melalui MoU Pemerintah Kota Jayapura, dengan Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;